

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Antara Teori dan Praktik



Anita Afriani S, S.IP, M.Si
Maryam Jamilah, S.IP, M.Si
Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

ANTARA TEORI DAN PRAKTIK

Anita Afriani Sinulingga

Maryam Jamilah

Society of Visual Informatics

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
(ANTARA TEORI DAN PRAKTIK)**

Penulis

Anita Afriani Sinulingga

Maryam Jamilah

Desain Sampul & Tata Letak

Taufik Gusman

ISBN

Cetakan 1, 2024

Penerbit

SOCIETY OF VISUAL INFORMATICS (SOTVI)

Alamat Penerbit

Komplek Perumahan Dosen Unand, Gadut, Padang Sumatera Barat

Email: rahmat@sotvi.org

Laman <https://sotvi.org/>

Barcode ISBN

-For the glory of the nation-

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji Syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan perkenanNya, penulisan buku ajar Politik Luar Negeri Indonesia akhirnya dapat diselesaikan. Kami menyadari buku ini masih sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan waktu di tengah-tengah kesibukan sebagai dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Andalas.

Mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di Departemen Hubungan Internasional semester 4, setelah mereka menyelesaikan perkuliahan pada mata kuliah Teori Politik Luar Negeri pada semester 3. Penyusunan buku ini dilatarbelakangi kondisi di mana keterbatasan referensi perkuliahan dalam Bahasa Indonesia.

Dalam proses penulisan buku ini, banyak orang telah membantu dan mendukung dalam pengumpulan data dan penataan materi yang disajikan. Dengan demikian, kami sangat berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam pembuatan buku ini. Secara khusus, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Andalas yang telah memberikan peluang bagi tim penulis untuk mendapatkan hibah Penulisan Buku Ajar berISBN tahun 2024. Kami berharap buku ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan

proses pembelajaran mahasiswa dan kelak akan menjadi pahala yang abadi untuk kita semua.

Akhirnya, sebagai karya manusia, kami menyadari bahwa buku ini pasti memiliki beberapa kekurangan yang memerlukan kritik dan saran untuk memperbaikinya di masa depan. Oleh karena itu, dengan hormat dan kerendahan hati, kami meminta kritik, saran, dan dukungan dari pembaca dan semua pihak yang berkenan untuk membantu kami melakukan upaya perbaikan ke depannya. Kami berharap dapat memberikan lebih banyak lagi saat menulis buku berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita.

Padang, November 2024

Penulis

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar ini dapat terselesaikan. Buku ini, berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia: Antara Teori dan Praktik*, disusun untuk memenuhi kebutuhan literatur perkuliahan di bidang Hubungan Internasional, khususnya dalam mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia. Buku ini bertujuan untuk memberikan landasan teori sekaligus wawasan praktis kepada mahasiswa dan pembaca mengenai dinamika politik luar negeri Indonesia dalam berbagai konteks global.

Buku ini hadir sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan referensi yang komprehensif dalam Bahasa Indonesia, terutama untuk menjembatani kesenjangan antara teori politik luar negeri dan implementasinya di lapangan. Pembahasan dalam buku ini mencakup berbagai aspek, mulai dari landasan filosofis, sejarah, hingga pendekatan kontemporer dalam memahami kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan berfokus pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, buku ini menguraikan bagaimana Indonesia menavigasi dinamika global untuk melindungi kedaulatan nasional dan berkontribusi pada perdamaian dunia.

Kami menyadari bahwa sebagai sebuah karya akademis, buku ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh sebab itu, kami dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di edisi mendatang. Semoga buku ini dapat

bermanfaat, tidak hanya sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga sebagai rujukan bagi praktisi, akademisi, dan siapa saja yang tertarik memahami politik luar negeri Indonesia.

Akhir kata, kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu hubungan internasional dan studi kebijakan luar negeri di Indonesia.

Padang, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	i
Prakata	ii
Daftar Isi	v
Daftar Singkatan.....	ix
Pendahuluan.....	xiii
BAB I POLITIK LUAR NEGERU DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL.....	1
1.1 Pengantar	2
1.2 Studi Politik Luar Negeri dalam Disiplin Hubungan Internasional	2
1.3 Sejarah dan Perkembangan Studi Politik Luar Negeri	4
1.4 Dimensi Meta-teoritis	7
1.5 Pendekatan Kontemporer.....	9
1.6 Perkembangan Kajian Analisis Politik Luar Negeri	12
1.5 Kesimpulan.....	14
BAB II POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF	21
2.1 Pengantar	21
2.2 Latar belakang perumusan Politik Luar Negeri Bebas Aktif	22
2.3 Definisi dan Karakteristik Utama Politik Bebas Aktif	24
2.4 Landasan Politik Luar Negeri Indonesia	27

2.5 Tujuan Utama Politik Bebas Aktif	29
2.6 Peran Indonesia di Dunia Internasional dan Pencapaian Tujuan Politik Bebas Aktif	31
2.7 Kasus-Kasus Kontemporer Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif	34
2.8 Kesimpulan.....	38
BAB III PERIODESASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA	45
3.1 Pengantar	45
3.2 Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia	46
3.3 Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Orde Lama 1959-1965.....	48
3.4 Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Orde Baru 1966-1998.....	51
3.5 Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era 1998- 2004	53
3.6 Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era SBY 2004-2016.....	56
3.7 Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Jokowi 2016-2024.....	58
3.8 Kesimpulan.....	61
BAB IV POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA: ANALISIS PERAN INDIVIDU	67
4.1 Pengantar	67
4.2 Tingkat Analisis Individu	69

4.3 Prakondisi Peran Pemimpin dalam Politik Luar Negeri Indonesia.....	81
4.4 Kesimpulan	97
BAB V POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA: ANALISIS FAKTOR AGAMA	104
5.2 Pengantar	104
5.2 Faktor Agama dalam Kajian Hubungan Internasional	106
5.3 Agama dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat	106
5.4 Agama dalam Politik Luar Negeri Rusia	108
5.5 Kerangka Teori Analisis Pengaruh Agama pada Pembentukan Politik Luar Negeri	111
5.6 Agama dalam Politik Luar Negeri Indonesia	119
5.7 Tantangan dalam Politik Luar Negeri Berbasis Agama.....	126
5.8 Peluang Penguatan Diplomasi Agama.....	127
5.9 Kesimpulan.....	129
BAB VI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA; ANALISIS PERAN MEDIA.....	134
6.1 Pengantar	134
6.2 Peran Media dalam Hubungan Internasional	135
6.3 Media dalam Pandangan Perspektif Hubungan Internasional	137
6.4 Media dalam Politik luar negeri Indonesia	147

6.5 Tantangan dan Peluang Penggunaan Media dalam Politik luar negeri Indonesia.....	158
6.6 Kesimpulan	160
BAB VII PENUTUP.....	165
DAFTAR PUSTAKA.....	168

DAFTAR SINGKATAN

9/11 - Merujuk pada serangan teroris di Amerika Serikat pada 11 September 2001.

ASEAN - Association of Southeast Asian Nations

AUKUS - Australia, United Kingdom, United States (aliansi keamanan trilateral)

AYIC - ASEAN Youth Interfaith Camp

BAZNAS - Badan Amil Zakat Nasional

BRI - Belt and Road Initiative

CoP - Culture of Prevention

COP - Conference of Parties (dalam konteks perubahan iklim, seperti COP 13 di Bali dan COP 15 di Kopenhagen)

COVID-19 - Coronavirus Disease 2019

CSIS - Center for Strategic and International Studies

ESDM - Energi dan Sumber Daya Mineral

FP - Foreign Policy

FPA - Foreign Policy Analysis

G-20 - Group of Twenty (Kelompok Dua Puluh Negara Ekonomi Utama)

IMF - International Monetary Fund

IR - International Relations

ISA - International Studies Association

IUU Fishing - Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing

KEMENAG - Kementerian Agama

KTT - Konferensi Tingkat Tinggi

OKI - Organisasi Kerjasama Islam

PBB - Perserikatan Bangsa-Bangsa

PKI - Partai Komunis Indonesia

PLN - Politik Luar Negeri

REDD+ - Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation

RRC - Republik Rakyat China

RTP - Responsibility to Protect

R2P - Responsibility to Protect

SDGs - Sustainable Development Goals

SIUPP - Surat Izin Usaha Penerbitan Pers

UNCLOS - United Nations Convention on the Law of the Sea

WHO - World Health Organization

WNI - Warga Negara Indonesia

ZEE - Zona Ekonomi Eksklusif

ZIS - Zakat, Infaq, dan Sedekah

PENDAHULUAN

Mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia merupakan mata kuliah wajib di Departemen Hubungan Internasional yang diajarkan pada semester 4 setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah Teori Politik Luar Negeri di semester 3. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia, yang menjadi landasan diplomasi sejak kemerdekaan. Pembelajaran mencakup berbagai aspek, mulai dari landasan filosofis, konstitusional, hingga operasional politik luar negeri, serta penerapannya dalam menghadapi dinamika global dan regional. Selain mengeksplorasi sejarah politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa, mata kuliah ini juga mendalami faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri, seperti peran agama dan media. Faktor agama dibahas sebagai elemen penting yang memengaruhi identitas diplomatik Indonesia dalam konteks regional dan global, sementara media dianalisis sebagai alat strategis dalam membingkai narasi politik luar negeri dan membentuk opini publik. Dengan mengintegrasikan teori dan studi kasus, mata kuliah ini membantu mahasiswa memahami bagaimana Indonesia merespons tantangan global sambil tetap menjaga kepentingan nasionalnya.

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif, termasuk landasan filosofis, konstitusional, dan operasionalnya. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis perkembangan politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa, dengan menyoroti dinamika domestik dan internasional yang memengaruhi kebijakan tersebut. Selain itu, mata kuliah ini melatih mahasiswa untuk mengevaluasi implementasi politik luar negeri dalam isu-isu kontemporer, seperti konflik regional, perubahan iklim, dan diplomasi ekonomi. Pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh agama juga menjadi salah satu capaian pembelajaran, khususnya dalam konteks diplomasi kemanusiaan dan solidaritas dunia Islam. Mahasiswa akan mempelajari peran media sebagai alat strategis untuk mempromosikan citra nasional dan membingkai isu-isu politik luar negeri, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang di era digital. Dengan pengetahuan ini, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan luar negeri yang adaptif, berbasis analisis faktor domestik dan global, untuk mendukung peran Indonesia di kancah internasional.

Mata kuliah ini diajarkan dalam satu semester yang terbagi menjadi beberapa topik utama, dimulai dengan pengantar konsep politik luar negeri bebas aktif yang menjadi landasan diplomasi Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa akan diajak mengeksplorasi perkembangan politik luar negeri Indonesia dari berbagai era pemerintahan, dengan fokus pada

konteks domestik dan dinamika global yang memengaruhi kebijakan tersebut. Selain itu, pembelajaran mencakup analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri, seperti peran agama dalam membentuk solidaritas dunia Islam dan diplomasi kemanusiaan, serta peran media dalam membingkai narasi politik luar negeri dan membangun citra nasional di kancah internasional.

Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini mengintegrasikan teori dan studi kasus melalui kombinasi perkuliahan tatap muka, diskusi kelompok, dan tugas mandiri. Studi kasus yang dibahas mencakup isu-isu kontemporer seperti diplomasi maritim Indonesia di Laut China Selatan, peran Indonesia dalam isu Rohingya, serta diplomasi perubahan iklim. Mahasiswa juga akan dilibatkan dalam simulasi diplomasi dan analisis kebijakan untuk melatih kemampuan praktis mereka dalam menghadapi tantangan global. Penilaian terhadap pemahaman mahasiswa dilakukan melalui evaluasi formatif seperti tugas individu dan kelompok, serta evaluasi sumatif berupa ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Melalui pendekatan pembelajaran yang terstruktur ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori politik luar negeri Indonesia tetapi juga mampu menganalisis dan merumuskan kebijakan berdasarkan kebutuhan nasional dan dinamika internasional.

BAB 1**POLITIK LUAR NEGERI DALAM
STUDI HUBUNGAN
INTERNASIONAL****1.1 Pengantar**

Analisis politik luar negeri sebagai sub-disiplin dalam studi hubungan internasional, dengan fokus pada perkembangan sejarah, dimensi meta-teoritis, pendekatan kontemporer, dan kontribusinya dalam menganalisis dinamika politik luar negeri di tingkat global. Meskipun beberapa dekade lalu studi ini sempat dipandang kurang relevan, kini kebangkitan signifikan dalam kajian ini, terutama sejak awal abad ke-21, menjadikannya semakin penting dan dihargai dalam dunia akademis. Bab ini juga memperkenalkan terminologi yang lebih tepat untuk menghindari kebingungan dalam diskusi ilmiah, serta memberikan wawasan terkait perkembangan teoretis yang mempengaruhi analisis politik luar negeri saat ini.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami evolusi analisis politik luar negeri, mengenali berbagai pendekatan teoretis yang digunakan dalam menganalisis politik luar negeri, dan mengaplikasikan perspektif kontemporer dalam memahami dinamika politik global. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor domestik dan internasional yang

mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, serta menghubungkannya dengan teori dan praktik dalam studi hubungan internasional.

Bab ini sangat relevan dengan perkembangan keilmuan dan kompetensi lulusan dalam konteks hubungan internasional. Pemahaman yang mendalam tentang analisis politik luar negeri memberikan kompetensi yang dibutuhkan lulusan untuk berkontribusi dalam dunia kerja, baik di sektor pemerintahan, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, maupun perusahaan multinasional yang berhubungan dengan kebijakan global. Dalam masyarakat, lulusan yang menguasai kajian ini mampu memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hubungan internasional, serta membantu mengembangkan politik luar negeri yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan global yang terus berkembang.

1.2 Studi Politik Luar Negeri dalam Disiplin Hubungan Internasional

Beberapa dekade yang lalu, studi tentang politik luar negeri masih dipertanyakan relevansinya, dengan anggapan bahwa bidang ini mungkin sudah tidak lagi relevan dan berpotensi digantikan oleh pendekatan lain dalam Hubungan Internasional (White, 2001). Namun, sepuluh tahun kemudian, pandangan pesimis ini telah berubah drastis. Alih-alih kehilangan identitasnya, bidang analisis politik luar negeri justru mengalami kebangkitan yang signifikan, seperti yang

dikemukakan oleh Valerie Hudson. Menurut Hudson (2007), awal abad ke-21 menjadi momen yang tepat bagi kebangkitan analisis politik luar negeri, yang semakin dianggap penting secara teoretis. Indikator dari kebangkitan ini antara lain adalah peluncuran jurnal *Foreign Policy Analysis* pada tahun 2005, pertumbuhan signifikan bagian *Foreign Policy Analysis* dalam *International Studies Association*, dan banyaknya esai yang berfokus pada analisis politik luar negeri dalam *The International Studies Encyclopedia* (Carlsnaes, 2013).

Selanjutnya, dalam buku ini, penggunaan terminologi yang digunakan adalah Politik luar negeri (*Foreign Policy*). *FP* akan digunakan sebagai pengganti *FPA* untuk merujuk pada bidang studi yang biasanya disebut *Foreign Policy Analysis* (Analisis Politik luar negeri), meskipun *FPA* adalah singkatan yang lebih umum dalam literatur saat ini. Alasan utamanya adalah bahwa singkatan *FPA* telah digunakan untuk merujuk pada pendekatan spesifik dalam studi politik luar negeri, yang lebih fokus pada proses psikologis dan pengambilan keputusan, daripada mencakup keseluruhan bidang studi tersebut (Hudson, 2005, 2007, 2016). Praktik terminologis ini dianggap menyesatkan karena mempersempit ruang lingkup analitis bidang ini seperti yang sebenarnya ditemukan dalam literatur politik luar negeri, sehingga menyebabkan kebingungan yang tidak perlu dalam diskusi saat ini (S. Smith et al., 2016). Selain itu, penggunaan singkatan *FP* lebih selaras dengan cara analisis

hubungan internasional (*International Relations*) disingkat, yaitu *IR*, bukan *IRA* (Carlsnaes, 2013).

Lebih lanjut, peningkatan minat akademis dan kontribusi kajian politik luar negeri sebagai sebuah sub-disiplin Hubungan Internasional ini dijelaskan mulai dengan latar belakang perkembangan tersebut, tinjauan terhadap kondisi masa lalu dan saat ini dari bidang politik luar negeri. Bagian ini akan memulai dengan menyajikan sejarah intelektual analisis politik luar negeri, khususnya perkembangan selama sekitar setengah abad terakhir. Setelah itu, bagian ini akan memberikan tinjauan konseptual dan analitis tentang bidang ini, dengan membahas masalah-masalah definisional mendasar dan memaparkan empat tipe dasar kerangka penjelasan. Tipe-tipe ini didefinisikan berdasarkan dua dimensi meta-teoritis utama dalam filsafat ilmu sosial. Berdasarkan empat perspektif umum atau tipe ideal tersebut, bab ini akan menyoroti dan membahas beberapa upaya kontemporer yang menonjol dalam menganalisis subdisiplin ini.

1.3 Sejarah dan Perkembangan Studi Politik luar negeri

Perkembangan historis analisis politik luar negeri telah didiskusikan selama setengah abad terakhir. Diskusi ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pendekatan-pendekatan terhadap politik luar negeri berkembang dari waktu ke waktu (Carlsnaes, 2013). Asal-usul analisis politik luar negeri secara akademis berakar kuat di Amerika Serikat, terutama

dalam bidang kebijakan publik. Namun, sejarah empiriknya dapat ditelusuri kembali ke tradisi yang lebih lama, terutama di Eropa sejak abad ke-17, dengan kemunculan negara modern dan pandangan bahwa politik luar negeri merupakan domain yang berbeda secara mendasar dari ranah politik dan kebijakan publik lainnya.

Beberapa poin utama dalam sejarah intelektual studi ini, sebagaimana dijelaskan oleh Carlsnaes et al. (2013) , adalah sebagai berikut:

a. Primasi Politik luar negeri

Pada awalnya, politik luar negeri dipandang lebih penting dibandingkan dengan kebijakan lainnya karena dianggap menyangkut kepentingan nasional yang lebih fundamental, bukan hanya kepentingan yang bersifat khusus atau spesifik. Pandangan ini juga menyiratkan bahwa politik luar negeri harus diperlakukan secara berbeda dan dikecualikan dari kontrol demokratis dan pengawasan publik.

b. Pengaruh Perang Dunia I dan Wilsonianisme

Setelah Perang Dunia I, ada dorongan dari pemimpin seperti Woodrow Wilson untuk mengakhiri praktik diplomasi rahasia yang dinilai menyebabkan perang dan kehancuran besar. Hal ini menyebabkan studi politik luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, terpengaruh oleh ideologi liberal dan demokratis yang

mendorong transparansi serta efisiensi dalam lembaga pemerintahan yang terlibat dalam politik luar negeri.

c. Tradisi Realisme

Tradisi kedua yang berpengaruh adalah realisme, yang mendapat perhatian besar terutama di Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Hans Morgenthau adalah tokoh sentral yang menyebarkan gagasan realisme dengan fokus pada kekuasaan dan kepentingan nasional sebagai prinsip utama dalam menjelaskan perilaku negara di kancah internasional.

d. Domestikasi Politik luar negeri

Seiring waktu, terjadi perubahan dari pandangan tradisional, yang melihat diplomasi hanya dikelola oleh sekelompok kecil elit negara, menjadi pendekatan yang lebih terbuka dan demokratis. Lebih lanjut, studi politik luar negeri mulai memperhatikan aspek domestik, termasuk bagaimana proses pengambilan keputusan kebijakan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai publik dan kepentingan sosial yang lebih luas.

Penjelasan sejarah intelektual ini menggambarkan bagaimana analisis politik luar negeri berkembang dari kajian diplomasi tradisional menjadi pendekatan ilmiah yang lebih komprehensif dan sistematis, dengan menggabungkan pengaruh domestik, psikologis, dan internasional dalam analisisnya. Lebih lanjut, bagian ini memberikan gambaran

tentang evolusi pemikiran yang membentuk landasan teori-teori politik luar negeri, mulai dari pendekatan realisme klasik hingga perspektif kontemporer seperti konstruktivisme.

1.4 Dimensi Meta-teoritis

Untuk memahami perkembangan analisis politik luar negeri secara menyeluruh, diperlukan penjelasan sejarah intelektual analisis politik luar negeri dengan kerangka meta-teoritis yang mendasarinya. Terdapat dua dimensi meta-teoritis utama dalam filsafat ilmu sosial yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan politik luar negeri. Berdasarkan dimensi ini, empat tipe ideal kerangka penjelasan dijelaskan, yang tidak terbatas pada *school* atau *great debate*, melainkan lebih didasarkan pada pendekatan analitis yang lebih mendasar.

Dalam analisis politik luar negeri, Walter Carlsnaes (2013) menjelaskan dua dimensi meta-teoritis utama yang mendasari pendekatan-pendekatan dalam ilmu sosial, yaitu dimensi ontologis dan dimensi epistemologis.

Pertama, dimensi ontologis berhubungan dengan pertanyaan tentang apa yang membentuk realitas sosial yang dianalisis. Carlsnaes mengidentifikasi dua kubu dalam dimensi ini yaitu individualisme dan holisme. Individualisme berargumen bahwa individu adalah unit dasar dari realitas sosial, di mana perilaku dan keputusan mereka merupakan fokus utama analisis. Sebaliknya, holisme menekankan bahwa struktur-struktur sosial, seperti norma-norma dan institusi,

memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu, dan analisis harus memperhitungkan struktur-struktur ini sebagai bagian integral dari realitas sosial yang lebih luas.

Kedua, dimensi epistemologis berfokus pada cara pengetahuan diperoleh dan dipahami. Terdapat dua pendekatan dalam dimensi ini yaitu objektivisme dan interpretivisme. Objektivisme menganggap bahwa realitas sosial dapat dianalisis dengan metode ilmiah yang serupa dengan ilmu alam, menggunakan pengukuran dan observasi yang objektif. Di sisi lain, interpretivisme menekankan bahwa realitas sosial bersifat subyektif dan dipenuhi dengan makna-makna yang diciptakan oleh interaksi antar manusia. Oleh karena itu, analisis sosial harus fokus pada pemahaman makna-makna yang dipahami oleh para aktor sosial dari dalam.

Gabungan dari dua dimensi meta-teoritis ini menghasilkan berbagai pendekatan dalam analisis politik luar negeri, mulai dari pendekatan berbasis struktur yang melihat politik luar negeri sebagai hasil dari pengaruh sistemik dan struktural, hingga pendekatan berbasis agensi yang lebih menitikberatkan pada keputusan dan tindakan individu-individu yang terlibat dalam proses politik luar negeri. Setiap pendekatan ini menawarkan cara yang berbeda dalam menjelaskan bagaimana politik luar negeri dihasilkan dan bagaimana faktor-faktor internal maupun eksternal mempengaruhinya.

Setelah memahami dimensi meta-teoritis yang membentuk dasar analisis politik luar negeri, penting untuk melihat bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam berbagai pendekatan kontemporer. Dimensi ontologis dan epistemologis tidak hanya memberikan kerangka teoritis untuk memahami interaksi antara aktor dan struktur dalam politik luar negeri, tetapi juga menjadi landasan bagi perkembangan metode dan teori yang lebih baru. Pendekatan kontemporer yang diuraikan oleh Carlsnaes (2013), seperti realisme, konstruktivisme, dan teori pengambilan keputusan, berakar pada perdebatan meta-teoritis ini dan menggambarkan bagaimana berbagai perspektif digunakan untuk menganalisis politik luar negeri dalam konteks global yang dinamis.

1.5 Pendekatan Kontemporer

Pendekatan kontemporer yang dijelaskan dalam analisis politik luar negeri mencakup berbagai perspektif dan metode yang saat ini digunakan untuk memahami politik luar negeri negara-negara. Pendekatan ini dapat dijelaskan dalam beberapa kategori besar berdasarkan dua dimensi meta-teoritis yaitu dimensi ontologi, yang berhubungan dengan sifat realitas sosial, dan metodologi, yang berhubungan dengan cara memperoleh pengetahuan. Berdasarkan dimensi-dimensi tersebut, pendekatan kontemporer dalam analisis politik luar negeri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Struktural

Realisme dan Neo-realisme masih menjadi pendekatan dominan dalam menjelaskan politik luar negeri. Realisme menekankan pentingnya struktur anarki dalam sistem internasional dan bagaimana negara-negara berusaha memaksimalkan keamanan melalui penguatan kekuasaan. Neo-realisme lebih lanjut memperjelas peran struktur internasional dalam membatasi pilihan politik luar negeri negara-negara. Neo-liberal institusionalisme juga dipandang sebagai salah satu pendekatan yang relevan, dengan fokus pada bagaimana institusi internasional dapat memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam konteks anarki.

b. Pendekatan Berbasis Agensi

Fokus pada proses pengambilan keputusan politik luar negeri, pendekatan ini menekankan bahwa keputusan politik luar negeri dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan kognitif pada tingkat individu. Proses pengambilan keputusan, birokrasi, dan politik dalam negeri memainkan peran penting dalam hasil kebijakan. Lebih lanjut, teori liberal baru juga berfokus pada hubungan antara negara dan masyarakat, termasuk bagaimana dinamika domestik dan transnasional mempengaruhi perilaku negara di panggung internasional.

c. Pendekatan Sosial-Institusional

Konstruktivisme sosial, yang menekankan bagaimana norma-norma sosial, identitas kolektif, dan konstruksi sosial lainnya membentuk politik luar negeri. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya ide-ide, norma, dan identitas

dalam proses pembuatan politik luar negeri. Pendekatan diskursif juga termasuk dalam kategori ini, di mana wacana yang berlaku dalam politik internasional dipandang sebagai faktor penting yang memengaruhi cara negara memahami peran mereka dan membuat keputusan kebijakan.

d. Pendekatan Aktor Interpretatif

Pendekatan ini melihat individu sebagai unit analisis utama, di mana pemahaman tentang keputusan politik luar negeri berpusat pada bagaimana individu yang memiliki kekuasaan menafsirkan dan merespons situasi yang mereka hadapi. Pemikiran dan persepsi individu pengambil keputusan menjadi kunci dalam memahami politik luar negeri (Carlsnaes et al., 2013).

Lebih lanjut, pendekatan-pendekatan kontemporer ini mencerminkan pluralitas metodologi dalam analisis politik luar negeri, yang menggabungkan pengaruh struktur sistem internasional, proses pengambilan keputusan individu, serta konstruksi sosial yang membentuk norma dan identitas internasional.

Pendekatan seperti realisme, konstruktivisme, dan teori pengambilan keputusan tidak hanya memperkaya perspektif teoretis, tetapi juga mendorong kebangkitan minat akademis yang signifikan terhadap sub-disiplin ini. Perkembangan bidang ini terlihat dari semakin banyaknya publikasi, konferensi, dan forum akademis yang dikhususkan untuk analisis politik luar negeri. Dengan kata lain, pendekatan-pendekatan kontemporer

telah menjadi motor penggerak bagi revitalisasi bidang ini, menjadikannya salah satu bidang kajian yang semakin menonjol dalam ilmu hubungan internasional. Transisi ini menggambarkan bagaimana teori-teori kontemporer tidak hanya mempengaruhi cara kita menganalisis politik luar negeri, tetapi juga mengubah status dan posisi sub-disiplin ini dalam komunitas akademis global. Setelah mengulas berbagai pendekatan kontemporer dalam analisis politik luar negeri, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana pendekatan-pendekatan ini berkontribusi terhadap perkembangan bidang analisis politik luar negeri secara komprehensif.

1.6 Perkembangan Kajian Analisis Politik luar negeri

Dalam beberapa dekade terakhir, bidang analisis politik luar negeri mengalami perkembangan yang signifikan, terutama sejak awal abad ke-21. Pada mulanya, studi politik luar negeri lebih sering dianggap sebagai sub-bidang dari hubungan internasional yang berfokus pada proses pengambilan keputusan pemerintah dalam merumuskan kebijakan terhadap aktor-aktor asing. Namun, ada peningkatan yang nyata dalam minat akademik dan kontribusi terhadap sub-disiplin ini.

Salah satu indikasi perkembangan ini adalah berdirinya jurnal "Foreign Policy Analysis" pada tahun 2005, yang menjadi platform khusus untuk penelitian di bidang ini. Selain itu, bagian Analisis Politik luar negeri dalam International Studies Association (ISA) juga telah berkembang pesat menjadi salah

satu yang terbesar dalam asosiasi tersebut. Banyak esai dan penelitian berfokus pada topik analisis politik luar negeri, dengan puluhan artikel diterbitkan dalam ensiklopedia dan jurnal-jurnal terkemuka (Carlsnaes, 2013).

Lebih lanjut, Carlsnaes (2013) menekankan bahwa analisis politik luar negeri saat ini telah menjadi semakin penting secara teoretis dan diposisikan untuk menjadi salah satu bidang terdepan dalam ilmu sosial pada abad ke-21. Transformasi ini dipicu oleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh berbagai faktor domestik dan internasional terhadap pembuatan politik luar negeri, serta upaya untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan teoretis dalam studi ini (Carlsnaes et al., 2013). Secara keseluruhan, kebangkitan ini menunjukkan revitalisasi yang kuat dari sub-disiplin yang dulunya berada di pinggiran studi hubungan internasional, menjadi bidang yang semakin menonjol dan dihargai dalam studi akademis.

Diskusi tentang sejarah intelektual analisis politik luar negeri, dimensi meta-teoritis, pendekatan kontemporer, dan perkembangan bidang ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara fondasi historis, teori, dan praktik dalam disiplin ini. Sejarah intelektual memberikan landasan bagi perkembangan berbagai teori politik luar negeri, yang kemudian diperkaya oleh pemahaman meta-teoritis tentang hubungan antara agen dan struktur, serta metode epistemologis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Pendekatan kontemporer yang

beragam, seperti realisme, konstruktivisme, dan teori pengambilan keputusan, mencerminkan bagaimana dimensi-dimensi meta-teoritis ini diterapkan dalam analisis politik luar negeri di dunia yang terus berubah. Lebih jauh lagi, kontribusi pendekatan-pendekatan ini terhadap perkembangan bidang analisis politik luar negeri telah mendorong revitalisasi sub-disiplin ini, menjadikannya semakin penting dan relevan dalam studi hubungan internasional. Dengan demikian, perkembangan intelektual dan teoretis ini saling terkait dan membentuk kerangka yang komprehensif untuk memahami dinamika politik luar negeri di era globalisasi.

1.7 Kesimpulan

Analisis politik luar negeri dalam studi hubungan internasional menunjukkan bahwa bidang ini telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Awalnya dipandang kurang relevan, analisis politik luar negeri kini mengalami kebangkitan yang kuat, dengan meningkatnya minat akademis dan publikasi yang berfokus pada topik ini. Kebangkitan ini tercermin dalam berdirinya jurnal "Foreign Policy Analysis" pada tahun 2005 dan berkembangnya bagian ini dalam asosiasi studi internasional. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan teoretis seperti realisme, konstruktivisme, dan teori pengambilan keputusan, analisis politik luar negeri kini menjadi salah satu bidang kajian utama dalam disiplin hubungan internasional.

Perkembangan ini juga didorong oleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh faktor domestik dan internasional terhadap politik luar negeri. Melalui dimensi meta-teoritis seperti ontologi dan epistemologi, pendekatan-pendekatan kontemporer dalam analisis politik luar negeri kini mampu menggambarkan lebih holistik bagaimana politik luar negeri dihasilkan, baik oleh struktur sistem internasional maupun individu yang terlibat dalam proses pengambilannya. Seiring waktu, sub-disiplin ini semakin relevan dalam dunia akademis dan praktik kebijakan internasional, memberikan wawasan yang lebih baik dalam memahami dinamika politik luar negeri di tengah globalisasi dan perubahan geopolitik yang cepat.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa yang menyebabkan kebangkitan kembali studi politik luar negeri di awal abad ke-21, dan faktor apa saja yang mendorong peningkatan minat akademis terhadap bidang ini?
2. Bagaimana perbedaan antara istilah Foreign Policy (FP) dan Foreign Policy Analysis (FPA) mempengaruhi cakupan analisis dalam studi politik luar negeri?
3. Bagaimana sejarah analisis politik luar negeri mempengaruhi pandangan kita tentang pentingnya politik luar negeri dibandingkan dengan kebijakan domestik?

4. Mengapa tradisi realisme masih sangat berpengaruh dalam analisis politik luar negeri, terutama di Amerika Serikat, meskipun ada banyak pendekatan baru?
5. Bagaimana perubahan dari diplomasi rahasia menuju transparansi dalam politik luar negeri memengaruhi praktik diplomasi modern?
6. Apa saja peran dan pengaruh dari dimensi ontologis (individualisme vs. holisme) dalam memahami politik luar negeri suatu negara?
7. Bagaimana pendekatan berbasis agensi dapat memberikan perspektif berbeda dibandingkan dengan pendekatan struktural dalam analisis politik luar negeri?
8. Mengapa pendekatan konstruktivisme sosial dianggap penting dalam analisis politik luar negeri, dan bagaimana norma serta identitas kolektif memengaruhi keputusan kebijakan suatu negara?
9. Bagaimana perkembangan metode dan teori kontemporer dalam analisis politik luar negeri memperkaya pemahaman kita tentang perilaku negara di panggung internasional?
10. Apa implikasi dari kebangkitan sub-disiplin analisis politik luar negeri terhadap studi Hubungan Internasional secara umum, dan bagaimana bidang ini dapat berkembang di masa depan?

Glosarium

Politik luar negeri (Foreign Policy): Kebijakan yang dirumuskan oleh suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain dan aktor internasional lainnya demi mencapai kepentingan nasionalnya.

Analisis Politik luar negeri (Foreign Policy Analysis/FPA): Studi dan analisis mendalam mengenai proses, faktor, dan teori yang memengaruhi perumusan serta implementasi politik luar negeri suatu negara.

Realisme (Realism): Sebuah pendekatan dalam Hubungan Internasional yang menekankan pentingnya kekuasaan dan kepentingan nasional sebagai dasar utama dalam perilaku negara di kancah internasional.

Neo-realisme (Neorealism): Pengembangan dari teori realisme yang menekankan struktur internasional, terutama anarki dalam sistem internasional, yang memengaruhi keputusan politik luar negeri negara.

Konstruktivisme: Pendekatan dalam Hubungan Internasional yang menyoroti pentingnya norma, identitas, dan konstruksi sosial yang membentuk persepsi dan tindakan negara dalam arena internasional.

Dimensi Ontologis: Dimensi dalam filsafat ilmu sosial yang membahas tentang hakikat realitas sosial yang dianalisis, terutama terkait dengan perdebatan antara individualisme (fokus pada individu) dan holisme (fokus pada struktur sosial).

Dimensi Epistemologis: Dimensi dalam filsafat ilmu sosial yang berfokus pada cara memperoleh pengetahuan, yang terbagi menjadi objektivisme (penekanan pada metode ilmiah dan objektif) dan interpretivisme (penekanan pada pemahaman makna dari perspektif aktor sosial).

Wilsonianisme: Ideologi yang diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson yang mendorong diplomasi transparan dan demokratis, berupaya mengakhiri praktik diplomasi rahasia setelah Perang Dunia I.

Primasi Politik luar negeri: Konsep bahwa politik luar negeri dianggap lebih penting daripada kebijakan lainnya karena menyangkut kepentingan nasional yang lebih luas dan fundamental.

Pendekatan Struktural: Pendekatan dalam analisis politik luar negeri yang menekankan pengaruh struktur internasional dalam membatasi pilihan politik luar negeri suatu negara.

Pendekatan Berbasis Agensi: Pendekatan dalam analisis politik luar negeri yang fokus pada proses pengambilan keputusan individu atau kelompok dalam pemerintah yang memengaruhi politik luar negeri.

Pendekatan Sosial-Institusional: Pendekatan yang menyoroti pengaruh norma sosial, identitas kolektif, dan konstruksi sosial dalam membentuk politik luar negeri.

Pendekatan Aktor Interpretatif: Pendekatan yang menempatkan individu sebagai unit utama dalam analisis politik luar negeri, dengan menekankan bagaimana individu mengambil keputusan menafsirkan dan merespons situasi.

International Studies Association (ISA): Organisasi akademis yang mengkhususkan diri dalam studi Hubungan Internasional dan politik luar negeri, yang memiliki bagian khusus untuk Analisis Politik luar negeri.

The International Studies Encyclopedia: Kumpulan esai dan artikel yang berfokus pada studi Hubungan Internasional dan politik luar negeri, yang menjadi salah satu sumber utama dalam subdisiplin ini.

Anarki (Anarchy): Konsep dalam Hubungan Internasional yang menyatakan bahwa sistem internasional tidak memiliki otoritas sentral, sehingga negara-negara beroperasi dalam kondisi tanpa aturan yang terpusat.

Pengambilan Keputusan Politik luar negeri (Foreign Policy Decision Making): Proses penentuan keputusan terkait politik luar negeri yang dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, kognitif, serta kondisi domestik dan internasional.

Meta-Teoritis: Pendekatan teoretis yang berfungsi sebagai landasan pemikiran dalam ilmu sosial, terutama terkait dimensi ontologis dan epistemologis yang membentuk analisis politik luar negeri.

Perspektif Kontemporer: Pendekatan atau teori yang berkembang saat ini dalam studi politik luar negeri, yang mencakup realisme, konstruktivisme, dan teori pengambilan keputusan.

Diplomasi Rahasia: Praktik diplomasi yang dilakukan secara tertutup atau tersembunyi dari publik, yang banyak dikritik karena dianggap dapat menyebabkan ketidakpercayaan antar negara.

BAB 2**POLITIK LUAR NEGERI BEBAS
AKTIF****2.1 Pengantar**

Bagian ini membahas tentang perumusan dan implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia, yang berakar dari kondisi geopolitik global, pengalaman kolonial, serta perkembangan sejarah yang membentuk politik luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan. Bab ini mengulas berbagai aspek yang melandasi kebijakan bebas aktif, mulai dari konteks historis, karakteristik utama, hingga implementasinya dalam berbagai kasus kontemporer seperti sengketa Laut China Selatan, isu Rohingya, serta tantangan perubahan iklim dan lingkungan. Pembaca akan memahami bagaimana Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, menavigasi dinamika global yang kompleks, menjaga kedaulatan nasional, dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

Capaian Pembelajaran pada bagian ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep politik luar negeri bebas aktif, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama yang mendasari kebijakan tersebut, serta menganalisis penerapannya dalam berbagai isu internasional. Relevansi bab ini sangat penting dalam mendukung perkembangan keilmuan dalam bidang Hubungan Internasional, karena memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana negara dapat berperan aktif di dunia internasional tanpa terikat pada aliansi tertentu.

Selain itu, bab ini juga relevan dalam pengembangan kompetensi lulusan, baik di dunia akademis maupun dunia kerja, dengan memberikan pemahaman yang diperlukan untuk berkontribusi dalam diplomasi internasional, analisis politik luar negeri, dan penyelesaian konflik global. Keahlian ini sangat dibutuhkan di berbagai sektor seperti pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, serta perusahaan yang beroperasi dalam konteks global.

2.2 Latar belakang perumusan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Perumusan politik luar negeri bebas aktif Indonesia berakar pada kondisi geopolitik global dan pengalaman kolonial yang membentuk pandangan politik para pemimpin Indonesia pada awal kemerdekaan. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tekanan diplomatik dari Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah tersebut. Situasi ini memaksa Indonesia untuk mencari dukungan internasional di tengah-tengah ketegangan global yang diwarnai persaingan ideologis antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet (Kusno, 2014). Dengan kondisi ini, para pemimpin Indonesia, terutama Presiden Soekarno, merasa bahwa politik luar negeri yang independen dan aktif diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan mempertahankan eksistensi negara yang baru lahir ini (WARDHANI & DUGIS, 2023)

Di tengah suasana Perang Dingin, dunia terbagi menjadi dua blok besar yang saling berlawanan secara ideologis. Indonesia, yang baru merdeka, ingin menghindari terjebak dalam konflik yang tidak menguntungkan kepentingan nasional. Soekarno dan para pemimpin Indonesia lainnya percaya bahwa keterlibatan dalam blok mana pun akan mengancam kedaulatan negara serta membahayakan stabilitas politik dalam negeri yang masih rapuh (WARDHANI & DUGIS, 2023). Oleh karena itu, kebijakan bebas aktif menjadi pilihan untuk menghindari keterikatan pada salah satu blok, sambil tetap aktif dalam mendorong perdamaian dan kerjasama internasional, khususnya di antara negara-negara yang baru merdeka (Setyowati, 2023)

Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 menjadi salah satu tonggak penting dari kebijakan bebas aktif ini. Konferensi ini menjadi simbol solidaritas negara-negara berkembang yang ingin menghindari pengaruh kolonialisme dan imperialisme yang masih kuat. Indonesia menjadi inisiator dan tuan rumah konferensi tersebut, yang menghasilkan Deklarasi Bandung sebagai bentuk komitmen bersama untuk tidak terlibat dalam konflik antara blok Barat dan Timur serta untuk saling mendukung dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan (Phillips, 2016). Deklarasi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan mandiri dalam menjalankan politik luar negeri, serta memperkuat jaringan

internasional dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa (Antoinette BURTON, 2018)

Pengalaman sejarah kolonial dan dinamika internasional yang sarat konflik mendorong Indonesia untuk memilih jalan bebas aktif, yang memungkinkan negara ini memainkan peran sebagai "jembatan" antara negara-negara berkembang dan menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Prinsip ini menjadi landasan politik luar negeri Indonesia hingga saat ini, mencerminkan aspirasi untuk menjaga kedaulatan dan menciptakan perdamaian di tengah-tengah ketidakstabilan global (Luerdi & Setiawan, 2022; Wardhani & Dharmaputra, 2024). Kebijakan bebas aktif ini tidak hanya sekadar strategi bertahan, tetapi juga merupakan wujud dari cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keadilan (Azzqy & Awal, 2023a; Wijayanti, 2022).

2.3 Definisi dan Karakteristik Utama Politik Bebas Aktif

Politik luar negeri bebas aktif adalah pendekatan yang dijalankan oleh Indonesia sejak kemerdekaannya, yang menekankan pada independensi dan partisipasi aktif di kancah internasional. Secara konseptual, "bebas" berarti Indonesia tidak terikat oleh aliansi atau blok kekuatan tertentu, seperti blok Barat atau Timur, khususnya pada era Perang Dingin. Indonesia memilih untuk tidak memihak kekuatan besar mana

pun yang dapat mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional. Sementara itu, "aktif" berarti Indonesia mengambil peran dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dunia, bukan hanya sekedar menunggu atau mengikuti arus tanpa memberikan kontribusi signifikan Pendekatan ini mendasari berbagai kebijakan diplomatik Indonesia, baik dalam konteks regional maupun global (Hardiansyah et al., 2022; WARDHANI & DUGIS, 2023)

Politik luar negeri bebas aktif Indonesia memiliki beberapa ciri utama yang mencerminkan sikap independen dan peran aktifnya di panggung internasional. Salah satu ciri utama adalah netralitas terhadap blok-blok kekuatan besar dunia. Netralitas Indonesia juga terlihat jelas dalam tanggapannya terhadap ketegangan geopolitik, seperti sengketa Laut Cina Selatan. Sembari menegaskan hak-hak kedaulatannya atas Laut Natuna Utara, Indonesia mempertahankan pendekatan diplomasi lunak dan sikap independen, menggunakan strategi lindung nilai untuk menavigasi dinamika kekuatan yang kompleks antara Cina dan aktor-aktor regional lainnya (Ma'ruf et al., 2020).

Ciri utama lain dari politik bebas aktif adalah fleksibilitas dalam menjalin hubungan internasional. Indonesia tidak membatasi hubungan diplomatiknya hanya pada negara tertentu atau kelompok negara tertentu, tetapi tetap terbuka untuk berinteraksi dengan berbagai negara sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Fleksibilitas ini memungkinkan

Indonesia untuk menyesuaikan politik luar negeri sesuai dengan dinamika global dan kepentingan nasional yang berubah-ubah (Azzqy & Awal, 2023b). Dalam praktiknya, fleksibilitas ini terlihat dalam pendekatan Indonesia terhadap berbagai isu internasional, seperti hubungan ekonomi yang tetap terjalin baik dengan negara-negara besar meskipun memiliki pandangan yang berbeda dalam beberapa isu politik

Selain netralitas dan fleksibilitas, komitmen terhadap perdamaian dunia juga menjadi ciri utama politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan menentang segala bentuk penjajahan serta imperialisme. Indonesia telah menggunakan diplomasi bebas aktifnya untuk mendorong resolusi damai dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas regional tanpa memihak salah satu pihak dalam konflik (Rahmat Kartiwa & Zakiah Jalianty, 2023). Indonesia juga aktif dalam forum internasional untuk menangani pandemi COVID-19 dan mempromosikan ketersediaan alat medis serta kesetaraan vaksin bagi semua negara di dunia (Delanova, 2021). Melalui politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terus berupaya menjaga perdamaian dan stabilitas regional maupun global, sambil tetap memprioritaskan kepentingan nasional dan keuntungan domestik dari hubungan luar negeri.

Ketiga ciri utama PLN Bebas Aktif ini, yaitu netralitas, fleksibilitas, dan komitmen terhadap perdamaian, menunjukkan upaya Indonesia untuk menjaga independensi, memperkuat posisinya di kancah global, dan berkontribusi pada stabilitas dunia. Ciri-ciri ini telah menjadi landasan bagi politik luar negeri Indonesia dan memainkan peran penting dalam membangun citra Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan peduli terhadap perdamaian dunia.

2.4 Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik Luar Negeri Indonesia berlandaskan pada tiga dasar utama yaitu landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional (Widhiyoga & Harini, 2019). Ketiga landasan ini membentuk kerangka fundamental politik luar negeri yang mengarahkan peran Indonesia di panggung internasional. Selanjutnya ketiga landasan ini menjadi dasar bagi politik luar negeri Indonesia untuk berperan secara independen dan aktif dalam mempromosikan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian dunia. Dengan landasan ini, politik luar negeri Indonesia dapat mempertahankan fleksibilitas dalam mengelola hubungan internasional, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai nasional dan cita-cita bangsa (Widhiyoga & Harini, 2019)

Landasan pertama adalah landasan idiil dari politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, yang berperan sebagai dasar filosofi dan panduan moral bagi politik luar negeri Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang mengedepankan keadilan sosial, tercermin dalam upaya diplomasi yang menjunjung perdamaian dan keadilan bagi semua negara. Prinsip ini mengarahkan Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan menghindari keterlibatan dalam konflik ideologis, khususnya yang dapat memengaruhi kedaulatan negara (Widhiyoga & Harini, 2019) Selain itu, landasan idiil ini mendorong Indonesia untuk mempromosikan prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan dalam forum-forum internasional, termasuk melalui keterlibatan dalam PBB dan ASEAN.

Kedua, landasan konstitusional bagi politik luar negeri Indonesia tercantum dalam UUD 1945, khususnya dalam Pembukaan yang menyatakan tujuan kemerdekaan Indonesia untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal-pasal dalam UUD 1945 ini menggarisbawahi bahwa politik luar negeri Indonesia harus diarahkan untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada perdamaian global (Widhiyoga & Harini, 2019). Konstitusi ini memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dan menjaga agar kebijakan tersebut selalu sejalan dengan tujuan nasional, yaitu kesejahteraan rakyat dan stabilitas politik dalam negeri (Rahman, 2013a)

Terakhir, landasan operasional mengacu pada kebijakan dan langkah konkret yang diambil untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia dalam praktiknya. Ini mencakup undang-undang, peraturan, dan pedoman operasional yang diterbitkan oleh pemerintah guna mendukung pelaksanaan diplomasi di berbagai bidang, seperti ekonomi, pertahanan, dan kebudayaan (Widhiyoga & Harini, 2019). Landasan operasional ini juga meliputi pedoman yang diterapkan oleh Kementerian Luar Negeri dan misi diplomatik Indonesia di luar negeri untuk memastikan bahwa politik luar negeri selaras dengan tujuan nasional. Melalui landasan ini, Indonesia dapat beradaptasi dengan dinamika internasional yang terus berubah tanpa meninggalkan prinsip bebas aktif.

Ketiga landasan ini menjadi dasar bagi politik luar negeri Indonesia untuk berperan secara independen dan aktif dalam mempromosikan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian dunia. Dengan landasan ini, politik luar negeri Indonesia dapat mempertahankan fleksibilitas dalam mengelola hubungan internasional, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai nasional dan cita-cita bangsa (Vatikiotis, 1992).

2.5 Tujuan Utama Politik Bebas Aktif

Tujuan utama dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya, tanpa

berpihak pada kekuatan-kekuatan dunia tertentu, sambil tetap aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah-masalah internasional secara damai (WARDHANI & DUGIS, 2023). Doktrin ini bukan merupakan kebijakan netral, melainkan memungkinkan Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara-negara lain demi kepentingan nasional (WARDHANI & DUGIS, 2023; Xue & He, 2022)

Menariknya, implementasi doktrin ini telah bervariasi di bawah presiden-presiden yang berbeda. Misalnya, di era Presiden Joko Widodo, fokusnya lebih pada pendekatan praktis yang memprioritaskan keuntungan domestik dari hubungan luar negeri (WARDHANI & DUGIS, 2023). Sementara itu, di era Orde Baru, fokus politik luar negeri bebas aktif bervariasi di antara para menteri luar negeri, mulai dari penyelesaian masalah warisan pemerintahan sebelumnya hingga isu-isu hukum internasional dan hak asasi manusia (Wardhani & Dharmaputra, 2024).

Secara keseluruhan, politik luar negeri bebas aktif bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional Indonesia sambil tetap berperan aktif dalam urusan internasional. Hal ini terlihat dalam berbagai konteks, mulai dari penanganan konflik regional seperti kasus Rohingya (Rahmat Kartiwa & Zakiah Jalianty, 2023), diplomasi vaksin COVID-19 (Wicaksono et al., 2022), hingga keputusan pengadaan alutsista seperti pesawat tempur Rafale (Taufik Budi Cahyana et al., 2023). Dengan demikian, doktrin ini memungkinkan Indonesia

untuk mempertahankan fleksibilitas dalam politik luar negerinya

2.6 Peran Indonesia di Dunia Internasional dan Pencapaian Tujuan Politik Bebas Aktif

Implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia telah diuji dalam berbagai kasus kontemporer, yang mencerminkan fleksibilitas dan komitmen negara ini untuk menjaga kedaulatan serta berkontribusi pada perdamaian dunia. Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah sikap Indonesia terhadap konflik Laut China Selatan. Indonesia secara tegas mempertahankan klaim kedaulatan di wilayah perairan Natuna yang menjadi bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE)-nya, namun tetap berusaha untuk tidak memihak pada konflik antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN lainnya (Agusman & Fatimah, 2020; Antonia Immaculata Putri Seran et al., 2023). Indonesia berperan aktif dalam memfasilitasi dialog dan mendorong pendekatan damai melalui ASEAN, sembari menjaga netralitasnya untuk menghindari eskalasi konflik di kawasan. Dengan tetap tegas mempertahankan kedaulatan tanpa memihak pada konflik antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia berhasil melindungi kepentingan nasional. Pada saat yang sama, keterlibatan Indonesia dalam memfasilitasi dialog di ASEAN menunjukkan komitmennya terhadap upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Kasus lain yang menunjukkan penerapan politik bebas aktif adalah peran Indonesia dalam isu Palestina. Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina di forum internasional sebagai bagian dari komitmennya terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan penentuan nasib sendiri. Meskipun bersikap kritis terhadap kebijakan Israel, Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara pendukung Palestina dan juga negara-negara Barat. Sikap ini menunjukkan bahwa politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk mendukung isu kemanusiaan dan keadilan tanpa harus terikat oleh blok ideologis tertentu (Mudore, 2019; Saragih, 2019)

Indonesia juga memainkan peran signifikan dalam misi perdamaian PBB sebagai bagian dari komitmen terhadap stabilitas global. Indonesia secara aktif mengirim pasukan dalam berbagai misi PBB di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Partisipasi ini memperlihatkan keterlibatan Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia sambil menjaga independensi politik luar negerinya (Anwar, 2014). Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak hanya berfokus pada kepentingan nasional tetapi juga berkomitmen untuk menjaga perdamaian internasional dengan cara-cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip non-intervensi (Notowidigdo, 1958)

Di bidang ekonomi, politik luar negeri bebas aktif Indonesia juga tercermin dalam inisiatif diplomasi ekonomi

melalui forum-forum seperti G20 dan ASEAN. Indonesia mengambil posisi sebagai penengah dan fasilitator dalam diskusi ekonomi internasional, mempromosikan kerja sama yang adil dan berkelanjutan tanpa keberpihakan pada kekuatan ekonomi tertentu. Contohnya, dalam pertemuan G20, Indonesia sering kali memfasilitasi diskusi tentang pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, sejalan dengan kepentingan domestik serta tujuan global (Luerdi, 2022; WARDHANI & DUGIS, 2023). Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi nasional tetapi juga turut mengarahkan isu-isu global yang relevan dengan kepentingan negara-negara berkembang.

Secara keseluruhan, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia bukan hanya sekadar prinsip yang dianut, tetapi juga terimplementasi dalam kebijakan nyata di berbagai bidang. Fleksibilitas dan komitmen terhadap kedaulatan dan perdamaian dunia yang diwujudkan dalam politik luar negeri bebas aktif telah memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran yang signifikan dalam dinamika global, tanpa mengorbankan independensinya sebagai negara yang berdaulat.

2.7 Kasus-Kasus Kontemporer Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam Kasus Laut China Selatan

Dalam sengketa Laut China Selatan (LCS), Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan menekankan sikap independen yang tidak memihak pada satu blok atau negara tertentu, namun tetap aktif dalam diplomasi untuk menjaga stabilitas regional. Implementasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam sengketa Laut Cina Selatan dapat dilihat dari manuver diplomasi dan upaya kepemimpinan Indonesia.

Indonesia secara konsisten mengambil inisiatif untuk mendorong penyelesaian damai atas sengketa Laut Cina Selatan, dengan memanfaatkan jalur diplomatik formal dan informal. Melalui forum-forum ASEAN, Indonesia telah mengusulkan zero draf dan memimpin pembicaraan menuju agenda-agenda perdamaian (Pedrason et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif untuk berkontribusi pada perdamaian dunia.

Menariknya, meskipun Indonesia telah secara terus-menerus terlibat dalam upaya penyelesaian konflik selama lebih dari dua dekade, dampaknya masih terbatas karena faktor-faktor di luar kendalinya, seperti kompleksitas persaingan dengan kekuatan Cina dan rendahnya tingkat kepercayaan di

antara negara-negara anggota (Aprianto Trianggoro Putro et al., 2023) Hal ini menyoroti tantangan dalam mengimplementasikan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam sengketa regional yang kompleks.

Peran Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan dapat dikategorikan sebagai aktif tetapi dengan dampak yang terbatas (Aprianto Trianggoro Putro et al., 2023). Meskipun telah berhasil mencegah konflik terbuka melalui berbagai kerja sama dan diplomasi, potensi Indonesia sebagai mediator, terutama dalam isu-isu keamanan non-tradisional seperti IUU Fishing, masih kurang dimanfaatkan. Berfokus pada diplomasi keamanan non-tradisional dapat membantu meningkatkan kerja sama di kawasan ini, sejalan dengan tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas (Aprianto Trianggoro Putro et al., 2023)

Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam Kasus Rohingya di ASEAN

Dalam menghadapi isu Rohingya di Myanmar, Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan pendekatan yang mengutamakan netralitas tanpa memihak, namun tetap aktif mendorong penyelesaian konflik dan bantuan kemanusiaan. Meskipun isu Rohingya terutama menyangkut urusan dalam negeri Myanmar, dampak krisis tersebut meluas

hingga melibatkan negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, yang menerima pengungsi Rohingya.

Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam inisiatif diplomatik untuk menangani krisis Rohingya, baik secara bilateral maupun melalui forum multilateral (Komarudin & Ayuningtyas, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan stabilitas regional, dengan menekankan perlindungan hak-hak Rohingya sambil bekerja dalam kerangka kerja ASEAN. Preferensi Indonesia untuk melakukan diplomasi yang tenang dibandingkan dengan menjatuhkan nama dan mempermalukan atau sanksi telah efektif dalam membuka resistensi Myanmar terhadap keterlibatan (Rosyidin, 2020). Strategi ini mencerminkan Pilar 2 dari Tanggung Jawab Melindungi (Responsibility to Protect/RTP), yang menekankan pentingnya kedaulatan yang setara dan peran mitra terpercaya.

Menariknya, pendekatan Indonesia menunjukkan bahwa prinsip non-intervensi ASEAN tidak serta merta meniadakan norma R2P (Rosyidin, 2020). Dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya, Indonesia menunjukkan instrumen alternatif dari Pilar 3 R2P, selain penggunaan kekuatan. Pendekatan bernuansa ini menantang anggapan bahwa intervensi selalu membutuhkan pemaksaan terhadap rezim otoriter.

Implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam krisis Rohingya menunjukkan pendekatan yang

pragmatis dan efektif di ASEAN. Dengan memanfaatkan platform regional untuk mengadvokasi aksi kolektif (Komarudin & Ayuningtyas, 2024) dan menerapkan diplomasi yang tenang (Rosyidin, 2020). Indonesia telah berhasil menyeimbangkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dengan penghormatan terhadap norma-norma non-intervensi dan kedaulatan ASEAN. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kerja sama dan dialog regional dapat menjadi efektif dalam mengatasi tantangan kemanusiaan yang kompleks di Asia Tenggara.

Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam Isu Perubahan Iklim dan Lingkungan

Implementasi politik luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif” dalam isu-isu perubahan iklim dan lingkungan hidup mencerminkan interaksi yang kompleks antara kepentingan nasional, tanggung jawab global, dan strategi diplomatik. Indonesia telah memosisikan diri sebagai pemimpin aktif dalam diplomasi iklim sejak menjadi tuan rumah COP 13 di Bali pada tahun 2007. Pada COP 15 di Kopenhagen, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41% di bawah bisnis seperti biasa pada tahun 2020 (Rahman, 2013b). Hal ini menunjukkan keinginan Indonesia untuk memainkan peran penting di panggung global terkait isu iklim. Namun, motivasi di balik kebijakan ini memiliki banyak sisi, yang berasal dari logika konsekuensialitas (mencari otonomi, pengaruh, dan keuntungan ekonomi) dan logika kepantasan

(menjaga reputasi sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab) (Rahman, 2013b)

Menariknya, pendekatan Indonesia memiliki beberapa kesamaan dengan diplomasi iklim India. Kedua negara tersebut telah mendorong aksi internasional yang mendesak sembari tetap berhati-hati dalam membatasi emisi mereka sendiri, sehingga menciptakan kontradiksi yang nyata dalam wacana diplomatik mereka (Pathak & Parris, 2021). Hal ini mencerminkan tindakan penyeimbangan yang kompleks yang dihadapi negara-negara berkembang antara tanggung jawab lingkungan dan prioritas pembangunan ekonomi.

Sebagai kesimpulan, implementasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam isu iklim dan lingkungan menunjukkan pendekatan yang berbeda. Selain mengambil peran kepemimpinan dalam kerja sama lingkungan regional dan membuat komitmen global yang ambisius, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam implementasi di dalam negeri karena adanya hambatan sosial, ekonomi, dan budaya (Wicaksana, 2015). Diplomasi energi Indonesia, yang sangat penting untuk mengatasi masalah ekonomi dan lingkungan, masih kurang koordinasi di seluruh lembaga pemerintah (Wuryandari, 2017b)

2.8 Kesimpulan

Implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini telah berhasil menjaga

independensi Indonesia sambil berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas global. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memilih untuk tidak terikat pada blok kekuatan manapun, yang tercermin dalam politik luar negeri yang netral namun tetap aktif dalam diplomasi internasional. Kebijakan bebas aktif ini bukan hanya sebuah strategi bertahan, tetapi juga mencerminkan aspirasi Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia, dengan menghindari konflik ideologis sambil menjaga kedaulatan nasional.

Dalam beberapa kasus kontemporer, seperti sengketa Laut China Selatan, krisis Rohingya, dan isu perubahan iklim, Indonesia telah berhasil mengimplementasikan politik luar negeri bebas aktif dengan cara yang fleksibel dan pragmatis. Dalam sengketa Laut China Selatan, Indonesia menekankan pentingnya diplomasi dan penyelesaian damai sambil mempertahankan klaim kedaulatannya tanpa terlibat dalam konflik antara kekuatan besar. Di kasus Rohingya, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam mendukung penyelesaian kemanusiaan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip non-intervensi, yang menonjolkan kemampuan Indonesia untuk mengelola isu-isu regional dengan sikap diplomatik yang tenang namun efektif.

Penerapan politik luar negeri bebas aktif Indonesia juga terlihat dalam bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim, di mana Indonesia berperan aktif dalam diplomasi iklim internasional, meskipun menghadapi tantangan dalam

implementasi domestiknya. Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan memainkan peran penting dalam forum-forum internasional seperti COP menunjukkan betapa politik luar negeri bebas aktif dapat mendorong Indonesia untuk berkontribusi pada isu global yang penting tanpa mengorbankan kepentingan domestik. Secara keseluruhan, politik luar negeri bebas aktif Indonesia berhasil menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kontribusi internasional dalam menjaga kedamaian dan pembangunan global.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa faktor utama yang melatarbelakangi perumusan kebijakan politik luar negeri bebas aktif oleh Indonesia, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kedaulatan nasional?
2. Bagaimana prinsip bebas aktif membantu Indonesia menavigasi ketegangan antara blok Barat dan blok Timur pada era Perang Dingin?
3. Apa peran dan dampak Konferensi Asia-Afrika 1955 terhadap politik luar negeri bebas aktif Indonesia? Bagaimana konferensi ini memperkuat solidaritas negara-negara berkembang?
4. Dalam konteks kontemporer, bagaimana politik luar negeri bebas aktif mendukung Indonesia dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan?

5. Apa saja landasan utama politik luar negeri Indonesia, dan bagaimana landasan idiil, konstitusional, dan operasional tersebut memengaruhi politik luar negeri?
6. Mengapa Indonesia memilih untuk tetap netral dalam konflik ideologis internasional, dan bagaimana kebijakan bebas aktif mendukung fleksibilitas hubungan diplomatik?
7. Bagaimana Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif dalam isu-isu kemanusiaan, seperti krisis Rohingya di Myanmar?
8. Bagaimana peran Indonesia dalam misi perdamaian PBB merefleksikan prinsip bebas aktif, dan apa dampaknya terhadap reputasi internasional Indonesia?
9. Bagaimana politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya global mengatasi perubahan iklim dan lingkungan tanpa terikat pada blok politik tertentu?
10. Apa tujuan utama politik bebas aktif Indonesia, dan bagaimana kebijakan ini berperan dalam melindungi serta memajukan kepentingan nasional Indonesia di kancah global?

Glosarium

Politik Luar Negeri Bebas Aktif - Prinsip politik luar negeri Indonesia yang menekankan independensi tanpa memihak blok kekuatan global tertentu, tetapi tetap

aktif berperan dalam perdamaian dunia dan menjalin hubungan internasional yang fleksibel.

Perang Dingin - Periode ketegangan ideologis dan politik global antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet setelah Perang Dunia II, yang berdampak pada dinamika hubungan internasional Indonesia.

Konferensi Asia-Afrika 1955 - Pertemuan bersejarah di Bandung yang mengumpulkan negara-negara Asia dan Afrika untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama dalam melawan kolonialisme dan imperialisme, sekaligus menjadi simbol awal politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Netralitas - Sikap politik Indonesia yang tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, terutama selama Perang Dingin, untuk menghindari keterikatan ideologis dan mempertahankan kedaulatan negara.

Fleksibilitas Diplomatik - Kemampuan Indonesia untuk menjalin hubungan internasional dengan berbagai negara sesuai dengan kepentingan nasional tanpa keterikatan pada aliansi atau blok politik tertentu.

Landasan Idiil - Nilai-nilai yang berasal dari Pancasila, yang menjadi panduan moral dan filosofi politik luar negeri Indonesia, termasuk prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian dunia.

Landasan Konstitusional - Dasar hukum politik luar negeri Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, khususnya dalam Pembukaan, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia dan kedaulatan nasional.

Landasan Operasional - Kebijakan, peraturan, dan pedoman praktis yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan politik luar negeri, seperti diplomasi ekonomi, keamanan, dan kebudayaan.

Deklarasi Bandung - Hasil utama Konferensi Asia-Afrika 1955 yang berisi komitmen negara-negara peserta untuk tidak terlibat dalam konflik antara blok Barat dan Timur dan untuk saling mendukung dalam pembangunan dan kemerdekaan.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) - Wilayah laut di luar batas laut teritorial yang diakui oleh hukum internasional di mana negara berdaulat memiliki hak eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk wilayah Natuna yang diklaim dalam sengketa Laut China Selatan.

Misi Perdamaian PBB - Program PBB di mana Indonesia berkontribusi melalui pengiriman pasukan untuk menjaga stabilitas dan mendukung perdamaian di wilayah-wilayah konflik sebagai bagian dari prinsip bebas aktif.

Diplomasi Ekonomi - Upaya Indonesia untuk menjalin hubungan perdagangan dan investasi internasional guna

mendukung pembangunan ekonomi domestik, tanpa keterikatan pada blok kekuatan tertentu.

Paris Agreement - Kesepakatan internasional untuk menanggulangi perubahan iklim, di mana Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon sebagai bagian dari kontribusi terhadap lingkungan global.

REDD+ - Program internasional yang bertujuan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, yang diikuti Indonesia dalam upaya penanggulangan perubahan iklim.

BAB 3**PERIODESASI POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA****3.1 Pengantar**

Bagian ini mengupas sejarah dan perkembangan politik luar negeri Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era kontemporer, dengan fokus pada prinsip bebas aktif yang menjadi landasan utama kebijakan diplomasi Indonesia. Pembahasan mencakup latar belakang perumusan politik luar negeri, penerapannya dalam berbagai era pemerintahan, hingga kontribusi Indonesia di kancah internasional. Dengan menelaah hubungan antara konteks sejarah, tantangan domestik, dan dinamika global, pembaca akan memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang evolusi kebijakan luar negeri Indonesia.

Capaian Pembelajaran dari bab ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang prinsip-prinsip politik luar negeri bebas aktif, karakteristik kebijakan pada berbagai era pemerintahan, serta analisis penerapan kebijakan ini dalam konteks hubungan internasional. Pembaca diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan prinsip bebas aktif, serta menganalisis relevansi kebijakan ini dalam berbagai isu global, seperti perdamaian, ekonomi, dan lingkungan.

Relevansi bab ini sangat penting dalam mendukung perkembangan keilmuan Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia

mencerminkan kedaulatan dan aspirasi nasional dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, pembahasan ini mendukung pengembangan kompetensi lulusan untuk berkontribusi di dunia kerja, baik sebagai diplomat, analis kebijakan, maupun profesional di organisasi internasional yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang strategi diplomasi dan politik luar negeri.

3.2 Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia

Sejarah perumusan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif lahir dari dinamika politik global dan tantangan domestik yang dihadapi negara ini sejak awal kemerdekaannya. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia berada dalam situasi internasional yang sulit, di mana Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membagi dunia menjadi dua blok utama. Indonesia, sebagai negara yang baru merdeka dan berusaha untuk mengonsolidasi kedaulatannya, harus menavigasi tekanan dari kedua kekuatan besar tersebut. Dalam pidatonya yang terkenal, *Mendayung di Antara Dua Karang*, Mohammad Hatta pada tahun 1948 menegaskan pentingnya Indonesia tidak memihak blok manapun, tetapi tetap aktif terlibat dalam menjaga perdamaian dunia dan mempromosikan kepentingan nasionalnya (Kusno, 2014)

Konferensi Asia-Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955 menjadi salah satu tonggak sejarah dalam pengembangan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Konferensi ini mengumpulkan negara-negara berkembang dari Asia dan Afrika yang baru merdeka atau sedang berjuang melawan kolonialisme. Melalui konferensi ini, Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk solidaritas di antara negara-negara tersebut dan menegaskan posisinya sebagai pemimpin negara-negara yang tidak memihak salah satu blok kekuatan besar dunia (Bennouna, 2019) Selain itu, konferensi ini juga memperkuat komitmen Indonesia terhadap prinsip bebas aktif, di mana negara ini tidak hanya berusaha menjaga kemerdekaannya, tetapi juga aktif berkontribusi dalam diplomasi internasional.

Latar belakang domestik juga turut mempengaruhi perumusan politik luar negeri bebas aktif. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman internal dari pemberontakan dan ketidakstabilan politik, serta tantangan dalam pembangunan ekonomi. Prinsip bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk membangun kerjasama dengan berbagai negara tanpa terikat pada ideologi tertentu, sehingga dapat memperoleh dukungan internasional yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan stabilitas politik (WARDHANI & DUGIS, 2023; Xue & He, 2022)

Prinsip bebas aktif terus diadaptasi oleh setiap pemerintahan dengan penyesuaian yang disesuaikan dengan perkembangan global dan tantangan domestik. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dari prinsip bebas aktif, di mana prinsip ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasional yang

berubah, baik dari segi keamanan maupun pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, esensi dari prinsip ini adalah untuk tetap bebas dari keterikatan ideologis dan aktif dalam diplomasi internasional. Prinsip tersebut tetap menjadi fondasi dari kebijakan luar negeri Indonesia hingga saat ini.

3.3 Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Orde Lama 1959-1965

Sebagai landasan utama politik luar negeri Indonesia, prinsip Bebas Aktif ini terus diterapkan oleh berbagai pemerintahan, mulai dari era Presiden Sukarno hingga pemerintahan Joko Widodo. Di bawah masing-masing pemerintahan, prinsip ini mengalami penafsiran dan penyesuaian sesuai dengan konteks global dan domestik yang dihadapi.

Kebijakan luar negeri Indonesia pada era Orde Lama, khususnya antara tahun 1959 hingga 1965, sangat dipengaruhi oleh visi Presiden Sukarno yang menekankan semangat revolusioner dan anti-imperialisme. Setelah mendeklarasikan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959, Sukarno semakin memperkuat politik luar negeri Indonesia yang cenderung radikal dan konfrontatif, terutama terhadap kekuatan-kekuatan Barat. Pada periode ini, Sukarno semakin memosisikan Indonesia sebagai pemimpin negara-negara Dunia Ketiga dan menguatkan hubungannya dengan negara-negara Blok Timur, termasuk Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok, sebagai

respons terhadap kebijakan Barat yang dianggapnya sebagai bentuk neokolonialisme (Połosak, 2020; Utomo, 2017)

Salah satu kebijakan luar negeri yang menonjol pada masa ini adalah pembentukan Poros Jakarta-Peking, sebuah aliansi strategis antara Indonesia dan Tiongkok yang bertujuan menantang dominasi kekuatan Barat di Asia Tenggara (Utomo, 2017). Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam gerakan Non-Blok dan aktif dalam mempromosikan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika melalui Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Namun, pada periode 1959-1965, Sukarno mulai memposisikan Indonesia lebih dekat dengan Blok Timur, terutama karena ketidakpuasannya terhadap dukungan minimal yang diterima dari negara-negara Barat dalam isu Papua Barat (Pauker, 1962)

Salah satu puncak dari kebijakan luar negeri konfrontasional ini adalah Konfrontasi dengan Malaysia (1963-1965). Sukarno memandang pembentukan Federasi Malaysia sebagai upaya neokolonialis Inggris untuk menghalangi ambisinya dalam menyatukan kawasan Nusantara di bawah Indonesia. Konflik ini menggambarkan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia di era tersebut semakin berfokus pada konfrontasi dan penggunaan kekuatan militer untuk mendukung tujuan-tujuan nasionalis yang revolusioner (Holt, 2014)

Kebijakan luar negeri Sukarno pada periode ini juga ditandai dengan retorika keras melawan imperialisme Barat, sebagaimana terlihat dalam slogan "Ganyang Malaysia" dan

kritik keras terhadap PBB, yang dianggapnya sebagai alat negara-negara besar. Pada tahun 1965, Indonesia bahkan menarik diri dari PBB sebagai bentuk protes terhadap penerimaan Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB (Weinstein, 1971). Kebijakan luar negeri ini pada akhirnya berujung pada isolasi Indonesia dari komunitas internasional dan memperburuk krisis ekonomi domestik yang dihadapi negara tersebut.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa fokus dan pendekatan dalam penerapan politik luar negeri Indonesia pada Era Orde Lama (1959-1965) meliputi tiga poin utama. Pertama, anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Dalam periode penerapan politik luar negeri Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Soekarno menekankan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Indonesia berusaha untuk menjadi pemimpin di antara negara-negara non-blok dan mengadvokasi kemerdekaan bagi negara-negara yang masih terjajah (Sapanti, 2018). Kedua, Poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Di tengah Perang Dingin, Soekarno memilih beraliansi dengan negara-negara komunis dan negara-negara yang tidak terikat blok besar seperti China dan Korea Utara (Yeremia & Arif, 2022). Ketiga, Konfrontasi dengan Malaysia. Soekarno melancarkan kebijakan konfrontatif terhadap pembentukan Federasi Malaysia, yang dianggap sebagai proyek neo-kolonialisme Inggris (Holt, 2014).

3.4 Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Orde Baru 1966-1998

Kebijakan luar negeri Indonesia pada era Orde Baru (1966–1998) mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan luar negeri berorientasi pada stabilitas domestik dan pembangunan ekonomi, yang berbeda dari pendekatan revolusioner dan konfrontasional pada era Sukarno. Prinsip bebas aktif tetap menjadi landasan utama, tetapi dengan penekanan lebih besar pada pendekatan pragmatis dan diplomasi yang mengutamakan hubungan baik dengan negara-negara besar dan lembaga internasional (Mochamad Yani, 2009; Vatikiotis, 1992). Setelah insiden politik yang menandai jatuhnya Sukarno, pemerintah Soeharto bergerak untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, serta dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, termasuk memperkuat ASEAN (Mochamad Yani, 2009a; Smith, 2023)

Fokus utama kebijakan luar negeri pada era ini adalah stabilitas regional dan peningkatan investasi asing. Dengan memanfaatkan hubungan baik dengan negara-negara Barat dan Jepang, Indonesia berhasil menarik investasi besar dalam sektor minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya, yang menopang pembangunan ekonomi dalam negeri. Peran aktif Indonesia dalam ASEAN juga menjadi sorotan penting, di mana Soeharto mendorong pembentukan berbagai inisiatif kerja sama ekonomi

dan keamanan regional untuk memperkuat posisi Indonesia di Asia Tenggara (Anwar, 2020; Roberts & Widyaningsih, 2015). Pada tahun 1976, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali, yang memperkuat komitmen negara-negara anggota untuk stabilitas regional (Anwar, 2020).

Indonesia juga menjalin hubungan diplomatik yang lebih seimbang dengan kedua blok besar, termasuk dengan Uni Soviet dan China, meskipun tetap menjaga posisi kuat dalam blok Barat. Dinamika ini tampak dalam hubungan yang lebih terbuka dengan negara-negara komunis di Asia setelah pengakuan atas RRC pada 1990 (Leifer, 1977). Namun, kebijakan luar negeri Indonesia sering dipengaruhi oleh kebutuhan stabilitas politik dalam negeri, termasuk dalam meredam potensi ancaman dari kelompok komunis dan menjaga keamanan nasional, terutama setelah peristiwa G30S/PKI.

Soeharto juga menerapkan kebijakan luar negeri yang berhati-hati dalam isu-isu internasional lainnya. Dalam konflik internasional seperti Perang Vietnam, Indonesia mengadopsi pendekatan non-intervensi dan berusaha mendorong penyelesaian damai. Pada masa ini, Indonesia menempatkan diri sebagai juru damai dan mendorong penyelesaian damai untuk berbagai konflik di kawasan Asia Tenggara (Storey, 2000).

Namun, salah satu tantangan besar bagi kebijakan luar negeri Orde Baru adalah masalah Timor Timur. Invasi Indonesia ke wilayah ini pada tahun 1975 dan aneksasinya pada tahun

1976 menimbulkan kecaman internasional, terutama dari negara-negara Barat dan PBB. Meskipun pemerintah Soeharto mempertahankan posisi bahwa Timor Timur adalah bagian dari Indonesia, tekanan internasional terus berlanjut hingga akhir pemerintahan Soeharto (Cotton, 2001).

Pada bagian ini dapat dijelaskan bahwa fokus dan pendekatan dalam penerapan politik luar negeri Indonesia pada Era Orde Lama (1959-1965) meliputi tiga poin utama. Pertama, normalisasi hubungan dengan negara Barat. Di bawah Presiden Soeharto, Indonesia mengubah orientasi kebijakan luar negeri menjadi lebih pro-Barat, khususnya dalam rangka mendapatkan dukungan ekonomi dan politik dari negara-negara Barat Kedua, pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN pada 1967, dengan tujuan menciptakan stabilitas regional dan mempererat hubungan antarnegara Asia Tenggara (CHIA, 2011) Ketiga, kebijakan pragmatik dan stabilitas regional. Soeharto menekankan pragmatisme dalam kebijakan luar negeri, dengan fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Hubungan dengan negara-negara besar dijaga seimbang tanpa bersikap konfrontatif (Mochamad Yani, 2009b)

3.5 Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era 1998-2004

Pada era 1998-2004, kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan besar setelah runtuhnya Orde Baru dan transisi menuju era Reformasi. Krisis ekonomi 1997 yang melanda Asia, termasuk Indonesia, memicu perubahan politik

yang mendalam di dalam negeri, yang pada akhirnya mengarah pada pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie, dan kemudian oleh Abdurrahman Wahid serta Megawati Soekarnoputri, menekankan pentingnya reformasi politik, ekonomi, dan hubungan luar negeri yang lebih transparan dan demokratis (Ramstedt, 2013)

Salah satu fokus utama kebijakan luar negeri selama periode ini adalah memperbaiki citra Indonesia di mata internasional, yang sempat tercoreng akibat pelanggaran hak asasi manusia selama pendudukan Timor Timur. Di bawah pemerintahan Habibie, Indonesia mengadakan referendum di Timor Timur pada tahun 1999, yang menghasilkan keputusan untuk merdeka dari Indonesia. Keputusan ini, meskipun membawa pujian internasional, juga menciptakan tantangan besar dalam hubungan diplomatik Indonesia, terutama terkait stabilitas politik domestik dan hubungan dengan komunitas internasional (Lundry, 2022)

Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih pluralis, di mana Indonesia memperkuat hubungan diplomatik dengan berbagai negara, termasuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Muslim. Wahid juga dikenal karena upayanya mempererat hubungan dengan Israel, meskipun inisiatif ini tidak mendapat dukungan luas di dalam negeri (Yegar, 2006) Selama masa kepemimpinannya, Wahid juga berusaha

memulihkan peran aktif Indonesia dalam ASEAN, setelah ketidakstabilan di Timor Timur sempat mempengaruhi posisi Indonesia di kawasan (Southgate, 2019)

Pada era Megawati (2001-2004), kebijakan luar negeri Indonesia menjadi lebih terfokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Megawati berusaha memperbaiki hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan China, yang sangat penting untuk investasi dan dukungan ekonomi. Pada saat yang sama, Megawati memperkuat peran Indonesia di ASEAN dan forum-forum internasional lainnya, meskipun kebijakan luar negeri Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh isu-isu domestik seperti pemberantasan terorisme setelah serangan bom Bali pada 2002 (Weatherbee, 2005). Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Indonesia pada era 1998-2004 ditandai oleh upaya untuk menyeimbangkan reformasi domestik dengan kebutuhan untuk memperbaiki citra internasional, sambil tetap mempertahankan prinsip bebas aktif yang sudah menjadi dasar kebijakan luar negeri sejak era kemerdekaan.

Setidaknya dapat dicatat tiga poin utama penerapan politik luar negeri bebas aktif pada masa ini. Pertama, reformasi dan demokratisasi. Setelah jatuhnya Soeharto, kebijakan luar negeri Indonesia beralih untuk mendukung demokratisasi dan reformasi internal. Hubungan diplomatik diarahkan untuk memperbaiki citra internasional yang rusak akibat krisis ekonomi dan pelanggaran HAM (Mochamad Yani, 2009b).

Kedua, peningkatan peran dalam organisasi internasional. Pada masa BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid, Indonesia mulai memperluas perannya di organisasi internasional, termasuk di PBB, untuk memulihkan status globalnya (Boediono, 2002)

Ketiga, diplomasi ekonomi dan penyelesaian konflik internal. Fokus pada diplomasi ekonomi untuk pemulihan dari krisis ekonomi, dan diplomasi digunakan untuk menyelesaikan konflik internal seperti di Aceh (Vatikiotis, 1992b)

3.6 Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era SBY 2004-2016

Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004 hingga 2016, kebijakan luar negeri Indonesia ditandai oleh peningkatan peran aktif Indonesia di kancah internasional serta penerapan prinsip diplomasi yang lebih kooperatif. SBY mengedepankan pendekatan "Million Friends and Zero Enemies," yang bertujuan memperkuat hubungan dengan sebanyak mungkin negara tanpa menciptakan musuh. Hal ini merefleksikan perubahan yang signifikan dari pendekatan sebelumnya yang lebih konfrontatif pada masa lalu, menjadi lebih moderat dan diplomatis dalam menghadapi tantangan global (Songbatumis, 2021)

Salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri SBY adalah meningkatkan peran Indonesia di organisasi regional dan multilateral. Indonesia berperan aktif dalam ASEAN, terutama dalam mendorong pembentukan Komunitas ASEAN

pada 2015 yang mencakup kerjasama ekonomi, politik-keamanan, dan sosial-budaya (Caballero-Anthony, 2016). Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah KTT Asia-Afrika 2005 yang memperingati 50 tahun Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Dalam pertemuan ini, Indonesia memperkuat komitmennya pada solidaritas negara-negara berkembang dan kerja sama Selatan-Selatan (Antoinette BURTON, 2018)

Di sisi lain, Indonesia juga mengambil peran penting dalam forum global seperti G-20, terutama setelah krisis keuangan global 2008. Keikutsertaan Indonesia dalam G-20 mencerminkan peningkatan status Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang berkembang di dunia. SBY memanfaatkan platform ini untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dan memastikan bahwa pemulihan ekonomi global bersifat inklusif (Saputra & Hapzi Ali, 2021)

Selain itu, di bawah SBY, Indonesia juga meningkatkan perannya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik internasional. Misalnya, Indonesia berperan penting dalam proses perdamaian di Filipina antara pemerintah dan kelompok pemberontak Moro. Peran diplomasi ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional (Alunaza SD & Anggara, 2018) Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam isu-isu seperti hubungan dengan Australia, yang beberapa kali tegang akibat masalah imigrasi ilegal dan penyadapan. Meskipun demikian, SBY

berhasil menjaga stabilitas hubungan bilateral dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang melalui pendekatan diplomasi yang hati-hati (Inayati, 2016)

Dapat digarisbawahi beberapa poin penting yang dapat dipahami dalam penerapan politik luar negeri Bebas Aktif pada era pemerintahan presiden SBY. Pertama, Diplomasi Multilateral: "Million Friends, Zero Enemies". Presiden SBY mengedepankan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada diplomasi multilateral, memperluas hubungan dengan banyak negara tanpa menciptakan musuh (Rosyidin, 2016). Kedua, peran aktif di ASEAN dan G20. Indonesia menjadi lebih aktif di forum internasional seperti ASEAN dan G20, dan mengadvokasi kepentingan negara berkembang dalam forum ekonomi global (Inayati, 2016) Ketiga, mediator konflik regional. Indonesia berperan sebagai mediator dalam berbagai konflik regional, seperti dalam penyelesaian konflik Moro di Filipina (Alunaza SD & Anggara, 2018)

3.7 Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Jokowi 2016-2024

Pada era Joko Widodo (Jokowi), kebijakan luar negeri Indonesia dari 2016 hingga 2024 mengalami perubahan fokus yang lebih pragmatis dengan penekanan pada diplomasi ekonomi dan penguatan kerja sama regional. Jokowi memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam negeri sebagai fondasi untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia

internasional. Hal ini terlihat dalam visinya yang dikenal dengan "Poros Maritim Dunia," di mana Indonesia berusaha untuk menjadi kekuatan maritim regional dan global yang penting, dengan fokus pada keamanan maritim, diplomasi maritim, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan dan industri perkapalan (Aufiya, 2017)

Dalam kerangka diplomasi ekonomi, Jokowi memperluas hubungan perdagangan dan investasi, terutama dengan negara-negara besar seperti China, Jepang, dan Uni Eropa. Indonesia juga semakin aktif dalam kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN serta mempererat hubungan dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Peningkatan hubungan ekonomi dengan China, misalnya, tampak dalam proyek strategis seperti pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang merupakan bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China (Muhammad Farhan et al., 2023). Namun, hubungan ini juga menimbulkan tantangan, terutama terkait isu kedaulatan di Laut China Selatan, di mana Indonesia mengambil sikap tegas dalam mempertahankan wilayah Natuna dari klaim sepihak China.

Di samping itu, Jokowi juga memperkuat diplomasi multilateral Indonesia. Indonesia aktif di Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap pada periode 2019-2020, di mana Indonesia memainkan peran penting dalam isu-isu perdamaian dan keamanan global, termasuk mendorong penyelesaian konflik di Palestina dan Afghanistan (Farizan & Heryadi, 2021;

Samad et al., 2023) Pendekatan pragmatis Jokowi juga tampak dalam respons Indonesia terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, di mana Indonesia berkomitmen pada Paris Agreement dan upaya pengurangan emisi karbon melalui inisiatif seperti REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) (Daryanti & Charnade, 2022)

Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Jokowi mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara prioritas domestik, seperti pembangunan ekonomi dan kedaulatan maritim, dengan peran aktif di arena internasional dan multilateral. Jokowi mengadopsi pendekatan pragmatis yang berfokus pada keuntungan nyata bagi pembangunan nasional, sambil tetap mempertahankan prinsip bebas aktif yang telah menjadi ciri khas kebijakan luar negeri Indonesia sejak era kemerdekaan.

Adapun fokus utama penerapan politik luar negeri Bebas Aktif pada masa pemerintahan Joko Widodo dapat dilihat pada beberapa poin utama. Pertama, berfokus pada Diplomasi Ekonomi. Presiden Jokowi mengalihkan fokus kebijakan luar negeri ke diplomasi ekonomi, dengan tujuan meningkatkan perdagangan dan investasi untuk mendukung pembangunan nasional (Connelly, 2020). Kedua, Poros Maritim Dunia. Jokowi memperkenalkan konsep Poros Maritim Dunia, yang menekankan peran Indonesia dalam menjaga stabilitas maritim di kawasan dan meningkatkan kerja sama di sektor maritim, terutama di Laut China Selatan (Heiduk, 2020). Ketiga,

pendekatan pragmatik terhadap negara besar. Jokowi menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, tanpa terikat pada satu blok atau aliansi tertentu (Sukma, 2019).

3.8 Kesimpulan

Sejarah politik luar negeri Indonesia menunjukkan evolusi yang dinamis, dimulai dari perumusan prinsip bebas aktif yang diilhami oleh tantangan geopolitik global dan situasi domestik setelah kemerdekaan. Prinsip bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk menjaga kedaulatan tanpa berpihak pada salah satu blok kekuatan besar selama Perang Dingin, sekaligus aktif dalam mendorong perdamaian dan kerjasama internasional. Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 menjadi salah satu tonggak sejarah yang menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin negara-negara Dunia Ketiga yang tidak memihak blok ideologi manapun.

Pada setiap era pemerintahan, politik luar negeri bebas aktif mengalami penyesuaian sesuai dengan dinamika domestik dan internasional. Di bawah Sukarno, kebijakan ini berfokus pada anti-imperialisme dan konfrontasi dengan Barat, sedangkan pada era Soeharto, orientasi kebijakan bergeser menjadi lebih pragmatis dengan penekanan pada stabilitas domestik dan pembangunan ekonomi. Reformasi pasca-1998 membawa perubahan besar dalam kebijakan luar negeri, dengan penekanan pada demokratisasi dan perbaikan citra

internasional. Era Susilo Bambang Yudhoyono menandai peningkatan peran Indonesia di kancah multilateral melalui pendekatan diplomasi "Million Friends, Zero Enemies," sementara era Jokowi menekankan diplomasi ekonomi dan visi Poros Maritim Dunia.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif telah berfungsi sebagai alat untuk menavigasi tantangan global dan memajukan kepentingan nasional. Kebijakan ini memungkinkan fleksibilitas dalam hubungan internasional, menjaga keseimbangan antara prioritas domestik dan kontribusi global. Dalam konteks modern, politik luar negeri Indonesia terus relevan untuk menghadapi isu-isu global seperti perdamaian, perdagangan, perubahan iklim, dan keamanan maritim, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting di panggung internasional.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa latar belakang terbentuknya prinsip *bebas aktif* dalam politik luar negeri Indonesia, dan bagaimana prinsip ini membantu Indonesia menghadapi tekanan global sejak awal kemerdekaan?
2. Bagaimana Indonesia memanfaatkan Konferensi Asia-Afrika 1955 untuk memperkuat posisinya di dunia internasional? Apa dampak jangka panjang konferensi tersebut terhadap hubungan antarnegara berkembang?

3. Mengapa Presiden Soekarno memilih pendekatan konfrontatif dan aliansi dengan Blok Timur selama periode Orde Lama? Apa dampaknya terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat?
4. Bagaimana perubahan dalam politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru mencerminkan prioritas stabilitas domestik dan pembangunan ekonomi?
5. Apa peran Indonesia dalam pembentukan dan perkembangan ASEAN, dan bagaimana kontribusinya mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara?
6. Bagaimana krisis ekonomi Asia 1997 mempengaruhi politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam hal reformasi dan demokratisasi di era pasca-Soeharto?
7. Mengapa isu Timor Timur menjadi tantangan besar dalam politik luar negeri Indonesia, dan apa dampak peristiwa ini terhadap reputasi internasional Indonesia?
8. Apa yang dimaksud dengan pendekatan diplomasi “Million Friends and Zero Enemies” oleh Presiden SBY, dan seberapa efektif pendekatan ini dalam meningkatkan hubungan internasional Indonesia?
9. Bagaimana visi *Poros Maritim Dunia* yang diperkenalkan oleh Presiden Jokowi mencerminkan pergeseran fokus politik luar negeri Indonesia ke arah diplomasi ekonomi dan keamanan maritim?
10. Bagaimana posisi Indonesia dalam komitmen perubahan iklim seperti *Paris Agreement* dan REDD+, dan apa saja

tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan ini?

Glosarium

Politik Luar Negeri Bebas Aktif - Prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok mana pun, namun aktif terlibat dalam menjaga perdamaian dunia dan mempromosikan kepentingan nasional.

Konferensi Asia-Afrika (1955) - Pertemuan bersejarah di Bandung yang mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika dalam upaya melawan kolonialisme dan memperkuat solidaritas antarbangsa.

Orde Lama (1959-1965) - Era kepemimpinan Presiden Soekarno yang ditandai dengan politik luar negeri radikal dan konfrontatif, termasuk gerakan anti-imperialisme dan konfrontasi dengan Malaysia.

Poros Jakarta-Peking - Aliansi strategis antara Indonesia dan Tiongkok yang dibentuk oleh Soekarno untuk melawan dominasi Barat di Asia Tenggara.

Orde Baru (1966-1998) - Periode pemerintahan Presiden Soeharto yang mengedepankan stabilitas domestik dan pembangunan ekonomi dengan pendekatan pragmatis dalam politik luar negeri.

ASEAN - Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1967, dengan Indonesia sebagai salah satu

pendiri, untuk memperkuat stabilitas regional dan kerjasama ekonomi.

Krisis Ekonomi Asia 1997 - Krisis keuangan yang melanda negara-negara Asia, termasuk Indonesia, yang berdampak besar pada kondisi ekonomi dan politik domestik.

Timor Timur - Wilayah yang diinvasi dan dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1975, namun kemudian merdeka melalui referendum pada tahun 1999.

Era Reformasi (1998-2004) - Masa transisi setelah jatuhnya Orde Baru yang ditandai dengan reformasi politik dan ekonomi serta upaya memperbaiki citra Indonesia di dunia internasional.

Diplomasi Multilateral - Pendekatan politik luar negeri yang melibatkan kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional, seperti ASEAN dan G20.G-20 - Forum internasional yang terdiri dari negara-negara ekonomi besar, di mana Indonesia berperan aktif dalam membahas isu-isu global, terutama setelah krisis keuangan global 2008.

Poros Maritim Dunia - Konsep yang diperkenalkan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim regional dan global dengan penekanan pada keamanan dan diplomasi maritim.

Paris Agreement - Perjanjian internasional untuk mengurangi emisi karbon sebagai bagian dari upaya global mengatasi perubahan iklim, yang didukung Indonesia.

REDD+ - Program untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang diadopsi oleh Indonesia sebagai bagian dari komitmen terhadap perubahan iklim.

BAB 4**POLITIK LUAR NEGERI
INDONESIA: ANALISIS PERAN
INDIVIDU****4.1 Pengantar**

Pada bagian ini akan mendiskusikan mengenai peran kepemimpinan dalam politik luar negeri Indonesia, dengan fokus pada pengaruh karakteristik pribadi dan gaya kepemimpinan pemimpin terhadap pengambilan keputusan dalam hubungan internasional. Di dalamnya, akan diuraikan bagaimana faktor-faktor seperti kepribadian pemimpin, gaya kepemimpinan, minat pribadi, serta respons terhadap situasi krisis dan ketidakpastian dapat memengaruhi arah politik luar negeri Indonesia. Bab ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika politik luar negeri Indonesia, serta bagaimana pemimpin negara memainkan peran kunci dalam membentuk arah diplomasi dan hubungan internasional.

Capaian pembelajaran dari bab ini mencakup kemampuan mahasiswa untuk memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi politik luar negeri, serta menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan tertentu mempengaruhi keputusan politik luar negeri Indonesia. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengaitkan teori kepemimpinan dengan praktik diplomasi dan politik luar negeri yang ada dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, bab ini

diharapkan dapat memberikan kompetensi dalam menganalisis dinamika politik internasional dan politik luar negeri dari sudut pandang kepemimpinan.

Relevansi bab ini sangat penting dalam mendukung perkembangan keilmuan dan kompetensi lulusan, terutama bagi mereka yang ingin berkarir di bidang diplomasi, politik luar negeri, atau hubungan internasional. Kemampuan untuk memahami pengaruh gaya kepemimpinan terhadap politik luar negeri akan memberikan wawasan yang lebih luas dalam menghadapi tantangan global dan krisis internasional. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menekankan pengembangan keterampilan analitis dan aplikasi konsep-konsep teori hubungan internasional dalam konteks dunia kerja. Dalam dunia kerja, terutama di sektor pemerintahan, lembaga internasional, atau perusahaan multinasional, pemahaman ini sangat relevan untuk mengelola hubungan antarnegara dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat global.

4.2 Tingkat Analisis Individu

Dalam studi politik luar negeri, level analisis adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan negara dalam konteks internasional. Setiap level analisis menyoroti faktor spesifik yang dapat mempengaruhi politik luar negeri, mulai dari level individu hingga level sistem internasional. Pada level

individu, fokus ditempatkan pada karakteristik pribadi dan psikologis pemimpin, seperti persepsi dan gaya kepemimpinan, yang dapat berdampak signifikan terhadap keputusan dalam politik luar negeri (Hudson, 2013). Level ini sering kali digunakan untuk menjelaskan variasi dalam kebijakan yang dipicu oleh persepsi dan kepribadian pemimpin dalam situasi krisis. Pada level kelompok atau organisasi, analisis menyoroti dinamika kelompok dan birokrasi, termasuk pengaruh *groupthink* atau tekanan konsensus dalam pengambilan keputusan kolektif (Janis, 1982). Sementara itu, level domestik menekankan faktor-faktor internal negara, seperti opini publik, partai politik, dan kepentingan ekonomi domestik, yang dapat membatasi atau mendorong tindakan pemerintah dalam politik luar negeri (Allison & Zelikow, 1999). Level sistem internasional berfokus pada struktur dan dinamika sistem internasional, seperti distribusi kekuatan dan norma global, yang berperan dalam membentuk politik luar negeri sebagai respons terhadap tekanan eksternal (Waltz, 1979). Terakhir, level global atau transnasional memperluas fokus ke aktor non-negara, seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional, yang turut memengaruhi politik luar negeri dalam isu-isu lintas batas seperti perubahan iklim dan terorisme (Morin & Paquin, 2018). Dengan memahami setiap level ini, analisis kebijakan dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor kompleks yang membentuk politik luar negeri negara (Hudson, 2013; Morin & Paquin, 2018)

Memberikan fokus telaah pada level analisis individu dalam studi politik luar negeri sangat penting karena keputusan-keputusan politik luar negeri sering kali dipengaruhi oleh karakteristik dan persepsi pemimpin atau pengambil keputusan utama. Pemilihan level analisis individu dalam studi politik luar negeri sangat penting dengan alasan-alasan berikut:

- a. Pengaruh Langsung Kepribadian pada Keputusan: Pemimpin dengan karakteristik kepribadian yang kuat sering kali membuat keputusan politik luar negeri yang mencerminkan preferensi dan nilai pribadi mereka. Hal ini terutama terlihat dalam situasi di mana pemimpin memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan atau beroperasi dalam kondisi krisis (Hudson, 2013). Analisis pada level individu memungkinkan pengenalan pola-pola unik yang muncul dari gaya kepemimpinan dan kepribadian pemimpin tertentu.
- b. Peran Persepsi dan Bias dalam Pengambilan Keputusan: Persepsi pemimpin terhadap ancaman atau peluang di arena internasional sering kali dipengaruhi oleh bias kognitif mereka, yang bisa mengarah pada keputusan yang menyimpang dari kepentingan rasional. Misalnya, bias konfirmasi dapat membuat pemimpin lebih fokus pada informasi yang mendukung keyakinan mereka sendiri (Mintz & DeRouen Jr, 2010). Dengan demikian, memahami faktor psikologis ini membantu menjelaskan

keputusan kebijakan yang tampaknya tidak konvensional atau irasional.

- c. Respons terhadap Situasi Krisis dan Ambiguitas: Dalam situasi yang tidak menentu atau berisiko tinggi, karakteristik personal pemimpin, seperti toleransi terhadap ambiguitas dan kecenderungan untuk mengambil risiko, memiliki pengaruh besar dalam menentukan respons politik luar negeri. Pemimpin yang lebih agresif, misalnya, mungkin memilih solusi militer dibanding diplomasi, yang berdampak besar pada stabilitas internasional (Hermann, 1980).
- d. Konsistensi dalam Prediksi Politik luar negeri: Analisis individu memungkinkan prediksi yang lebih akurat terhadap kemungkinan kebijakan yang akan diambil, terutama bila pemimpin memiliki kontrol signifikan atas kebijakan. Studi terhadap pola perilaku pemimpin tertentu dapat memberikan indikasi tindakan yang konsisten, yang bermanfaat dalam merencanakan respons diplomatik dan strategi internasional (Hudson, 2013).
- e. Dampak pada Stabilitas Hubungan Internasional: Keputusan yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu pemimpin dapat menciptakan ketidakstabilan atau bahkan perubahan dramatis dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, mempelajari dinamika individu membantu memahami bagaimana dan

mengapa perubahan arah kebijakan dapat terjadi, terutama ketika ada pergantian kepemimpinan (Mintz & DeRouen Jr, 2010).

Lebih lanjut, Hudson (2013) menekankan pentingnya fokus pada level individu dalam analisis politik luar negeri karena individu memegang peran sentral dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi tindakan negara. Hudson menyatakan bahwa analisis politik luar negeri yang berfokus pada individu memberikan "fondasi mikro-teoretis" yang memungkinkan hubungan yang lebih mendalam antara teori hubungan internasional dan studi politik luar negeri. Hudson menggarisbawahi bahwa pentingnya peran pemimpin dalam politik luar negeri telah berubah selama dekade terakhir. Misalnya, pada tahun 1930-an, pendekatan "The Great Man" sangat populer, yang menekankan peran dominan pemimpin dalam kebijakan. Namun, selama Perang Dingin, fokus beralih ke atribut negara atau sistem, dengan karakteristik pemimpin dianggap kurang signifikan. Setelah Perang Dingin, perhatian kembali tertuju pada pemimpin individu untuk memahami kebijakan negara, terutama dalam situasi krisis seperti konflik Irak dan Korea Utara (Hudson, 2013).

Selanjutnya Hudson (2013) menambahkan bahwa tidak semua keputusan kebijakan mencerminkan karakteristik atau persepsi pemimpin secara langsung. Terdapat *scope conditions* tertentu untuk menentukan kapan analisis pada level individu

menjadi relevan dalam studi politik luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan karakteristik individu pemimpin mempengaruhi kebijakan secara signifikan. Beberapa prakondisi yang relevan dalam mempelajari pemimpin sebagai pembuat keputusan, antara lain:

- a. Jenis Rezim: Dalam rezim yang lebih otoriter, pengaruh pemimpin pada kebijakan cenderung lebih besar karena kontrol langsung atas keputusan. Sementara itu, dalam rezim demokratis, pengaruh pemimpin terhadap politik luar negeri lebih terbatas, karena kebijakan biasanya melibatkan banyak aktor, termasuk parlemen, media, kelompok kepentingan, dan opini publik.

Dalam konteks ini, karakteristik dan preferensi pribadi pemimpin memainkan peran utama dalam membentuk arah politik luar negeri negara (Hudson, 2013). Sebagai contoh, politik luar negeri Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin mencerminkan preferensi pribadinya terhadap kebijakan yang defensif dan konfrontatif, yang terlihat dalam strategi perbatasan yang keras dan aliansi militer yang dipaksakan kepada negara-negara Eropa Timur. Begitu pula, dalam era kepemimpinan Kim Jong-un di Korea Utara, kebijakan yang agresif dan nuklir mencerminkan keputusan personal yang tidak banyak dipengaruhi oleh oposisi domestik atau kelompok masyarakat lainnya. Dengan

kontrol yang besar atas militer dan birokrasi, pemimpin dalam rezim otoriter dapat dengan leluasa membuat politik luar negeri yang sesuai dengan pandangan atau kepentingan pribadi mereka, tanpa harus mempertimbangkan opini publik atau dinamika politik internal yang umumnya ditemukan dalam sistem demokrasi.

Berbeda dengan proses pengambilan politik luar negeri di rezim otoriter, dalam rezim demokratis, pengaruh pemimpin terhadap politik luar negeri lebih terbatas, karena kebijakan biasanya melibatkan banyak aktor, termasuk parlemen, media, kelompok kepentingan, dan opini publik. Sistem demokrasi yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi mendorong pengambilan keputusan yang inklusif, di mana pemimpin sering kali harus mempertimbangkan konsensus politik dan tekanan dari berbagai pihak (Hill, 2016).

Karakteristik demokrasi ini terlihat dalam politik luar negeri Amerika Serikat di era Presiden Barack Obama, khususnya dalam pendekatan multilateral terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim dan perjanjian nuklir Iran. Sebagai contoh, upaya pemerintahan Obama untuk meratifikasi Kesepakatan Paris pada 2015 tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi pribadinya tetapi juga oleh tekanan dari komunitas

ilmuwan, kelompok lingkungan, dan partai politik domestik. Dukungan luas dari masyarakat sipil dan legislatif menjadi pendorong utama keberhasilan kebijakan tersebut (Kelemen & Vogel, 2010).

Selain itu, dalam sistem demokratis, media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik terhadap politik luar negeri. Misalnya, penarikan pasukan Inggris dari Irak pada tahun 2007 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Gordon Brown sebagian besar didorong oleh tekanan opini publik yang kritis terhadap keterlibatan Inggris dalam perang tersebut (Bowring, 2022). Dalam rezim demokratis, dinamika politik luar negeri sering kali mencerminkan interaksi antara preferensi pemimpin, lembaga-lembaga negara, dan tekanan dari kelompok masyarakat, menciptakan proses yang lebih kompleks dibandingkan dengan rezim otoriter.

- b. Minat Pemimpin pada Politik luar negeri: Pemimpin yang memiliki kepentingan atau keterlibatan emosional dengan isu politik luar negeri akan meninggalkan jejak personal yang lebih kuat dalam keputusan mereka.

Lebih lanjut, pemimpin yang memiliki minat tinggi pada politik luar negeri cenderung mengekspresikan pandangan dan preferensi pribadi mereka secara lebih jelas dalam keputusan kebijakan yang diambil (Hudson, 2013). Sebagai contoh, Presiden

Amerika Serikat Jimmy Carter menunjukkan minat yang mendalam terhadap isu hak asasi manusia dalam politik luar negeri, yang tercermin dalam upayanya untuk mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama Amerika Serikat di kancah internasional. Sikap ini membedakan politik luar negerinya dari pendahulunya, karena Carter secara aktif menekan pemerintah-pemerintah otoriter di berbagai negara untuk menghormati hak asasi manusia, meskipun kadang menimbulkan ketegangan dengan sekutu yang memiliki catatan buruk dalam isu ini (Schmitz & Walker, 2004).

Kondisi lainnya adalah Angela Merkel dari Jerman, yang memiliki minat dan keterlibatan emosional dalam isu pengungsi dan imigrasi. Selama krisis pengungsi 2015, Merkel menunjukkan kepedulian pribadi yang kuat terhadap nasib pengungsi, sehingga ia memilih untuk membuka perbatasan Jerman bagi ratusan ribu pengungsi, sebuah keputusan yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadinya tentang kemanusiaan dan toleransi. Kebijakan ini, meskipun kontroversial, menunjukkan bagaimana minat dan keterlibatan pribadi pemimpin dapat meninggalkan jejak yang kuat pada politik luar negeri negara (Hockenos, 2015).

- c. Situasi Krisis: Kondisi krisis cenderung mengangkat keterlibatan pemimpin dalam keputusan tertinggi karena taruhannya yang tinggi, dan kebutuhan akan keputusan yang cepat dan tepat.

Dalam kondisi ini, karakteristik pribadi dan psikologis pemimpin sering kali muncul dengan lebih jelas, memengaruhi respons kebijakan yang diambil (Hudson, 2013). Sebagai contoh, selama Krisis Rudal Kuba pada tahun 1962, Presiden John F. Kennedy terlibat secara langsung dan intens dalam setiap tahap pengambilan keputusan untuk menghadapi ancaman rudal Soviet di Kuba. Karakteristik Kennedy yang cenderung hati-hati dan terbuka terhadap berbagai opsi, termasuk diplomasi, terlihat dalam keputusannya untuk memilih blokade laut daripada serangan militer langsung, meskipun ada tekanan kuat dari penasihat yang mendukung tindakan militer. Pendekatan Kennedy dalam krisis ini mencerminkan kecenderungannya untuk menghindari eskalasi konflik yang berisiko tinggi bagi keamanan global (Office of the Historian, n.d.-b).

Respons Presiden George W. Bush terhadap serangan 11 September 2001 merupakan contoh dari penjelasan bagian ini. Krisis ini memunculkan karakteristik kepemimpinan Bush yang tegas dan cenderung konfrontatif, yang mengarah pada kebijakan invasi ke Afghanistan dan kemudian ke Irak. Dalam

kondisi krisis yang penuh ketidakpastian, keputusan politik luar negeri sering kali dipengaruhi oleh persepsi pemimpin tentang ancaman serta respons emosional mereka, yang terlihat dalam komitmen Bush untuk memerangi terorisme secara global. Dengan demikian, krisis tidak hanya mengangkat keterlibatan langsung pemimpin tetapi juga memperlihatkan preferensi psikologis yang memengaruhi arah politik luar negeri negara (Hirsh, 2021).

- d. Situasi Ambiguitas atau ketidakpastian: Ketika informasi tidak jelas, preferensi dan persepsi pemimpin dapat memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan.

Dalam situasi yang ambigu, pemimpin cenderung mengandalkan intuisi, pengalaman, dan keyakinan pribadi mereka untuk membuat keputusan, karena tidak ada panduan pasti yang dapat diandalkan (Hudson, 2013). Contohnya adalah keputusan politik luar negeri Amerika Serikat pada awal pandemi COVID-19 di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Pada tahap awal, informasi mengenai dampak global pandemi dan cara penanggulangannya sangat terbatas dan ambigu, menyebabkan beragam respons dari negara-negara di seluruh dunia. Trump, yang memiliki persepsi skeptis terhadap organisasi internasional dan pendekatan multilateral, memilih untuk menarik

Amerika Serikat dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan alasan bahwa WHO tidak transparan dalam informasi dan terlalu dipengaruhi oleh Tiongkok. Keputusan ini mencerminkan preferensi pribadi Trump untuk pendekatan kebijakan unilateral dan kecurigaan terhadap kerja sama internasional, terutama dalam konteks ketidakpastian yang tinggi (Hernández, 2020).

Hal lain dapat dilihat pada keputusan Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Theresa May selama proses Brexit. Ketidakpastian mengenai dampak ekonomi dan politik dari Brexit, serta kurangnya informasi jelas tentang bentuk hubungan Inggris dengan Uni Eropa pasca-Brexit, membuat May harus bergantung pada persepsi dan keyakinan pribadinya serta tekanan domestik. Ketidakpastian ini menghasilkan serangkaian keputusan yang rumit dan berfluktuasi, yang mencerminkan dilema dan ambiguitas yang ia hadapi tanpa adanya data yang pasti untuk mendasari keputusan tersebut. Dengan demikian, situasi ambiguitas sering kali memperlihatkan preferensi dan persepsi unik pemimpin yang memengaruhi arah politik luar negeri dalam menghadapi ketidakpastian (Martill & Mesarovich, 2024).

- e. Gaya kepemimpinan seorang individu: cara pemimpin merespons situasi internasional dan bagaimana mereka

mengambil keputusan yang berhubungan dengan politik luar negeri dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan tertentu.

Dalam pengambilan keputusan luar negeri, pemimpin dengan gaya kepemimpinan otoriter, misalnya, cenderung memiliki kontrol lebih besar terhadap politik luar negeri dan tidak bergantung banyak pada konsultasi dengan pihak lain atau lembaga negara (Hudson, 2013). Sebaliknya, pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif mungkin lebih terbuka terhadap masukan dari anggota kabinet atau bahkan opini publik. Gaya kepemimpinan ini tidak hanya mencerminkan pendekatan administratif tetapi juga bagaimana seorang pemimpin menilai ancaman, peluang, dan tantangan dalam hubungan internasional. Gaya kepemimpinan yang kuat dapat menciptakan politik luar negeri yang lebih personal, di mana keputusan yang diambil sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi pemimpin tersebut.

Sebagai contoh, gaya kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, sangat mempengaruhi politik luar negeri Amerika, khususnya dalam respons terhadap serangan 11 September 2001. Dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan cenderung konfrontatif, Bush mengambil langkah-langkah yang agresif dalam politik luar negeri, termasuk invasi ke Afghanistan dan

Irak. Keputusan tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan yang lebih cenderung pada penggunaan kekuatan militer dan penegakan politik luar negeri berdasarkan nilai-nilai domestik, seperti demokrasi dan kebebasan (Hirsh, 2021). Sebaliknya, gaya kepemimpinan Presiden Jimmy Carter yang lebih mengedepankan diplomasi dan hak asasi manusia terlihat jelas dalam politik luar negeri AS yang lebih berfokus pada upaya mediasi internasional dan pengurangan ketegangan global selama masa pemerintahannya (Office of the Historian, n.d.-b), termasuk keterlibatannya dalam perjanjian Camp David antara Israel dan Mesir pada tahun 1978 (Office of the Historian, n.d.-a). Dalam kedua kasus ini, gaya kepemimpinan pemimpin negara sangat mempengaruhi bagaimana mereka merespons tantangan internasional dan memilih politik luar negeri yang sesuai dengan pandangan pribadi dan nilai-nilai kepemimpinan mereka.

4.3 Prakondisi Peran Pemimpin dalam Politik Luar Negeri Indonesia

a. Jenis Rezim

Dalam konteks Indonesia, rezim pemerintahan baik, otoriter dan demokratis, memiliki pengaruh yang berbeda terhadap peran pemimpin dalam pelaksanaan politik luar

negeri. Pada era Orde Baru, yang ditandai dengan pemerintahan otoriter di bawah Presiden Soeharto, politik luar negeri dikendalikan secara sentralistik (Suryadinata, 1998b). Soeharto memiliki kekuasaan besar dalam menentukan arah politik luar negeri, yang tercermin dalam kebijakan stabilitas regional dan pendekatan diplomasi ekonomi yang sangat bergantung pada preferensi pribadi dan prioritas domestik untuk menarik investasi asing (Suryadinata, 1998a). Pengendalian langsung terhadap birokrasi, militer, dan media memungkinkan politik luar negeri dibuat tanpa banyak oposisi atau keterlibatan aktor non-pemerintah, yang memberikan kebebasan bagi pemimpin untuk menjalankan agenda politik luar negeri secara unilateral.

Dalam rezim otoriter, kepribadian pemimpin memiliki pengaruh langsung pada keputusan dalam politik luar negeri Indonesia, karena karakteristik pribadi mereka seringkali menentukan politik luar negeri yang diambil. Pemimpin dengan karakteristik kepribadian yang kuat, seperti kecenderungan untuk menjadi dominan, pragmatis, atau idealis, seringkali mencerminkan preferensi dan nilai pribadi mereka dalam menentukan arah politik luar negeri. Kepribadian ini, terutama saat pemimpin memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan atau menghadapi krisis internasional, memberikan dampak besar terhadap keputusan diplomatik yang diambil.

Prioritas di bidang ekonomi dalam politik luar negeri Orde Baru di bawah Presiden Soeharto melihatkan peran dominan Suharto dalam ASEAN dan strategi diplomasi yang

lebih menitikberatkan pada penguatan posisi Indonesia secara regional dan internasional, termasuk dalam ASEAN, sebagai alat untuk stabilitas politik dan ekonomi (Weatherbee, 2008). Keputusannya untuk mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga kestabilan nasional dan mendukung pembangunan ekonomi (Suryadinata, 1998b). Kepribadian Soeharto yang lebih berhati-hati dalam politik luar negeri berperan dalam menjaga Indonesia tetap aman dan stabil di tengah situasi politik global yang dinamis.

Sebaliknya, dalam sistem demokratis pasca-reformasi, politik luar negeri Indonesia mencerminkan karakteristik inklusivitas dan pluralitas. Presiden tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan dalam pengambilan keputusan politik luar negeri, karena parlemen, masyarakat sipil, media, dan kelompok kepentingan memiliki pengaruh yang signifikan. Selain itu, tekanan dari opini publik dan kelompok advokasi sering kali mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu global, seperti perubahan iklim dan perlindungan tenaga kerja migran (Umar, 2019) .

Dalam rezim demokratis, media juga menjadi salah satu aktor penting yang memengaruhi politik luar negeri Indonesia. Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan politik luar negeri

dalam rezim demokratis tidak hanya didasarkan pada preferensi pemimpin, tetapi juga pada dinamika domestik yang lebih kompleks.

Pascareformasi 1998, politik luar negeri Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap masukan dari parlemen dan masyarakat sipil. Salah satu contohnya adalah partisipasi aktif Indonesia dalam Kesepakatan Paris 2015, yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap isu perubahan iklim, di mana kebijakan ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk akademisi, organisasi lingkungan, dan media (Natalegawa, 2018). Selain itu, dalam perlindungan tenaga kerja migran, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo berupaya meningkatkan diplomasi bilateral dengan negara-negara tujuan migrasi untuk melindungi hak-hak pekerja migran, sering kali sebagai respons terhadap tekanan dari media dan kelompok advokasi (Umar, 2019). Praktik lainnya terlihat dalam upaya diplomasi maritim Indonesia, seperti peluncuran kebijakan Poros Maritim Dunia, yang tidak hanya menjadi agenda strategis pemerintah tetapi juga melibatkan diskusi dengan pemangku kepentingan nasional, termasuk sektor bisnis dan kelompok lingkungan (Weatherbee, 2016). Dalam hal ini tergambar bahwa dalam rezim demokratis menggambarkan proses pengambilan politik luar negeri yang lebih pluralistik dan akuntabel.

Namun, meskipun sistem demokratis memungkinkan inklusivitas yang lebih besar, proses pengambilan keputusan

sering kali menjadi lebih lambat karena adanya kebutuhan untuk mencapai konsensus di antara berbagai aktor. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun pemimpin masih memegang peran strategis, ruang gerak mereka lebih terbatas dibandingkan dengan rezim otoriter, di mana keputusan dapat diambil secara cepat tanpa banyak perlawanan (Hudson, 2013). Dalam rezim otoriter, pengambilan keputusan politik luar negeri cenderung bersifat sentralistik, dengan pemimpin memainkan peran dominan dan sering kali tidak memerlukan persetujuan dari aktor-aktor lain seperti parlemen atau masyarakat sipil. Hal ini disebabkan oleh struktur kekuasaan yang terkonsentrasi, di mana lembaga-lembaga negara seperti militer, birokrasi, dan media berada di bawah kendali langsung pemimpin. Keadaan ini memungkinkan keputusan politik luar negeri dibuat dengan cepat, meskipun sering kali kurang transparan dan minim akuntabilitas (Hudson, 2013). Meskipun efisien dalam pelaksanaannya, pendekatan ini sering kali mengabaikan aspirasi rakyat dan kelompok kepentingan, sehingga rentan terhadap kritik karena kurangnya keterbukaan dan inklusivitas.

b. Minat Pemimpin pada Politik luar negeri

Minat pemimpin pada politik luar negeri sangat berpengaruh terhadap keputusan politik luar negeri Indonesia. Pemimpin yang memiliki kepentingan pribadi atau keterlibatan emosional terhadap isu tertentu dalam politik luar negeri cenderung membuat keputusan yang lebih dipengaruhi oleh

pandangan dan preferensi pribadi mereka. Hal ini mempengaruhi arah politik luar negeri yang diambil, serta bagaimana Indonesia berinteraksi dengan negara lain di tingkat global.

Kepemimpinan Presiden Soeharto yang memiliki minat besar terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia dalam konteks hubungan internasional. Kepribadian Soeharto yang pragmatis dan sangat terfokus pada kestabilan nasional menyebabkan politik luar negeri Indonesia pada masa itu lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik domestik dan keamanan internasional. Soeharto memperlihatkan keterlibatan emosional terhadap isu-isu yang dapat memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan, terutama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN. Politik luar negeri Indonesia yang dijalankan cenderung bersifat berhati-hati dan mengutamakan hubungan yang bersifat menjaga keamanan negara (Umar, 2019; Weatherbee, 2008). Dalam konteks ini, minat pribadi Soeharto pada stabilitas dan keamanan negara telah membentuk politik luar negeri Indonesia yang lebih fokus pada aliansi strategis dan diplomasi yang mengutamakan non-konfrontasi.

Sementara itu, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita melihat pengaruh minat pribadi pemimpin terhadap politik luar negeri yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Jokowi memiliki minat yang kuat terhadap diplomasi ekonomi dan peningkatan kerja sama

internasional yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya, Indonesia semakin terlibat dalam berbagai proyek pembangunan besar, seperti inisiatif Belt and Road dari Tiongkok. Hal ini menggambarkan bagaimana minat Jokowi dalam bidang ekonomi global dan pengembangan infrastruktur mengarahkan politik luar negeri Indonesia untuk lebih fokus pada pencapaian kemajuan ekonomi melalui kerja sama internasional (Weatherbee, 2016). Minat Jokowi yang tinggi pada pembangunan ekonomi membuat politik luar negeri Indonesia lebih terfokus pada upaya meningkatkan hubungan bilateral yang saling menguntungkan.

Minat pemimpin terhadap isu politik luar negeri tertentu memberikan pengaruh yang signifikan dalam membentuk politik luar negeri Indonesia, baik itu terkait dengan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, atau nilai-nilai global yang dianggap penting. Keputusan politik luar negeri yang diambil oleh pemimpin Indonesia sering kali mencerminkan pandangan dan minat pribadi mereka, yang akhirnya meninggalkan jejak yang kuat dalam bentuk interaksi Indonesia di tingkat global.

c. Situasi Krisis

Kondisi krisis dalam konteks politik luar negeri Indonesia dapat memiliki dampak signifikan terhadap keputusan yang diambil oleh pemimpin negara. Ketika suatu negara menghadapi situasi krisis, baik itu krisis diplomatik,

ekonomi, atau bahkan militer, tekanan tinggi untuk mengambil keputusan cepat dan tepat memaksa pemimpin untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam situasi semacam ini, karakteristik pribadi dan psikologis pemimpin sangat memengaruhi respons politik luar negeri yang diambil, karena keputusan yang diambil sering kali mencerminkan nilai-nilai, persepsi, dan kecenderungan pribadi pemimpin dalam menghadapi tantangan besar (Hudson, 2013).

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menghadapi beberapa krisis internasional yang membutuhkan keputusan yang cepat dan tegas. Salah satu yang paling signifikan adalah krisis ekonomi Asia pada tahun 1997-1998. Dalam situasi krisis ini, Soeharto sebagai pemimpin yang dikenal dengan pendekatan yang sangat berhati-hati dan pragmatis, menunjukkan kecenderungannya untuk menjaga stabilitas nasional dengan melibatkan dirinya langsung dalam pengambilan keputusan. Krisis ekonomi ini juga memicu respons dari pihak internasional yang dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara besar. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Soeharto cenderung berfokus pada mengurangi dampak ekonomi domestik dan menjaga hubungan dengan negara-negara donor serta lembaga internasional seperti IMF (Suryadinata, 1998b). Namun, pendekatan ini juga menunjukkan bagaimana karakteristik pribadi Soeharto, yang lebih berhati-hati dan cenderung mengutamakan kestabilan,

memengaruhi respons politik luar negeri Indonesia terhadap krisis tersebut.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga menghadapi tantangan luar negeri yang besar, seperti dalam krisis geopolitik di Laut China Selatan. Krisis ini melibatkan klaim wilayah oleh beberapa negara besar dan menuntut keputusan diplomatik yang cepat. Jokowi, dengan kepribadian yang lebih terbuka dan berorientasi pada pembangunan ekonomi, berusaha untuk menjaga keseimbangan antara menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, serta mempertahankan kedaulatan Indonesia di kawasan. Respons Jokowi terhadap krisis ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang lebih pragmatis dan diplomatik dapat beradaptasi dengan situasi krisis dengan menekankan pentingnya diplomasi yang kooperatif dan pengelolaan hubungan yang hati-hati untuk meminimalkan ketegangan internasional (Weatherbee, 2016).

Kondisi krisis sering kali memperlihatkan dinamika psikologis pemimpin yang cenderung mempercepat pengambilan keputusan, karena taruhannya yang tinggi dan kebutuhan untuk bertindak cepat. Dalam situasi semacam ini, kepribadian pemimpin yang lebih dominan atau memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan unilateral dapat lebih terlihat. Sebaliknya, pemimpin yang lebih berhati-hati dan inklusif mungkin lebih memilih untuk melibatkan pihak-pihak lain dalam proses pengambilan keputusan (Hudson, 2013). Hal

ini terlihat ketika Indonesia dalam menghadapi krisis global seperti pandemi COVID-19, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi menekankan respons kolektif dengan memperkuat kerja sama internasional, baik dalam bidang kesehatan maupun ekonomi, menunjukkan bagaimana pemimpin dengan kepribadian yang lebih inklusif dan kolaboratif memilih jalur diplomatik yang lebih mengedepankan solidaritas global (Weatherbee, 2016).

Dalam situasi krisis, pemimpin sering kali merasa lebih tertekan dan memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan berdasarkan persepsi pribadi mereka terhadap ancaman, serta kebutuhan untuk segera mengatasi masalah. Keputusan-keputusan dalam situasi krisis dapat lebih dipengaruhi oleh emosi dan psikologi pemimpin, yang dapat memperkuat pola keputusan yang lebih agresif atau, sebaliknya, lebih kompromistis (Hudson, 2005). Lebih lanjut, kondisi krisis dapat memperlihatkan pengaruh karakteristik pribadi dan psikologis pemimpin terhadap politik luar negeri Indonesia, dengan keputusan-keputusan yang diambil sering kali mencerminkan kebutuhan mendesak untuk bertindak, serta preferensi dan respons pribadi pemimpin terhadap situasi tersebut.

d. Situasi Ambiguitas atau ketidakpastian

Situasi ambiguitas atau ketidakpastian sering kali muncul dalam politik luar negeri Indonesia, terutama ketika informasi yang tersedia tidak jelas atau ketika negara

menghadapi tantangan internasional yang tidak terduga. Dalam kondisi seperti ini, pemimpin negara cenderung mengandalkan intuisi, pengalaman, dan keyakinan pribadi mereka untuk mengambil keputusan, karena tidak ada panduan pasti yang dapat diandalkan. Keputusan yang diambil dalam situasi ketidakpastian ini sangat dipengaruhi oleh persepsi dan preferensi pribadi pemimpin, yang memainkan peran penting dalam menentukan arah politik luar negeri negara (Hudson, 2013).

Kondisi tersebut dapat dilihat dalam respons Indonesia terhadap krisis di Laut China Selatan, yang melibatkan ketidakpastian dan ambiguitas terkait klaim wilayah oleh beberapa negara besar. Dalam menghadapi ketidakpastian ini, Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, harus mengambil keputusan yang sulit terkait dengan posisi Indonesia dalam konflik tersebut. Meskipun ada tekanan internasional untuk memilih sisi, Indonesia berusaha untuk menjaga politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan menekankan pada diplomasi yang berbasis pada hukum internasional dan resolusi damai (Weatherbee, 2016). Keputusan Indonesia untuk tidak memilih pihak, meskipun dalam situasi yang penuh ketidakpastian, mencerminkan bagaimana Presiden Jokowi mengandalkan intuisi dan pengalaman diplomatiknya, serta keyakinan pribadinya tentang pentingnya menjaga netralitas dan kedaulatan Indonesia di tengah situasi yang ambigu.

Situasi ambiguitas juga dapat ditemukan dalam respons Indonesia terhadap politik luar negeri negara besar, seperti Amerika Serikat, terutama terkait dengan kebijakan proteksionisme yang diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Ketika ketidakpastian mengenai kebijakan perdagangan dan hubungan bilateral menciptakan keraguan di kalangan banyak negara, Indonesia, di bawah kepemimpinan Jokowi, cenderung mengandalkan pengalaman diplomatik dan intuisi untuk menjaga hubungan positif dengan Amerika Serikat sambil tetap melindungi kepentingan ekonomi domestik. Keputusan untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan tetap terlibat dalam forum multilateral menunjukkan bagaimana Indonesia berusaha mencari jalan tengah di tengah ketidakpastian global yang disebabkan oleh perubahan politik luar negeri Amerika Serikat (Weatherbee, 2016).

Di sisi lain, dalam situasi ketidakpastian yang sangat mendalam, seperti dalam krisis global atau pandemi, pengaruh preferensi pribadi pemimpin juga sangat jelas. Presiden Jokowi, yang memiliki keyakinan kuat pada pentingnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, memprioritaskan diplomasi kesehatan dan kerja sama internasional dalam menghadapi pandemi COVID-19. Keputusannya untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengadaan vaksin dan memperkuat kebijakan internasional yang berbasis pada solidaritas menunjukkan bagaimana keyakinan pribadi dan

intuisi pemimpin Indonesia memainkan peran penting dalam mengelola ketidakpastian global.

Situasi ambiguitas menuntut pemimpin untuk bergantung pada faktor-faktor subjektif seperti pengalaman, intuisi, dan persepsi pribadi mereka terhadap situasi tersebut. Dalam kondisi seperti ini, keputusan politik luar negeri yang diambil seringkali dipengaruhi oleh sikap dan preferensi pribadi pemimpin, karena mereka tidak memiliki informasi yang cukup atau jelas untuk membuat keputusan yang sepenuhnya rasional. Lebih lanjut, dalam situasi yang ambigu, pemimpin cenderung mempercayai naluri mereka sendiri dalam menentukan arah kebijakan (Hudson, 2005). Dalam politik luar negeri Indonesia menunjukkan bagaimana keputusan yang diambil oleh pemimpin sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian informasi dan kondisi global yang tidak pasti. Pemimpin Indonesia, seperti Jokowi, sering kali mengandalkan pengalaman dan keyakinan pribadinya dalam membuat keputusan diplomatik di tengah ketidakjelasan, yang pada gilirannya membentuk politik luar negeri Indonesia yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan global yang cepat.

e. Gaya kepemimpinan seorang individu

Gaya kepemimpinan seorang individu memiliki pengaruh besar terhadap politik luar negeri Indonesia, terutama dalam cara pemimpin merespons situasi internasional dan

mengambil keputusan terkait hubungan luar negeri. Setiap gaya kepemimpinan, baik itu otoriter, kolaboratif, atau gaya lain, dapat membentuk pendekatan pemimpin terhadap politik luar negeri, dengan mempertimbangkan preferensi pribadi, pandangan ideologis, dan cara mereka menilai ancaman serta peluang yang ada di dunia internasional (Hudson, 2013).

Pemimpin dengan gaya kepemimpinan otoriter cenderung mengambil keputusan politik luar negeri secara sepihak, dengan sedikit konsultasi dengan pihak lain atau lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, gaya kepemimpinan otoriter ini paling terlihat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Soeharto, yang memerintah selama lebih dari tiga dekade, memiliki kendali penuh terhadap politik luar negeri Indonesia, dengan sedikit pengaruh dari pihak eksternal atau internal selain dirinya sendiri. Keputusan-keputusan besar dalam politik luar negeri seperti pengakuan terhadap negara-negara tertentu, aliansi dengan negara besar, dan sikap Indonesia dalam organisasi internasional seperti PBB lebih dipengaruhi oleh preferensi dan ideologi pribadi Soeharto (Suryadinata, 2022).

Dalam menghadapi ketegangan dengan negara-negara barat pada akhir 1970-an dan 1980-an, Soeharto cenderung mengadopsi politik luar negeri yang lebih berfokus pada penguatan hubungan dengan negara-negara komunis, seperti Tiongkok, dan memperkuat posisi Indonesia di ASEAN. Meskipun terdapat tekanan dari luar, politik luar negeri

Indonesia tetap ditentukan oleh sikap pribadi Soeharto yang pragmatis dan lebih mengutamakan stabilitas domestik dibandingkan dengan kebijakan yang lebih terbuka terhadap masukan dari pihak luar (Suryadinata, 2022). Gaya kepemimpinan otoriter ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat namun sering kali sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi Soeharto yang lebih mementingkan keamanan politik dan ekonomi dalam negeri.

Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif, seperti yang terlihat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, memungkinkan terciptanya politik luar negeri yang lebih inklusif dan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, baik itu anggota kabinet, lembaga negara, maupun opini publik. Jokowi, dengan gaya kepemimpinan yang lebih terbuka dan partisipatif, cenderung mengedepankan konsultasi dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia. Dalam menghadapi tantangan global, Jokowi menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan mengutamakan diplomasi yang berbasis pada kerja sama multilateral, seperti dalam keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional, kerja sama ASEAN, dan partisipasi dalam proyek Belt and Road Initiative dari Tiongkok (Weatherbee, 2016).

Keputusan-keputusan Jokowi dalam bidang diplomasi ekonomi, misalnya, sering melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak dan mempertimbangkan masukan dari sektor swasta serta ahli ekonomi (Kim, 2023). Hal ini terlihat jelas

dalam respons Indonesia terhadap krisis global, termasuk upaya memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara besar, serta politik luar negeri yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing Indonesia di pasar internasional (Weatherbee, 2016). Gaya kepemimpinan kolaboratif ini mengarah pada politik luar negeri yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan internasional, dengan perhatian besar pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Gaya kepemimpinan juga berperan dalam cara pemimpin menilai ancaman, peluang, dan tantangan dalam hubungan internasional. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang lebih kuat, baik otoriter maupun kolaboratif, akan lebih mudah untuk mempengaruhi arah politik luar negeri negara. Dalam situasi krisis atau ketidakpastian, gaya kepemimpinan yang kuat dapat memberikan pemimpin kekuatan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tegas, namun juga dapat membawa politik luar negeri yang sangat dipengaruhi oleh keyakinan pribadi mereka. Sebagai contoh, dalam krisis Laut China Selatan, Presiden Jokowi memilih jalur diplomasi yang lebih berhati-hati namun tetap memperjuangkan kedaulatan Indonesia di tengah ketegangan internasional (Nugraha, 2021). Hal ini menunjukkan bagaimana gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif memungkinkan Jokowi untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dan membuat keputusan yang mempertimbangkan banyak pihak.

Selanjutnya kepemimpinan pemimpin Indonesia, baik yang otoriter maupun kolaboratif, memengaruhi keputusan-keputusan besar dalam politik luar negeri. Kepribadian dan gaya kepemimpinan ini menentukan seberapa besar pemimpin tersebut bergantung pada proses konsultasi dan kolaborasi dengan pihak lain, serta bagaimana mereka menilai dan merespons situasi internasional yang kompleks.

4.4 Kesimpulan

Analisis tingkat individu dalam politik luar negeri Indonesia menyoroti pengaruh signifikan yang dimiliki pemimpin terhadap arah dan keputusan diplomatik negara. Faktor-faktor seperti kepribadian, gaya kepemimpinan, minat pribadi, dan respons terhadap situasi krisis menjadi elemen kunci dalam menentukan bagaimana politik luar negeri dibentuk. Pemimpin dengan kepribadian otoriter, seperti Soeharto, cenderung mengambil keputusan berdasarkan stabilitas domestik dan kepentingan keamanan nasional. Sebaliknya, gaya kepemimpinan kolaboratif seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo, menghasilkan politik luar negeri yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis diplomasi ekonomi untuk meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional.

Dalam konteks krisis dan situasi ambigu, karakteristik pemimpin memainkan peran sentral dalam menentukan respons kebijakan. Pemimpin yang agresif mungkin lebih

memilih solusi konfrontatif, sementara pemimpin yang diplomatis cenderung menggunakan pendekatan dialog dan negosiasi. Contohnya, respons Soeharto terhadap krisis ekonomi 1997 menonjolkan pendekatan pragmatis untuk menjaga stabilitas domestik, sementara Jokowi mengutamakan diplomasi multilateral dan kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global seperti Laut China Selatan dan pandemi COVID-19. Analisis ini menunjukkan bahwa preferensi dan persepsi individu pemimpin sering kali menjadi dasar keputusan dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

Gaya kepemimpinan dan minat pribadi pemimpin berdampak langsung pada politik luar negeri Indonesia. Pemimpin dengan minat tinggi terhadap isu tertentu, seperti diplomasi ekonomi atau stabilitas politik, cenderung meninggalkan jejak personal yang kuat dalam kebijakan yang mereka ambil. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis tingkat individu dalam memahami dinamika politik luar negeri Indonesia, terutama dalam merespons tantangan global yang terus berkembang. Pendekatan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana politik luar negeri dipengaruhi oleh dinamika personal dan kepemimpinan, serta relevansi strategi yang diambil dalam menjaga posisi Indonesia di panggung internasional.

Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimana karakteristik pribadi dan gaya kepemimpinan pemimpin Indonesia memengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri? Berikan contoh konkret dari masa pemerintahan Soeharto atau Joko Widodo.
2. Dalam konteks politik luar negeri Indonesia, bagaimana pengaruh persepsi dan bias kognitif pemimpin terhadap keputusan strategis yang diambil?
3. Apa perbedaan utama dalam pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia pada masa rezim otoriter dan demokratis? Bagaimana hal ini tercermin dalam respons terhadap situasi krisis?
4. Bagaimana situasi krisis internasional, seperti krisis ekonomi Asia 1997 atau konflik di Laut China Selatan, memengaruhi peran pemimpin dalam politik luar negeri Indonesia?
5. Apakah gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif selalu lebih efektif dibandingkan gaya otoriter dalam menentukan politik luar negeri? Jelaskan dengan contoh dari praktik politik luar negeri Indonesia.
6. Sejauh mana opini publik dan media domestik memengaruhi politik luar negeri Indonesia dalam rezim demokratis pasca-Reformasi?
7. Bagaimana peran minat pribadi seorang pemimpin, seperti fokus Soeharto pada stabilitas politik atau Jokowi pada

diplomasi ekonomi, membentuk arah politik luar negeri Indonesia?

8. Dalam situasi ambigu atau penuh ketidakpastian, seperti pandemi COVID-19, bagaimana preferensi pribadi pemimpin memengaruhi keputusan politik luar negeri?
9. Apakah analisis pada level individu cukup untuk memahami dinamika politik luar negeri Indonesia, ataukah diperlukan pendekatan yang lebih holistik? Diskusikan dengan merujuk pada level analisis lainnya (domestik, sistem internasional, dll.).
10. Bagaimana integrasi nilai-nilai nasional dengan karakteristik pemimpin dapat memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional? Berikan contoh praktik diplomasi yang relevan.

Glosarium

Politik Luar Negeri Bebas Aktif - Prinsip politik luar negeri Indonesia yang menekankan independensi tanpa memihak blok kekuatan global tertentu, tetapi tetap aktif berperan dalam perdamaian dunia dan menjalin hubungan internasional yang fleksibel.

Analisis Tingkat Individu - Pendekatan dalam studi politik luar negeri yang berfokus pada pengaruh karakteristik pribadi, persepsi, dan gaya kepemimpinan individu terhadap pengambilan keputusan.

- Bias Kognitif - Kesalahan atau distorsi dalam pemrosesan informasi yang memengaruhi keputusan pemimpin, termasuk kecenderungan untuk mendukung keyakinan yang sudah ada.
- Diplomasi Multilateral - Pendekatan dalam politik luar negeri yang melibatkan kerjasama dengan banyak negara atau organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama.
- Gaya Kepemimpinan - Cara seorang pemimpin memimpin dan mengambil keputusan, yang mencerminkan kepribadian, nilai, dan strategi individu tersebut.
- Politik luar negeri - Strategi dan keputusan yang dibuat oleh suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain atau aktor internasional.
- Krisis Internasional - Keadaan mendesak yang melibatkan konflik atau ancaman global yang memerlukan respons cepat dan strategis.
- Level Analisis - Pendekatan dalam studi hubungan internasional yang mencakup individu, kelompok, domestik, sistem internasional, dan transnasional.
- Minat Pribadi - Preferensi atau perhatian khusus pemimpin terhadap isu tertentu yang memengaruhi arah politik luar negeri.
- Opini Publik - Pandangan masyarakat yang dapat memengaruhi keputusan pemerintah, terutama dalam sistem demokratis.

- Persepsi Pemimpin - Cara seorang pemimpin memahami dan menafsirkan situasi internasional yang memengaruhi pengambilan keputusan.
- Pragmatisme - Pendekatan kebijakan yang fokus pada hasil nyata dan efisiensi praktis dalam mencapai tujuan.
- Rezim Demokratis - Sistem pemerintahan yang melibatkan banyak aktor, seperti parlemen dan masyarakat sipil, dalam pengambilan keputusan.
- Rezim Otoriter - Sistem pemerintahan yang terkonsentrasi pada satu pemimpin atau kelompok kecil dengan sedikit keterlibatan aktor lain.
- Situasi Ambiguitas - Keadaan di mana informasi tidak jelas, sehingga keputusan sangat dipengaruhi oleh intuisi dan persepsi pemimpin.
- Stabilitas Regional - Kondisi damai dan harmonis di kawasan tertentu yang menjadi tujuan utama politik luar negeri.
- Tekanan Internasional - Pengaruh dari negara lain atau organisasi global yang memengaruhi politik luar negeri suatu negara.
- Toleransi terhadap Ambiguitas - Kemampuan pemimpin untuk tetap tenang dan membuat keputusan dalam situasi yang tidak pasti.
- Diplomasi Ekonomi - Strategi politik luar negeri yang menitikberatkan pada hubungan ekonomi untuk mendukung pembangunan nasional.

Groupthink - Fenomena di mana kelompok pengambil keputusan cenderung mencapai konsensus tanpa mengevaluasi alternatif secara kritis.

Norma Global - Aturan atau nilai yang diakui secara luas dalam sistem internasional dan memengaruhi perilaku negara.

BAB 5**POLITIK LUAR NEGERI
INDONESIA: ANALISIS FAKTOR
AGAMA****5.1 Pengantar**

Bab ini mengkaji peran agama sebagai faktor yang memengaruhi pembentukan dan implementasi politik luar negeri Indonesia. Dalam hubungan internasional, agama dapat berfungsi sebagai kekuatan sosial yang membentuk identitas kolektif, pandangan dunia, serta norma internasional yang memengaruhi dinamika politik global. Sejarah menunjukkan bahwa meskipun agama sering diabaikan dalam studi hubungan internasional konvensional, pengaruhnya semakin diakui, terutama setelah peristiwa-peristiwa besar seperti serangan 9/11.

Capaian pembelajaran dari bab ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami kaitan antara agama dan politik luar negeri, menganalisis pengaruh agama terhadap interaksi antarnegara, serta mengevaluasi peran agama dalam isu-isu internasional kontemporer, seperti konflik sektarian dan diplomasi keagamaan. Analisis ini mencakup studi tentang bagaimana Indonesia menggunakan pendekatan berbasis agama dalam diplomasi internasional, seperti dalam upayanya memediasi konflik yang melibatkan sentimen keagamaan di kawasan Timur Tengah atau mendukung komunitas Muslim

minoritas, seperti Rohingya. Dengan memahami pengaruh agama, mahasiswa akan dapat melihat bagaimana identitas keagamaan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia berkontribusi pada politik luar negerinya, baik dalam mendukung perdamaian internasional maupun memajukan kepentingan nasional.

5.2 Faktor Agama dalam Kajian Hubungan Internasional

Agama adalah kekuatan sosial yang berpengaruh dalam membentuk pandangan dunia, identitas kolektif, dan norma internasional. Agama memiliki pengaruh yang kompleks dalam hubungan internasional, salah satu perannya adalah mempengaruhi interaksi antar negara dan proses pembuatan politik luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Agama juga bisa menjadi sumber perdamaian dan sebaliknya (Cheng, 2024). Secara historis agama seringkali diabaikan dalam kajian hubungan internasional, namun dewasa ini agama diakui sebagai penentu dalam perpolitikan global. Hal ini menunjukkan pengakuan yang lebih terhadap kaitan antara faktor agama dengan politik internasional yang menantang pandangan sekular konvensional dalam kajian hubungan internasional.

Penelitian mengenai kaitan antara agama dan Hubungan Internasional telah berkembang pesat terutama paska terjadinya peristiwa 9/11 (Haynes, 2005). Meskipun pada awal kemunculan disiplin ilmu Hubungan Internasional agama tidak terlalu menjadi perhatian dalam mempengaruhi politik

internasional. Sebelum terjadinya peristiwa 9/11 fokus utama dari kajian agama dalam hubungan internasional adalah menyangkut isu perang saudara di negara bekas Yugoslavia dan teori *clash of civilization* dari Samuel Huntington, namun peristiwa 9/11 mengubah fokus utama kajian agama dalam hubungan internasional menjadi sekuritisasi Islam dan terorisme Islam (Haynes, 2021).

Melalui bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana agama mempengaruhi politik luar negeri negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Arab Saudi, dan Israel. Kita juga akan membahas bagaimana agama digunakan sebagai alat diplomasi, pengaruhnya terhadap pandangan dunia pembuat kebijakan, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam integrasi agama ke dalam politik luar negeri Republik Indonesia.

5.3 Agama dalam Politik luar negeri Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dalam mengintegrasikan agama ke dalam politik luar negerinya, meskipun konstitusi secara eksplisit memisahkan agama dari negara. Setelah berakhirnya Perang Dingin, agama menjadi bagian integral dalam membentuk politik luar negeri AS, dengan berbagai presiden yang menggunakan retorika dan simbolisme agama untuk mendukung agenda politik mereka (Layada, 2020).

Identitas nasional Amerika Serikat yang sangat dipengaruhi oleh budaya White Anglo-Saxon protestant menjadikan agama memiliki peran signifikan dalam kehidupan

sosial dan politik di Amerika. Nilai agama menjadi dasar bagi misi measianik Amerika, hal ini pun mempengaruhi prinsip-prinsip politik luar negeri Amerika yang berupaya menyebarkan demokrasi dan nilai-nilai barat ke seluruh dunia (Xie, 2010). Selama masa pemerintahan Presiden Dwight D. Eisenhower, agama digunakan untuk memerangi komunisme, dengan ungkapan seperti "Ketika Tuhan masuk, komunisme harus pergi" menjadi simbol perlawanan ideologis. Penggunaan retorika Kristen ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan politik domestik (Kirby, 2017).

Pendekatan George W. Bush dan Jimmy Carter terhadap Timur Tengah mencerminkan tema-tema Kristen evangelis, yang menunjukkan bagaimana agama dapat mempengaruhi pandangan politik luar negeri (BERGGREN & RAE, 2006; Saiya, 2012). Para pemimpin ini percaya bahwa mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia di Timur Tengah tidak hanya merupakan tujuan politik tetapi juga keharusan moral yang dipandu oleh iman Kristen mereka. Invasi George W. Bush ke Irak dan Afghanistan dibingkai sebagai perang salib untuk kebebasan dan demokrasi, sementara penekanan Jimmy Carter pada diplomasi dan hak asasi manusia di wilayah tersebut berakar pada keyakinannya akan pentingnya perdamaian dan keadilan sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus (Santos & Teixeira, 2013; G. S. Smith, 2011). Pada akhirnya, keterkaitan antara agama dan politik luar negeri memiliki konsekuensi

positif dan negatif, membentuk cara Amerika terlibat dengan dunia dan nilai-nilai yang ingin dipromosikannya.

Bagi sebagian orang, penggunaan agama dalam membentuk politik luar negeri telah dilihat sebagai cara untuk membawa perubahan positif dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral (Haynes, 2008). Namun, yang lain berpendapat bahwa pencampuran agama dan politik dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman, yang berpotensi memicu ketegangan dan melanggengkan stereotip (Haynes, 2020). Terlepas dari tantangan-tantangan ini, pengaruh agama terhadap politik luar negeri Amerika tetap menjadi perdebatan yang kompleks dan terus berlanjut, dengan implikasi terhadap hubungan global dan upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan di Timur Tengah dan sekitarnya.

5.4 Agama dalam Politik luar negeri Rusia

Rusia telah lama mengintegrasikan agama, terutama Kristen Ortodoks, sebagai bagian dari identitas nasional dan sebagai alat politik luar negeri (Zevelev, 2016). Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa negara Barat tentang potensi dampaknya terhadap stabilitas global dan hak asasi manusia. Gereja Ortodoks Rusia memiliki pengaruh politik yang besar dan bersekutu erat dengan rezim Vladimir Putin. Gereja ini digunakan sebagai pilar identitas nasional Rusia dan sebagai alat untuk memperkuat ambisi geopolitik Kremlin (Petro, 2018). Hubungan erat antara Gereja Ortodoks Rusia dan

pemerintah telah membantu mengukuhkan posisi Rusia sebagai pemain yang kuat di panggung global. Integrasi agama ke dalam politik luar negeri ini berimplikasi pada hubungan Rusia dengan negara-negara lain, terutama di Timur Tengah, di mana agama memainkan peran penting dalam politik dan masyarakat. Karena Rusia terus menegaskan pengaruhnya di kawasan ini, peran Kristen Ortodoks dalam politik luar negerinya akan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam mengupayakan perdamaian dan stabilitas. Sebagai contoh, dukungan Rusia untuk pemerintah Suriah dalam perang saudara yang sedang berlangsung telah didukung oleh hubungannya dengan Gereja Ortodoks Rusia, yang semakin memperkuat kehadirannya di Timur Tengah (Eriksen, 2017). Keselarasan kepentingan agama dan politik ini telah memungkinkan Rusia untuk mempertahankan aliansi strategis di wilayah tersebut dan memberikan pengaruh terhadap para pemain kunci dalam konflik tersebut.

Rusia juga mengadopsi pendekatan multi-kepercayaan, menjalin hubungan dengan berbagai komunitas agama untuk memaksimalkan jangkauan diplomatik global dan potensi kekuatan lunaknya. Pendekatan ini memungkinkan Rusia untuk terhubung dengan berbagai kelompok agama, mulai dari Kristen Ortodoks hingga Muslim, Buddha, dan Yahudi, untuk membangun jembatan dan menumbuhkan pemahaman. Dengan melibatkan berbagai komunitas agama, Rusia dapat mempromosikan toleransi, keragaman, dan kerja sama di

panggung internasional (Drozdova, 2021). Pendekatan multi-kepercayaan ini tidak hanya meningkatkan upaya diplomatik Rusia, tetapi juga menunjukkan komitmen negara terhadap kebebasan beragama dan pluralisme. Selain itu, dengan merangkul beragam perspektif agama, Rusia dapat menavigasi tantangan geopolitik yang kompleks dengan lebih baik dan mendorong perdamaian dan stabilitas di wilayah-wilayah yang memiliki ketegangan agama yang tinggi. bersama. Dengan memfasilitasi percakapan ini, Rusia dapat menunjukkan dedikasinya untuk mempromosikan perdamaian dan

Rusia juga berusaha untuk memperkuat hubungan dengan dunia Islam, terutama di Asia Tengah dan Kaukasus, dengan memosisikan diri sebagai pembela kepentingan Muslim terhadap pengaruh Barat (Antúnez, 2016). Strategi ini memungkinkan Rusia untuk mengembangkan kemitraan yang berharga dengan negara-negara mayoritas Muslim dan mendapatkan pengaruh di wilayah-wilayah di mana keyakinan Islam memainkan peran penting dalam politik dan masyarakat. Dengan terlibat dalam diplomasi Islam, Rusia menunjukkan kesediaannya untuk berkolaborasi dengan berbagai komunitas agama dan bekerja untuk mencapai saling pengertian dan kerja sama dalam skala global. Pada akhirnya, pendekatan ini membantu Rusia menegaskan dirinya sebagai pemain kunci dalam urusan internasional dan mempromosikan kepentingannya sendiri sambil mendorong stabilitas dan dialog di antara negara-negara dengan agama yang berbeda. Sebagai

contoh, Rusia telah membentuk aliansi strategis dengan negara-negara seperti Iran dan Turki, memanfaatkan ikatan agama dan budaya yang sama untuk memajukan tujuan diplomatik di Timur Tengah (Aghaie Joobani & Mousavipour, 2015). Melalui inisiatif seperti menyelenggarakan dialog antaragama dan mendukung program pendidikan Islam, Rusia menunjukkan komitmennya untuk mempromosikan toleransi dan kerja sama lintas agama.

5.5 Kerangka Teori Analisis Pengaruh Agama pada Pembentukan Politik Luar Negeri

Untuk melihat peran serta pengaruh dari agama terhadap politik luar negeri, beberapa perspektif dalam Hubungan Internasional memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain, pada bagian ini akan dijelaskan pandangan dari perspektif realisme, konstruktivisme dan liberalisme terkait agama dalam politik luar negeri.

b. Perspektif Realisme

Realisme sebagai perspektif mainstream dalam disiplin Hubungan Internasional meyakini bahwa struktur internasional bersifat anarki, sehingga tidak ada kekuatan mutlak yang punya otoritas terhadap negara lainnya, setiap negara mesti bertahan dengan kondisi yang anarki tersebut dengan cara melindungi kawasan dan kedaulatan mereka (Queen & Gibson, 2017).

Menurut Sandal dan James meskipun realisme klasik menggunakan konsep *power* dan kepentingan, konsep ini sifatnya masih flexibel. Sehingga makna dari konsep *power* dan kepentingan tidaklah hanya dimaknai sebagai kekuatan dan kepentingan militer. Agama dianggap sebagai elemen signifikan dari budaya yang bisa mempengaruhi dalam mendefinisikan kepentingan. Dalam masyarakat tertentu agama adalah alat yang kuat untuk menyatukan dan juga menjadi bagian dari kepentingan. Terkadang, pemimpin politik bisa menggunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Realisme klasik yang mendasarkan pemikirannya pada *human nature*/ karakter manusia yang menginginkan *power* bisa mengakomodasikan agama baik sebagai variabel independen maupun variabel intervening (Sandal & James, 2011).

Sedangkan menurut realisme struktural, tidak terlalu memberikan perhatian pada variable budaya. Realism Waltz menjelaskan perilaku negara dengan menggunakan konsep *balance of power* adalah teori paling sulit dalam mengakomodasi unsur agama. Pada saat yang sama, penjelasan Stephen Walt tentang *balance of threat* dapat mengakomodasi agama dalam kerangka kerjanya. Agama adalah factor penting dalam mempertimbangkan ancaman dari kekuatan lain dan mengidentifikasi sebagai teman atau musuh. Contohnya, persaingan antara Iran dan Arab Saudi tidak bisa dijelaskan tanpa mempertimbangkan faktor

agama. Para pemikir realisme meyakini bahwa negara selalu berusaha meningkatkan pengaruh mereka terhadap negara lain (Sandal & James, 2011). Agama adalah faktor penting untuk mendapatkan pengaruh di antara negara-negara lain dengan melegitimasi tindakan negara dan dengan menggunakannya sebagai alat kekuasaan. Penyebaran ide-ide agama ke negara lain meningkatkan pengaruh negara di antara mereka, dan menjadi wadah yang potensial untuk pembentukan aliansi (Fox & Sandler, 2004). Agama memfasilitasi negara untuk menciptakan norma internasional untuk melegitimasi aktivitas mereka dan mempengaruhi negara lain.

Sebagai contohnya, banyak negara menggunakan agama sebagai alat politik untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan menyelaraskan diri mereka dengan kelompok agama atau ideologi tertentu, pemerintah dapat menarik sebagian besar penduduk dan memperkuat basis dukungan mereka. Hal ini dapat dilihat di negara-negara seperti Arab Saudi, di mana keluarga yang berkuasa menggunakan asosiasinya dengan Wahabi untuk melegitimasi otoritasnya (Yaakop & Idris, 2017). Selain itu, agama dapat digunakan sebagai alat diplomasi, seperti yang terlihat ketika negara-negara membentuk aliansi berdasarkan keyakinan agama yang sama atau menggunakan retorika agama untuk membenarkan

tindakan mereka di panggung global. Pada akhirnya, keterkaitan antara agama dan politik dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi stabilitas dalam negeri dan hubungan internasional.

c. Perspektif Liberalisme

Akar liberalisme dapat ditelusuri hingga era pencerahan dan karya-karya Immanuel Kant. Tidak seperti realisme, liberalisme tidak menganggap perang sebagai fitur yang tak terelakkan dalam hubungan internasional. Perang dapat diatasi melalui perdagangan internasional, organisasi internasional, dan demokratisasi negara. Meskipun liberalisme menekankan pada kemungkinan kerja sama, namun berbagai aliran dalam teori ini menyarankan cara-cara yang berbeda untuk mencapainya. Fokus dari beberapa aliran, seperti teori perdamaian komersial, adalah pada aspek ekonomi dari hubungan internasional. Oleh karena itu, aliran-aliran liberalisme ini kurang akomodatif terhadap agama dalam kerangka kerjanya. Ada juga kritik terhadap liberalisme atas anggapannya tentang agama sebagai sumber kekerasan dan sistem internasional modern sebagai pendukung perdamaian dan hak asasi manusia (Gorski & Türkmen-Derivoğlu, 2012).

Neoliberalisme lebih dapat menerima variabel agama dibandingkan aliran liberalisme lainnya. Berbeda dengan

realisme, neoliberalisme mengadopsi pendekatan pluralis, yang mengakui aktor non-negara, seperti organisasi dan jaringan keagamaan, sebagai kekuatan signifikan dalam politik internasional. Negara dalam neoliberalisme bukanlah aktor kesatuan, melainkan dipengaruhi oleh dinamika internal dan proses tawar-menawar berbagai aktor domestik (Modongal, 2023).

Neoliberalisme juga mengakui keberadaan banyak agenda, seperti ekonomi, lingkungan, dan agama, di luar keamanan negara. Dengan demikian, teori ini mencakup peran kelompok keagamaan domestik dan organisasi internasional, seperti OKI, yang bekerja secara otonom dan memengaruhi kebijakan negara. Selain itu, rezim internasional, seperti hak asasi manusia, turut dipengaruhi oleh agama, baik dalam memperkuat maupun membatasi universalisasi hak-hak tertentu. Kerangka neoliberalisme berguna untuk memahami peran agama dalam hukum humaniter internasional dan organisasi internasional (Modongal, 2023).

Konsep "soft power" dalam neoliberalisme membantu memahami pengaruh agama. Neoliberalisme tidak membatasi kekuasaan pada kekuatan militer, tetapi melihatnya sebagai kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain. Pengaruh ini bisa berupa "hard power" (militer, ekonomi) atau "soft power" yang berasal dari budaya, nilai politik, serta legitimasi dan otoritas moral (Nye, 2004).

Agama adalah sumber utama soft power, terutama karena pengaruhnya pada budaya dan nilai politik. Negara sering memanfaatkan agama untuk mendapatkan pengaruh di antara negara-negara dengan latar belakang agama yang sama, seperti Saudi Arabia dan India dengan peran agama mereka. Agama juga menjadi sumber nilai politik, seperti ide Gandhi tentang non-kekerasan yang berasal dari latar belakang religiusnya. Selain itu, agama berfungsi untuk melegitimasi tindakan pemerintah dan mendapatkan keunggulan moral, baik di tingkat domestik maupun internasional (Fox & Sandler, 2004). Legitimasi ini berguna untuk meyakinkan pihak lain tentang tindakan negara

d. Perspektif Konstruktivisme

Konstruktivisme muncul pada 1980-an sebagai reaksi terhadap teori Hubungan Internasional seperti neorealisme dan neoliberalisme, dengan fokus pada peran ide dalam membentuk identitas dan kepentingan negara. Wendt menyatakan bahwa "anarki adalah apa yang dibuat oleh negara," menekankan bahwa identitas negara terbentuk melalui interaksi, bukan ditentukan sebelumnya (Wendt, 1992). Karena konstruktivisme menekankan ide dan identitas, agama memiliki potensi besar untuk dijelaskan melalui teori ini, meski peran agama sering terabaikan dalam praktiknya.

Agama merupakan kekuatan yang penting dalam membentuk ide, norma, dan identitas yang memengaruhi tindakan negara. Identitas keagamaan memengaruhi penentuan teman dan musuh, seperti dalam konflik Israel-Palestina, yang tidak bisa dipahami tanpa mempertimbangkan latar belakang agama mereka (Thomas, 2000). Prinsip-prinsip agama juga memberikan dampak pada bantuan kemanusiaan antarnegara, di mana identitas agama sering kali menentukan penerima bantuan (Finnemore, 2015). Agama juga menjadi dasar nasionalisme, seperti nasionalisme Kristen di Polandia atau nasionalisme Islam di Pakistan (Anderson, 2002).

Konstruktivisme menjelaskan bahwa identitas agama dapat memotivasi pemimpin politik untuk bertindak melampaui rasionalitas material, seperti ketika Z. A. Bhutto menyebut senjata nuklir Pakistan sebagai "Bom Islam". Konsep "logika kepatutan" (Barnett, 2005) dalam konstruktivisme menunjukkan bagaimana agama dapat memberikan legitimasi bagi tindakan politik, meskipun legitimasi tersebut tergantung pada penerimaan audiens. Sekolah Kopenhagen dalam konstruktivisme juga mengakomodasi agama melalui konsep "sekuritisasi", yang memandang agama tertentu sebagai ancaman, seperti dalam tesis "clash of civilizations" yang memperkuat Islamophobia di negara Barat (Samuel, 1993). Agama dapat digunakan untuk sekuritisasi kelompok atau negara lain

sebagai ancaman bagi bangsa, dan serangan terhadap minoritas dapat dijelaskan dalam kerangka ini (Savigny & Marsden, 2013).

Ketiga perspektif dalam Hubungan Internasional memberikan pandangan yang beragam tentang peran agama dalam politik luar negeri. Realisme melihat agama sebagai alat politik untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh, baik melalui legitimasi domestik maupun dalam arena internasional. Sementara itu, perspektif liberalisme, khususnya neoliberalisme, mengakui peran agama sebagai sumber soft power yang berpengaruh dalam hubungan antarnegara, serta melibatkan organisasi dan jaringan keagamaan dalam proses politik. Di sisi lain, konstruktivisme menyoroti peran agama dalam membentuk identitas, norma, dan ide yang mempengaruhi tindakan negara serta bagaimana agama dapat memotivasi tindakan politik yang melampaui kalkulasi rasionalitas material. Dengan demikian, peran agama dalam politik luar negeri dapat dipahami melalui beragam lensa teoretis, di mana agama tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai sumber identitas, norma, dan pengaruh yang signifikan dalam interaksi antarnegara.

5.6 Agama dalam Politik luar negeri Indonesia

a. Latar Belakang Historis dan Ideologis

Politik luar negeri Indonesia telah dipengaruhi secara signifikan oleh latar belakang agama, khususnya Islam, sepanjang sejarahnya. Pendekatan Indonesia dalam memasukkan Islam ke dalam politik luar negerinya telah berevolusi di bawah rezim politik yang berbeda dan sebagai respons terhadap perubahan konteks global.

Pada masa awal kemerdekaan, Islam terutama dipandang sebagai identitas dalam politik luar negeri Indonesia (Umar, 2016). Namun, persepsi ini bergeser seiring berjalannya waktu, dengan konsep 'Islam Moderat' yang mulai dikenal, terutama sejak tahun 2004. Kementerian Luar Negeri Indonesia mulai mengkampanyekan 'Islam Moderat' sebagai citra utama Islam Indonesia, yang menggambarkan Islam sebagai sesuatu yang kompatibel dengan demokrasi dan menekankan toleransi (Umar, 2016). Pergeseran ini sebagian dipengaruhi oleh peristiwa 9/11, yang telah menimbulkan kesalahpahaman tentang Muslim secara global (Songbatumis, 2021).

Menariknya, artikulasi Islam dalam politik luar negeri Indonesia telah dibentuk oleh dasar-dasar ideologis masing-masing rezim politik dan wacana hegemonik dalam politik internasional (Umar, 2016). Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono, sebuah identitas

internasional baru diperkenalkan yang memandang Islam sebagai aset, yang menekankan pentingnya Islam moderat sebagai lawan dari ekstremisme (Songbatumis, 2021). Pendekatan ini tidak hanya merupakan hasil dari konsolidasi demokrasi di dalam negeri, tetapi juga merupakan respons terhadap faktor-faktor eksternal.

Latar belakang historis dan ideologis agama dalam politik luar negeri Indonesia mencerminkan interaksi yang kompleks antara dinamika politik dalam negeri, konteks internasional, dan identitas Indonesia yang terus berkembang sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Konsep 'Islam Moderat' telah menjadi elemen kunci dalam diplomasi soft-power Indonesia, yang memposisikan Indonesia sebagai model demokrasi Islam dan mediator dalam isu-isu yang berkaitan dengan Muslim di tingkat global (Hoesterey, 2023a; Songbatumis, 2021)

b. Islam Moderat sebagai Identitas Nasional Indonesia

Indonesia secara aktif mempromosikan konsep Islam Wasathiyah, atau Islam moderat, dalam politik luar negerinya. Konsep ini berfokus pada nilai-nilai moderasi, toleransi, dan perdamaian yang menjadi ciri khas Islam Indonesia. Konsep ini semakin sering digunakan pemerintah Indonesia terutama setelah peristiwa 11/9 dan juga Arab Spring. Kementrian Luar Negeri Indonesia

berusaha untuk menjaga posisi Indonesia sebagai model bagi Islam moderat yang mendemonstrasikan kompatibilitas antara Islam dan demokrasi (Hoesterey, 2023b)

Indonesia secara aktif terlibat dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi dialog lintas agama di tingkat regional dan global untuk mempromosikan pemahaman lintas agama dan berkontribusi pada perdamaian dunia. Indonesia menggunakan dialog lintas agama sebagai salah satu fitur diplomasinya, terutama dalam menanggapi kesalahan persepsi tentang Islam di masyarakat internasional (Benarrivo, 2016). Indonesia memainkan peran penting dalam menyelenggarakan Dialog Lintas Agama ASEM, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai co-sponsor, dan secara konsisten mengimplementasikan agenda-agenda yang relevan di berbagai negara (Benarrivo, 2016). Selain itu, Indonesia telah memprakarsai ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) untuk memajukan ASEAN Culture of Prevention (CoP) dan menyediakan platform bagi pemuda untuk mempromosikan toleransi dan keragaman agama (Kuntjoro-Jakti & Yadav, 2022). Posisi unik Indonesia sebagai negara yang beragam dengan mayoritas penduduk beragama Islam memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan budaya dan agama,

mempromosikan toleransi, dan bekerja menuju dunia yang lebih harmonis.

Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam forum internasional yang berfokus pada perdamaian di dunia Islam, menunjukkan komitmennya dalam mempromosikan stabilitas dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Keterlibatan Indonesia ini terlihat dalam berbagai organisasi dan inisiatif internasional. Partisipasi Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mencerminkan dedikasinya untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina serta mendorong penyelesaian konflik berbasis dialog (Asakir & AlmuBaroq, 2024) Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam menangani isu-isu yang mempengaruhi dunia Islam, seperti perlakuan terhadap minoritas Rohingya di Myanmar (Wahyudi & Niko, n.d.). Indonesia secara konsisten mengutuk tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, memanfaatkan berbagai platform internasional untuk menyuarakan hak asasi manusia.

Menariknya, pendekatan Indonesia terhadap konflik internasional seringkali berbeda dari negara lain. Misalnya, dalam menanggapi krisis Rohingya, Indonesia mengadopsi pendekatan 'diplomasi senyap', yang berfokus pada pemberian bantuan dan kerja sama dengan Myanmar, daripada menerapkan sanksi atau mengejar strategi

keadilan internasional (C. Q. Smith & Williams, 2021). Pendekatan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti humanitarisme Islam, pengalaman Indonesia dalam transisi demokrasi, dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip ASEAN.

Dengan demikian, identitas Islam moderat Indonesia tercermin dalam politik luar negerinya yang mengedepankan nilai-nilai seperti toleransi, perdamaian, dan dialog. Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip Islam moderat dalam pendekatan diplomasi senyapnya, menekankan pentingnya kerja sama dan negosiasi dalam penyelesaian konflik. Hal ini mencerminkan identitas Indonesia sebagai negara Muslim yang moderat, yang tidak hanya mengutamakan kepentingan nasional, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hubungan internasional (Asakir & AlmuBaroq, 2024; C. Q. Smith & Williams, 2021; Wahyudi & Niko, n.d.)

Identitas Islam moderat Indonesia memainkan peran signifikan dalam membentuk pendekatannya dalam mendukung penyelesaian konflik secara damai di Timur Tengah, terutama konflik Palestina-Israel. Komitmen Indonesia untuk menyelesaikan konflik-konflik ini berakar pada kombinasi solidaritas keagamaan, nilai anti-kolonialisme, dan identitas bersama sebagai negara berkembang (Setiawati, 2024; Sidiq et al., 2024). Hal ini

terlihat dari konsistensi advokasi Indonesia untuk kemerdekaan Palestina sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1945 (Setiawati, 2024; Sidiq et al., 2024).

Selain dukungan politik, Indonesia juga secara aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina melalui berbagai program yang dikelola oleh lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia telah menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk bantuan kemanusiaan di Palestina. Nilai kontribusi dana ZIS untuk Palestina berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan distribusi zakat terbesar terjadi pada 2018 sebesar 2.531.430.175,00 rupiah, sementara dana infaq dan sedekah terbesar disalurkan pada 2021 sebesar 597.268.865,00 rupiah (Ridha et al., 2022).

Menariknya, keterlibatan Indonesia dalam isu Palestina tidak terbatas pada pemerintah saja. Berbagai lembaga non-pemerintah dan individu juga berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Indonesia menerapkan pendekatan diplomasi multi-jalur terhadap Palestina dengan tujuan mencapai perdamaian dunia (Rukmana & Kurniawanti, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Secara keseluruhan, bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Palestina mencerminkan komitmen negara dalam

mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di tingkat regional maupun global. Pendekatan ini sejalan dengan strategi diplomasi kemanusiaan Indonesia yang lebih luas, yang juga diterapkan dalam kasus-kasus lain seperti krisis Rohingya (Bounthavong et al., 2023; Marzuki & Tiola, 2021)

c. Agama sebagai Soft Power Indonesia: Diplomasi Haji dan Umrah

Diplomasi haji dan umrah Indonesia berfungsi sebagai alat soft power yang signifikan, yang memanfaatkan status Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk memajukan kepentingan internasionalnya (Saputra, 2023). Diplomasi ini terutama dilakukan melalui Kementerian Agama (KEMENAG), yang telah efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi jemaah haji Indonesia (Renta et al., 2023).

Upaya-upaya yang dilakukan Kemenag antara lain adalah mendapatkan tambahan kuota haji melalui kerja sama dengan Arab Saudi, memastikan persiapan layanan haji yang tepat, mengoptimalkan fungsi kepemimpinan kelompok, dan mengembangkan sistem pelaporan berbasis Android untuk panduan ibadah (Renta et al., 2023). Tindakan-tindakan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan pengalaman ibadah haji bagi

warganya sekaligus memperkuat hubungan bilateral dengan Arab Saudi.

Menariknya, pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan dan peluang bagi diplomasi haji dan umrah Indonesia. Penundaan ibadah haji selama pandemi berdampak pada berbagai sektor di Indonesia, termasuk pemerintah, agen perjalanan, dan jamaah (Bramayudha & Irawan, 2023; Rahmadhanitya & Jatmika, 2021) Namun, situasi ini juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan solusi strategis dan mengevaluasi kembali kebijakannya terkait penyelenggaraan haji dan umrah pasca pandemi (Bramayudha & Irawan, 2023; Rahmadhanitya & Jatmika, 2021).

5.7 Tantangan dalam Politik luar negeri Berbasis Agama

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk menggunakan agama sebagai alat diplomasi, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi:

- a. Pluralitas Agama dan Budaya: Sebagai negara yang sangat majemuk, politik luar negeri Indonesia yang didasarkan pada agama tertentu dapat mengundang kritik baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan solidaritas agama. Sebagai contoh, Indonesia mungkin menghadapi tantangan ketika mencoba

mempromosikan nilai-nilai Islam dalam politik luar negerinya sambil tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara non-Muslim. Selain itu, menavigasi kompleksitas keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda di Indonesia sendiri dapat menyulitkan Indonesia untuk secara efektif mewakili populasi yang beragam di panggung global.

- b. Konflik Identitas dan Kepentingan Nasional: Ada kalanya solidaritas agama bertentangan dengan kepentingan nasional. Sebagai contoh, mendukung negara-negara Muslim dalam konflik tertentu dapat bertentangan dengan prinsip politik bebas aktif Indonesia. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara mempromosikan nilai-nilai Islam dan memprioritaskan kepentingan nasional dalam keputusan politik luar negeri. Menyeimbangkan kedua prioritas ini membutuhkan diplomasi yang cermat dan pengambilan keputusan strategis untuk menavigasi potensi konflik secara efektif.

5.8 Peluang Penguatan Diplomasi Agama

Indonesia memiliki sejumlah peluang untuk memperkuat diplomasi agama sebagai bagian dari politik luar negerinya:

- a. Pemanfaatan *Soft Power*: Dengan memanfaatkan soft power yang berasal dari nilai-nilai Islam moderat, Indonesia dapat memperluas pengaruhnya di dunia internasional, terutama di negara-negara mayoritas

Muslim. Hal ini dapat membantu Indonesia mempromosikan citra positif Islam dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara lain. Selain itu, terlibat dalam dialog dan kerja sama antar agama dapat membantu Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap toleransi beragama dan keberagaman, yang selanjutnya dapat meningkatkan reputasinya di panggung global. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, Indonesia dapat secara efektif menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan kepentingan nasionalnya dalam pengambilan keputusan politik luar negeri, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada dunia yang lebih damai dan sejahtera.

- b. Peran sebagai Mediator: Dengan reputasinya sebagai negara Muslim moderat, Indonesia memiliki peluang untuk bertindak sebagai mediator dalam berbagai konflik berbasis agama, baik di Asia Tenggara maupun Timur Tengah. Indonesia dapat menggunakan posisinya untuk memfasilitasi dialog konstruktif antara pihak-pihak yang bertikai dan mempromosikan pemahaman dan rekonsiliasi. Dengan memanfaatkan statusnya sebagai mediator, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan ini dan sekitarnya. Melalui upaya-upaya ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain

kunci dalam upaya global untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan beragama.

- c. **Diplomasi Budaya:** Indonesia dapat mempromosikan budaya Islam nusantara sebagai bagian dari diplomasi budaya untuk menunjukkan kekayaan tradisi Islam yang toleran dan inklusif. Dengan menampilkan keragaman dan keindahan budaya Islam Indonesia, Indonesia dapat melawan stereotip negatif dan mempromosikan pesan perdamaian dan persatuan. Diplomasi budaya ini dapat membantu membina hubungan positif dengan negara-negara lain dan menciptakan peluang untuk kolaborasi dan saling pengertian. Komitmen Indonesia untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan beragama melalui diplomasi budaya dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

5.9 Kesimpulan

Agama, khususnya Islam, memainkan peran yang signifikan dalam politik luar negeri Indonesia. Sejak masa kemerdekaan hingga era pemerintahan saat ini, agama telah menjadi faktor penting dalam memproyeksikan identitas nasional, terutama dengan mempromosikan Islam moderat atau "Islam Wasathiyah". Melalui pendekatan ini, Indonesia berusaha mempromosikan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan pluralisme di tingkat internasional.

Dalam perspektif hubungan internasional, peran agama dalam politik luar negeri dapat dipahami melalui berbagai pendekatan teoritis: realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Realisme menganggap agama sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional, baik dalam meningkatkan pengaruh domestik maupun internasional. Perspektif liberalisme melihat agama sebagai sumber soft power yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengaruh melalui nilai-nilai dan budaya. Sementara itu, konstruktivisme memandang agama sebagai kekuatan penting dalam membentuk identitas dan norma yang mempengaruhi politik luar negeri.

Diplomasi berbasis agama, seperti diplomasi lintas agama dan diplomasi haji, telah menjadi alat soft power yang penting bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dan membangun pengaruh di kalangan negara-negara mayoritas Muslim. Identitas keagamaan yang diproyeksikan melalui konsep Islam moderat juga telah memperkuat peran Indonesia sebagai mediator dalam berbagai konflik, terutama di dunia Islam. Namun, tantangan seperti pluralitas agama domestik dan konflik kepentingan antara solidaritas agama dan kepentingan nasional menjadi isu yang harus dihadapi dalam menerapkan strategi ini.

Peran agama dalam politik luar negeri Indonesia tidak hanya memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tetapi juga memberikan kontribusi dalam mediasi konflik dan mempromosikan

perdamaian global. Dalam konteks dinamika global saat ini, di mana nilai-nilai dan identitas menjadi bagian integral dalam hubungan internasional, peran agama perlu dioptimalkan dengan kebijakan yang seimbang untuk menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimana peran agama dalam membentuk politik luar negeri Amerika Serikat berubah sejak era Perang Dingin hingga saat ini? Berikan contoh konkrit.
2. Mengapa Rusia memanfaatkan Gereja Ortodoks sebagai bagian dari strategi politik luar negerinya? Apa keuntungan dan risiko dari pendekatan ini?
3. Bagaimana politik luar negeri Arab Saudi dipengaruhi oleh interpretasi Wahhabisme, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan mereka dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah?
4. Dalam konteks politik luar negeri Israel, bagaimana identitas agama Yahudi dan pertimbangan geopolitik saling beririsan? Berikan analisis terkait konflik Israel-Palestina.
5. Bagaimana Indonesia memanfaatkan Islam Wasathiyah dalam diplomasi luar negerinya? Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam upaya ini? Jelaskan.
6. Apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara politik luar negeri yang

berlandaskan agama dengan prinsip politik bebas aktif yang dianut?

Glosarium

Agama dalam Politik luar negeri: Peran dan pengaruh keyakinan agama suatu negara dalam pembentukan, implementasi, dan strategi politik luar negeri.

Retorika Religius: Penggunaan bahasa, simbol, atau nilai-nilai agama oleh pemimpin politik untuk mendukung agenda politik atau diplomatik tertentu.

Islam Wasathiyah: Konsep Islam moderat yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan perdamaian, yang sering dipromosikan oleh Indonesia dalam diplomasi internasionalnya.

Diplomasi Keagamaan: Penggunaan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan diplomatik, seperti menjalin hubungan internasional yang baik, mediasi konflik, dan promosi perdamaian.

Soft Power: Kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai, atau politik luar negerinya, tanpa menggunakan kekuatan militer.

Diplomasi Haji: Strategi diplomasi yang memanfaatkan kegiatan haji sebagai sarana untuk memperkuat hubungan diplomatik dan memajukan kepentingan nasional di dunia Islam.

Moderate Muslim Democracy: Konsep yang diusung Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang menerapkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi, sebagai contoh bagi dunia Islam.

Pluralitas Agama: Keberagaman agama dan keyakinan di suatu negara yang dapat mempengaruhi politik luar negerinya, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki banyak agama dan suku.

Konflik Sektarian: Ketegangan atau konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok agama yang berbeda, misalnya antara Sunni dan Syiah, yang dapat berdampak pada stabilitas regional dan politik luar negeri.

Politik Bebas Aktif: Prinsip politik luar negeri Indonesia yang menekankan kemerdekaan dalam menentukan sikap dan politik luar negeri tanpa terikat oleh blok atau kekuatan besar tertentu, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

BAB 6**POLITIK LUAR NEGERI
INDONESIA: ANALISIS PERAN
MEDIA****6.1 Pengantar**

Bab ini membahas bagaimana media, sebagai alat komunikasi massa, memainkan peran strategis dalam membentuk dan memengaruhi politik luar negeri Indonesia. Media tidak hanya melaporkan berita tetapi juga membingkai narasi, mengarahkan persepsi publik, dan berfungsi sebagai alat diplomasi publik. Dalam politik luar negeri Indonesia, media digunakan untuk membangun citra positif di dunia internasional dan mendukung kepentingan nasional, termasuk dalam konteks krisis internasional seperti pandemi COVID-19.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis peran media dalam mendukung diplomasi Indonesia, memahami pengaruh framing isu oleh media terhadap opini publik dan kebijakan pemerintah, serta mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi internasional Indonesia di era digital. Bab ini memberikan gambaran bagaimana media tradisional dan media sosial telah digunakan oleh pemerintah untuk mengkomunikasikan posisinya dalam isu-isu seperti sengketa Laut China Selatan dan diplomasi vaksin selama pandemi. Selain itu, pembahasan meliputi tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengontrol narasi di

tengah informasi yang terdistorsi di era digital, yang dapat memengaruhi reputasi internasional. Dengan analisis ini, mahasiswa dapat mengevaluasi bagaimana strategi komunikasi yang terencana dapat memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global.

6.2 Peran Media dalam Hubungan Internasional

Media memainkan peran penting dalam politik luar negeri. Selain memengaruhi opini publik, media juga berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk menyebarkan propaganda dan mengendalikan informasi yang diterima masyarakat. Pengaruh media dalam politik luar negeri sangat signifikan, karena melalui berbagai bentuknya, media dapat membingkai narasi serta mengarahkan persepsi masyarakat terhadap peristiwa internasional (Tereshchuk, 2017). Dengan mengendalikan informasi yang disebarkan, pemerintah dapat memanfaatkan media untuk membangun citra nasional yang positif di dunia internasional serta menggalang dukungan domestik terhadap politik luar negerinya.

Media tidak hanya sekadar melaporkan berita, tetapi juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi pembingkaihan isu-isu global, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap negara-negara lain dan politik luar negeri yang ditempuh (Pahlavi, 2007). Sebagai contoh, dengan menyoroti aspek-aspek tertentu dari sebuah konflik atau peristiwa diplomatik, media mampu membentuk opini publik sehingga mendukung atau menolak

langkah-langkah yang diambil pemerintah. Selain itu, media juga dapat memperkuat sentimen nasionalisme atau sebaliknya, menciptakan sikap skeptis terhadap politik luar negeri. Dalam konteks diplomasi publik, media digunakan untuk memperkuat hubungan antarnegara melalui pemberitaan yang positif, penyampaian pesan diplomatik, dan pencegahan misinformasi yang dapat merusak hubungan bilateral. Pada akhirnya, media menjadi jembatan penting dalam membentuk pemahaman publik terhadap politik luar negeri, baik secara lokal maupun global, sehingga mempengaruhi stabilitas dan kebijakan politik yang lebih luas.

Bab ini akan membahas bagaimana media mempengaruhi politik luar negeri dari berbagai perspektif teoretis, termasuk perspektif realisme, liberalisme, teori kritis, dan konstruktivisme. Setiap pendekatan akan memberikan wawasan tentang bagaimana peran media dapat mendukung atau membatasi pelaksanaan politik luar negeri. Selain itu, bab ini akan mengeksplorasi batasan serta potensi pengaruh media dalam membentuk arah politik luar negeri suatu negara. Bagaimanapun, pengaruh media tidaklah seragam; peran serta efektivitasnya sangat bergantung pada konteks politik, budaya, dan ekonomi dari negara yang bersangkutan, serta bagaimana pemerintah dan aktor-aktor media bekerja sama atau berkonflik untuk membentuk narasi politik. Secara khusus, bab ini juga akan menjelaskan bagaimana media mempengaruhi politik luar negeri di Indonesia, termasuk strategi yang digunakan

pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan media untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional di panggung dunia. Pembahasan ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara media dan politik luar negeri dalam konteks Indonesia.

6.3 Media dalam Pandangan Perspektif Hubungan Internasional

a. Realisme

Dalam perspektif Realisme Struktural (Neorealisme), media dianggap memiliki pengaruh yang terbatas dalam politik luar negeri karena negara-negara bertindak di bawah struktur sistem internasional yang anarkis. Sistem ini memaksa setiap negara untuk mencari keamanan melalui usahanya sendiri dan memprioritaskan kelangsungan hidup di atas segalanya. Prioritas utama negara adalah mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan internasional yang tidak teratur, di mana tidak ada otoritas pusat yang dapat menjamin keamanan kolektif. Oleh karena itu, politik luar negeri dirancang berdasarkan kalkulasi kekuatan dan ancaman, bukan tekanan domestik, opini publik, atau media. Media tidak dianggap penting dalam pemahaman politik dunia menurut realisme struktural, karena tindakan negara ditentukan oleh kepentingan nasional yang tetap dan tidak berubah (Queen & Gibson, 2017).

Contoh yang sering dikutip dalam kerangka kerja ini adalah Perang Dingin, di mana Amerika Serikat merancang

politik luar negerinya terutama untuk mengatasi ancaman dari Uni Soviet, meskipun media sering melaporkan isu-isu yang berkaitan dengan ketegangan perang nuklir atau hak asasi manusia (Pahlavi, 2007; Tereshchuk, 2017). Terlepas dari pengaruh media, kebijakan inti tetap berpusat pada logika keseimbangan kekuatan atau *balance of power* dan pengekangan terhadap blok Timur. Hal yang sama dapat dilihat pada kasus invasi AS ke Irak pada tahun 2003. Pada saat itu, media global, termasuk media domestik AS, bersikap skeptis terhadap invasi tersebut, terutama terkait kurangnya bukti mengenai senjata pemusnah massal. Namun, keputusan untuk berperang didorong oleh kalkulasi strategis mengenai keamanan AS di Timur Tengah, bukan oleh opini yang dibentuk oleh media. Dengan kata lain, politik luar negeri AS ditentukan oleh kebutuhan strategis di bawah sistem internasional yang anarkis, dan media hanya memainkan peran kecil dalam membentuk keputusan tersebut (Wivel, 2024).

Dalam pandangan kaum neorealis seperti Kenneth Waltz, yang dalam bukunya *Theory of International Politics* menekankan bahwa perilaku negara didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup, media dan faktor domestik lainnya dianggap tidak penting. Demikian pula, John Mearsheimer, dalam *The Tragedy of Great Power Politics*, menggarisbawahi bahwa negara harus terus mencari kekuasaan untuk menjamin keamanan mereka, dan politik luar negeri pada akhirnya selalu terkait dengan strategi negara untuk mempertahankan

posisinya dalam sistem internasional (Queen & Gibson, 2017). Oleh karena itu, meskipun media dapat membentuk persepsi publik atau menciptakan diskusi domestik, negara tetap bertindak sesuai dengan kalkulasi kepentingan nasional yang tetap, terutama dalam konteks keamanan

Realisme klasik memiliki pendekatan yang berbeda dengan Realisme Struktural dalam memahami peran media dalam politik luar negeri. Meskipun masih memandang negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional, realisme klasik mengakui bahwa media dapat memainkan peran penting dalam memperkuat negara dalam mengejar kepentingan nasionalnya (Frei, 2018). Dalam pandangan ini, media bukanlah aktor utama yang mempengaruhi politik luar negeri, tetapi berfungsi sebagai alat untuk mendukung narasi negara, terutama dalam memperkuat legitimasi tindakan politik luar negeri di hadapan publik domestik dan internasional. Meskipun media memiliki fungsi ini, fokus utamanya tetap pada bagaimana institusi negara, seperti eksekutif dan militer, memainkan peran sentral dalam menjaga keamanan dan kepentingan nasional.

Sebagai contoh, selama Perang Vietnam, pemerintah Amerika Serikat menggunakan media untuk menyebarkan narasi bahwa perang tersebut merupakan bagian dari perjuangan global melawan komunisme. Media pada tahap awal konflik berfungsi untuk memperkuat politik luar negeri pemerintah dengan melaporkan narasi resmi tentang ancaman komunis dan perlunya keterlibatan militer AS di Vietnam (An

Luong & Vu, 2022). Namun, seiring berjalannya waktu, ketika realitas perang menjadi semakin tidak sesuai dengan narasi yang dibangun oleh negara, media mulai melaporkan gambaran yang berbeda, yang pada akhirnya mempengaruhi opini publik secara negative (An Luong & Vu, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dalam realisme klasik, media dapat mendukung negara, namun juga berpotensi menjadi kritis jika politik luar negeri tidak lagi sesuai dengan realitas yang mereka laporkan.

Menurut Hans Morgenthau, salah satu pemikir utama realisme klasik, dalam bukunya *Politics Among Nations*, politik internasional digerakkan oleh kepentingan nasional yang didefinisikan sebagai kekuasaan (Frei, 2018). Media, dalam konteks ini, dapat membantu negara dalam memperkuat kepentingan nasional dengan membentuk persepsi publik tentang legitimasi politik luar negeri. Namun, Morgenthau menekankan bahwa media hanyalah salah satu instrumen yang digunakan oleh negara dalam permainan kekuasaan yang lebih besar, di mana kepentingan negara tetap menjadi prioritas utama.

Dengan demikian, meskipun realisme klasik mengakui peran media dalam memperkuat politik luar negeri, terutama dalam hal mendukung narasi negara, namun yang menjadi perhatian utama tetaplah peran institusi negara dalam menjaga keamanan dan kepentingan nasional. Media dipandang sebagai pelengkap dalam upaya negara untuk mengamankan posisinya dalam sistem internasional. Media dilihat sebagai bagian dari

instrumen negara yang digunakan untuk melegitimasi politik luar negeri. Negara bertindak sesuai dengan kepentingan kekuasaan dan keamanan, dan media membantu memfasilitasi strategi tersebut dengan menyebarkan narasi yang konsisten dengan tujuan negara. Hal ini terutama terlihat dalam konteks perang dan konflik, di mana narasi tentang keamanan nasional sering digunakan sebagai alasan untuk tindakan militer, dan media berperan dalam memperkuat urgensi dan legitimasi tindakan tersebut kepada publik.

b. Liberalisme

Teori Perdamaian Demokratis berargumen bahwa negara-negara demokratis cenderung menghindari perang, terutama karena dalam negara demokrasi, keputusan untuk melakukan tindakan militer membutuhkan persetujuan dari publik (Chan, 2017). Proses ini didasarkan pada prinsip bahwa pemerintah yang demokratis bertanggung jawab kepada warga negaranya, yang memiliki kekuatan melalui pemilihan umum untuk mendukung atau menolak kebijakan, termasuk politik luar negeri. Dalam konteks ini, media memainkan peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, dengan menyebarkan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Di negara-negara demokratis, media juga berfungsi untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta

memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk politik luar negeri (Renedo-Farpón et al., 2022).

Dalam teori perdamaian demokratis, Michael Doyle dalam bukunya *Ways of War and Peace* menjelaskan bahwa negara demokrasi memiliki mekanisme internal yang membuat mereka lebih sulit untuk terlibat dalam perang (Doyle, 1997), termasuk melalui keterlibatan media dalam memantau tindakan pemerintah. Doyle juga menyoroti bahwa media di negara demokratis tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membentuk opini publik yang dapat mempengaruhi keputusan politik luar negeri.

Dengan demikian, media di negara-negara demokratis tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan militernya. Ketika pemerintah harus mendapatkan persetujuan publik untuk berperang, media memainkan peran kunci dalam menyediakan informasi yang memungkinkan warga negara untuk membuat keputusan yang beralasan tentang apakah akan mendukung atau menentang tindakan militer.

Dalam perspektif liberal pluralis, terdapat hubungan timbal balik antara media dan negara, di mana keduanya dapat saling mempengaruhi, termasuk dalam politik luar negeri. Media memiliki kapasitas untuk mempengaruhi keputusan politik luar negeri dengan menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan memberikan tekanan pada pemerintah.

Namun, pengaruh ini tidak selalu bersifat satu arah. Negara juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi media melalui kontrol langsung, menyusun narasi, atau mengatur akses terhadap informasi (Oso, 2013). Interaksi ini bergantung pada konteks sosial dan politik yang lebih luas, seperti tingkat kebebasan pers, struktur politik dalam negeri, serta dinamika ekonomi dan geopolitik.

Robert Putnam dalam teorinya tentang Two-Level Games mengemukakan bahwa interaksi antara kebijakan domestik dan internasional bersifat dinamis, di mana pemerintah harus merespons tekanan domestik seperti opini publik yang dipengaruhi oleh media, sembari menjaga kepentingan nasional di kancah internasional (Putnam, 2019). Dalam konteks ini, hubungan timbal balik antara media dan pemerintah sangat bergantung pada keseimbangan antara kebutuhan domestik dan kepentingan strategis global.

Dengan demikian, pengaruh media terhadap politik luar negeri dalam perspektif pluralis sangat bergantung pada konteks sosial dan politik. Di negara-negara demokrasi yang lebih terbuka, media cenderung memiliki lebih banyak kebebasan untuk mempengaruhi kebijakan melalui liputan kritis dan pengawasan terhadap pemerintah. Namun, dalam situasi di mana negara memiliki kontrol yang lebih besar terhadap media, seperti di negara-negara otoriter atau dalam situasi konflik, pengaruh media terhadap politik luar negeri dapat dibatasi atau bahkan dibalik.

c. Teori Kritis

Media sering kali berfungsi sebagai alat propaganda untuk mendukung narasi negara Barat sebagai kekuatan perdamaian, meskipun banyak tindakan mereka lebih didorong oleh kepentingan pribadi. Media membantu memperkuat citra positif negara di mata publik, menampilkan aksi politik luar negeri sebagai upaya menjaga keamanan global, menegakkan hak asasi manusia, atau memajukan demokrasi (Herman, 1988). Dalam prosesnya, media kerap meminimalkan pemberitaan yang mengungkap motif tersembunyi, seperti dominasi ekonomi atau penguasaan sumber daya. Dengan menyajikan narasi yang selektif, media berperan memperkuat legitimasi tindakan negara di hadapan publik, sehingga politik luar negeri yang sebenarnya kontroversial tetap mendapatkan dukungan.

Model Propaganda yang dikembangkan oleh Edward Herman dan Noam Chomsky dalam "Manufacturing Consent" (1988) menunjukkan bagaimana media di negara-negara Barat sering digunakan untuk mendukung kepentingan elit politik dan ekonomi. Melalui mekanisme seperti pemilihan isu, pembingkaihan, dan pengendalian akses informasi, media membantu mengarahkan opini publik untuk mendukung politik luar negeri yang sejalan dengan kepentingan elit, seringkali dengan menutupinya menggunakan nilai-nilai seperti keamanan atau demokrasi (Herman, 1988). Media, dalam hal ini, berfungsi bukan sebagai pengawas independen, tetapi

sebagai alat propaganda yang memperkuat citra positif negara, meskipun kebijakan tersebut didasarkan pada kepentingan egois terkait kekuasaan dan sumber daya.

Baik pendekatan kritis maupun realis mengakui bahwa media dan opini publik cenderung tunduk pada kepentingan negara, merefleksikan dan menyebarkan kepentingan elit. Media lebih sering bertindak untuk memperkuat kekuasaan negara dan mempertahankan status quo daripada menjadi pengawas independen yang melayani kepentingan publik. Kritik terhadap peran media ini menyoroti bagaimana informasi disaring untuk mendukung narasi resmi negara, terutama dalam konteks politik luar negeri. Ketergantungan media pada akses informasi dari pemerintah, hubungan dengan pengiklan korporat, dan tekanan politik lainnya membuat media memprioritaskan kepentingan elit di atas kritik yang obyektif.

Chomsky dan Herman menyoroti adanya "filter" yang mengatur isu-isu yang diangkat media, yang pada akhirnya cenderung mendukung narasi elit (Alford, 2015). Ketergantungan media pada pemerintah dan perusahaan besar untuk mendapatkan iklan dan akses informasi mempengaruhi bagaimana berita dipilih dan dilaporkan. Salah satu contoh adalah konflik Falklands tahun 1982, di mana media Inggris membantu membingkai intervensi militer sebagai pembelaan kepentingan nasional, menggambarkan Argentina sebagai agresor dan Inggris sebagai pihak yang sah. Liputan seperti ini membantu pemerintah Inggris mendapatkan dukungan publik,

dengan mengabaikan motivasi geopolitik yang lebih kompleks (Parr, 2014).

Dalam konteks yang lebih luas, media sering berfungsi sebagai alat pembentukan konsensus. Media tidak netral, melainkan menjadi instrumen elit politik dan ekonomi untuk memanipulasi opini publik dan menciptakan kesan adanya konsensus yang mendukung kebijakan tertentu. Contohnya adalah kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada 2018, ketika pemerintahan Donald Trump berusaha membatasi imigrasi dengan narasi keamanan nasional. Media seperti Fox News sering memperkuat narasi ini, membantu menciptakan dukungan publik terhadap kebijakan-kebijakan keras, meskipun mendapat kritik dari kelompok hak asasi manusia (Giagnoni, 2019).

Contoh lain dapat ditemukan dalam krisis keuangan global 2008. Media cenderung membingkai krisis tersebut sebagai hal yang tak terhindarkan, dan fokus pada solusi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan besar serta pemerintah (Ho, 2019). Kritik mendalam terhadap kebijakan neoliberal yang menjadi akar masalah krisis jarang mendapat perhatian. Liputan media lebih mendukung solusi yang diusulkan elit sebagai satu-satunya pilihan yang rasional, mengesampingkan alternatif lain yang mungkin lebih radikal.

Secara keseluruhan, penciptaan konsensus melalui media adalah proses di mana pandangan dan kepentingan elit politik dan ekonomi diformulasikan sehingga diterima sebagai

kebenaran oleh masyarakat luas. Media bertindak sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi dan membentuk opini publik, yang sering kali membatasi ruang kritik dan mengekang pandangan alternatif yang mungkin bertentangan dengan kepentingan elit.

6.4 Media dalam Politik luar negeri Indonesia

a. Latar Belakang dan Peran Media di Indonesia

Media di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan era reformasi dan demokratisasi sejak tahun 1998. Dengan meningkatnya kebebasan pers dan munculnya media baru seperti media sosial, media menjadi salah satu aktor penting dalam membentuk opini publik dan politik luar negeri (Suriyanto, 2020). Media di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun citra publik dan diplomasi yang dapat mempengaruhi persepsi dunia internasional terhadap Indonesia.

Hal ini sangat penting dalam ranah politik luar negeri, di mana media memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana Indonesia dipersepsikan di panggung global. Media dapat membantu mempromosikan kepentingan, nilai, dan prioritas Indonesia kepada masyarakat internasional, serta menyediakan platform untuk debat publik dan diskusi mengenai isu-isu politik luar negeri yang penting. Dengan demikian, media dapat berperan sebagai alat yang ampuh untuk

mempengaruhi dan membentuk tujuan dan strategi politik luar negeri Indonesia.

Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas aktif, yang berarti bahwa Indonesia tidak terikat pada blok manapun dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia (Anwar, 1994). Dalam konteks ini, media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi mengenai posisi dan kebijakan Indonesia di panggung internasional. Media membantu memperkuat diplomasi publik Indonesia dengan menyampaikan pesan-pesan yang mendukung politik luar negeri dan mempromosikan citra positif Indonesia.

b. Media dan Diplomasi Publik Indonesia

Diplomasi publik merupakan upaya negara untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat internasional dalam rangka membangun hubungan yang positif dan mempengaruhi opini global. Media, khususnya media sosial, menjadi salah satu alat penting dalam diplomasi publik ini. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah memanfaatkan berbagai platform media untuk menyampaikan pesan diplomasi, seperti Twitter, Instagram, dan YouTube.

Sebagai contoh, ketika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2019-2020, Kementerian Luar Negeri menggunakan media sosial untuk mempromosikan peran Indonesia di forum internasional. Melalui kampanye di media

sosial, Indonesia menyampaikan komitmennya terhadap perdamaian dunia, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan WNI di luar negeri. Kampanye ini berhasil meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang aktif dalam diplomasi multilateral dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip internasional (Sitamala, 2020).

Contoh lainnya media sebagai alat diplomasi public dari pemerintah Indonesia adalah penggunaan media twitter untuk mempengaruhi opini public mengenai politik luar negeri Indonesia terkait lingkungan. Twitter telah muncul sebagai alat yang signifikan dalam strategi politik luar negeri Indonesia, terutama melalui penggunaan diplomasi digital, atau “Twiplomacy,” oleh Kementerian Luar Negeri (@Kemlu_RI) (Wuryandari, 2017a). Pendekatan ini memanfaatkan kemampuan komunikasi real-time dan jangkauan yang luas dari platform tersebut untuk berinteraksi dengan audiens domestik dan internasional. Penelitian telah menunjukkan bahwa Kemlu secara efektif menggunakan metode seperti tagar populer, kolaborasi dengan influencer, dan analisis jejaring sosial untuk memperkuat pesannya dan meningkatkan keterlibatan pengguna dibandingkan dengan bentuk komunikasi tradisional (Atmojo et al., n.d.). Penggunaan Twitter yang strategis ini memungkinkan pemerintah Indonesia untuk membingkai dan mempromosikan prioritas politik luar negerinya, terutama dalam isu-isu lingkungan, sehingga dapat membentuk persepsi publik dan menciptakan citra internasional yang positif.

Kementerian Luar Negeri, melalui akun Twitter yang dikelola oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (@Menlu_RI), secara rutin mengunggah informasi terbaru mengenai inisiatif lingkungan hidup dan upaya kerja sama internasional Indonesia. Tweet-tweet tersebut menyoroti komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, transisi menuju ekonomi hijau, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, selama KTT G20, seruan Presiden Joko Widodo untuk melakukan aksi global terkait ekonomi hijau disebarkan dan dibahas secara luas di Twitter, yang menunjukkan peran platform ini dalam menyebarkan pesan-pesan kebijakan utama (Madu, 2021). Selain itu, Kementerian ESDM juga telah menggunakan Twitter untuk mengumumkan kemitraan dengan negara-negara seperti Cina, Norwegia, dan Finlandia dalam proyek-proyek energi hijau (Aos Yuli Firdaus & Harun Umar, 2022), yang semakin menggarisbawahi sikap proaktif Indonesia dalam isu-isu lingkungan dan keterlibatannya dalam diplomasi lingkungan internasional.

Penggunaan Twitter ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memfasilitasi komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan adanya umpan balik dan interaksi secara real-time. Keterlibatan publik terhadap tweet-tweet tersebut, seperti like, retweet, dan komentar, menunjukkan dukungan dan ketertarikan yang signifikan terhadap kebijakan lingkungan hidup Indonesia, yang mengindikasikan keefektifan platform ini dalam memobilisasi

opini publik dan mendorong dialog mengenai isu-isu penting. Sebagai contoh, tweet tentang pertemuan bilateral yang membahas kerja sama lingkungan sering kali mendapat tanggapan positif, yang mencerminkan persetujuan dan kesadaran publik terhadap upaya Indonesia untuk mengatasi tantangan lingkungan global.

Selain itu, Twitter memungkinkan pemerintah Indonesia untuk berinteraksi dengan audiens global, mempromosikan inisiatif lingkungan dan mencari dukungan internasional. Sebagai contoh, selama diskusi mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tweet dari @Menlu_RI menekankan komitmen Indonesia untuk mencapai target lingkungan hidup dan memperkuat kemitraan global. Unggahan semacam itu tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga memposisikan Indonesia sebagai pemain proaktif dalam diplomasi lingkungan global.

Sebagai kesimpulan, Twitter telah menjadi platform yang kuat bagi pemerintah Indonesia untuk mempromosikan agenda politik luar negerinya, khususnya di bidang diplomasi lingkungan. Dengan memanfaatkan diplomasi digital strategis melalui akun Twitter Kementerian Luar Negeri, Indonesia secara efektif mengkomunikasikan inisiatif kebijakannya, berinteraksi dengan publik, dan membangun dukungan internasional. Pendekatan diplomasi modern ini menggambarkan bagaimana media sosial dapat meningkatkan praktik diplomasi tradisional, memungkinkan keterlibatan yang

lebih dinamis, transparan, dan inklusif dengan audiens domestik dan global.

c. Peran Media dalam Pemerintahan Orde Baru

Peran media dalam politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru, khususnya selama masa kekuasaan Presiden Suharto adalah sebagai alat bagi penguasa. Pemerintah Indonesia menerapkan kontrol yang ketat terhadap media, baik domestik maupun asing, untuk menjaga citra positif negara dan meminimalisir pemberitaan yang berpotensi mengganggu stabilitas politik (Jenkins, 1986). Sensitivitas pemerintah terhadap pemberitaan terutama terjadi pada isu-isu seperti korupsi, hak asasi manusia, dan peran militer, yang dianggap berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik.

Media domestik diharapkan berfungsi sebagai alat untuk mendukung pembangunan nasional dan stabilitas, bukan sebagai pengawas independen. Pemerintah menuntut media untuk menyampaikan informasi yang konstruktif dan mempromosikan ideologi Pancasila. Kritik terhadap pemerintah umumnya diperbolehkan, tetapi hanya terbatas pada aspek-aspek yang tidak menyentuh inti kebijakan pemerintah atau mengancam posisi kekuasaan elit politik. Oleh karena itu, media sering kali melakukan swasensor untuk menghindari konflik dengan pemerintah (Jenkins, 1986).

Kontrol terhadap media juga dilakukan melalui mekanisme lisensi. Setiap penerbitan harus memiliki izin usaha

(SIUPP) yang dapat dicabut sewaktu-waktu jika pemerintah menilai media tersebut tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Selain itu, budaya "telepon" dari pejabat tinggi seringkali digunakan untuk mengarahkan pemberitaan atau mencegah publikasi informasi tertentu (Jenkins, 1986). Praktik ini menyebabkan media di Indonesia lebih sering mengikuti arahan pemerintah daripada menyuarakan aspirasi publik secara independen.

Jurnalis asing yang bekerja di Indonesia juga harus berhati-hati dalam menyampaikan laporan mereka (Sumiati, 2020). Pemerintah memberlakukan pembatasan ketat pada topik-topik tertentu, seperti kepentingan bisnis keluarga presiden, peran militer, serta isu-isu yang dapat memicu ketegangan etnis dan agama. Banyak jurnalis asing yang diusir dari Indonesia karena melanggar aturan ini, dan mereka yang ingin tetap berada di Indonesia seringkali kali harus menyesuaikan pemberitaan mereka agar sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia menggunakan media sebagai alat propaganda untuk mendukung kebijakan politik luar negeri dan domestiknya. Media berperan dalam menciptakan narasi yang mendukung legitimasi pemerintah dan membatasi ruang kritik. Dengan kontrol yang ketat terhadap media, pemerintah Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas politik, tetapi pada saat

yang sama membatasi kebebasan pers dan akses publik terhadap informasi yang objektif dan berimbang.

d. Pengaruh Media Sosial dalam Perlindungan WNI di Luar Negeri

Media sosial telah menjadi alat penting dalam politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatik Indonesia di seluruh dunia telah secara efektif memanfaatkan platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram untuk menyebarkan informasi penting dan memberikan bantuan selama krisis. Hal ini terlihat jelas selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020, ketika Kementerian Luar Negeri meluncurkan strategi penjangkauan digital yang komprehensif untuk membantu WNI yang terdampak atau terdampak pandemi di berbagai negara (Elyta et al., 2023).

Selama bulan-bulan awal pandemi, ketika pembatasan perjalanan dan karantina wilayah diberlakukan secara global, Kementerian Luar Negeri (@Kemlu_RI) menggunakan media sosial untuk memberikan informasi kepada WNI mengenai situasi yang berkembang di berbagai negara. Akun Twitter Kemlu yang memiliki lebih dari 1,5 juta pengikut ini memberikan informasi terkini mengenai pembatalan penerbangan, peraturan karantina, dan layanan kedutaan (Maulida, 2021). Selain itu, Kemlu juga membentuk pusat krisis dan saluran bantuan khusus, yang informasinya disebarakan

secara luas di media sosial, untuk memastikan bahwa WNI di luar negeri dapat mengakses bantuan jika mereka membutuhkan bantuan untuk kembali ke tanah air atau menangani masalah mendesak lainnya (Kemlu RI, 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa beberapa tagar menjadi sangat menonjol dalam kampanye media sosial COVID-19 di Indonesia. Subekti dan Suranto (2021) menyebutkan bahwa #SocialDistancing, #jagajarak, dan #pakaimasker merupakan beberapa tagar paling populer yang digunakan dalam kampanye protokol kesehatan di Twitter (Dimas Subekti & Suranto, 2021). Selain itu, tagar lainnya seperti #lawanCovid19 (Lawan Covid-19), #ayovaksin (ayo vaksin), dan #ayopakaimasker (ayo pakai masker) dalam kampanye melawan COVID-19 di Twitter (Putri & Khan, 2023)

Selain upaya repatriasi, media sosial juga digunakan untuk memberikan informasi kesehatan yang krusial dan update mengenai ketersediaan layanan dukungan lokal. Kedutaan besar dan konsulat Indonesia menggunakan platform seperti Facebook dan Instagram untuk membagikan informasi tentang lokasi tes COVID-19 lokal, ketersediaan rumah sakit, dan panduan tentang cara mengakses bantuan darurat. Sebagai contoh, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia secara aktif menggunakan halaman Facebook-nya untuk menginformasikan kepada masyarakat Indonesia tentang layanan kesehatan, termasuk opsi telemedicine dan inisiatif bantuan masyarakat, yang menjangkau lebih dari 200.000

pengikut (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, 2020).

Kementerian Luar Negeri, melalui saluran media sosialnya, berkolaborasi dengan organisasi masyarakat dan kelompok diaspora Indonesia untuk mendistribusikan makanan, pasokan medis, dan alat pelindung diri kepada mereka yang membutuhkan. Pendekatan kolaboratif yang difasilitasi oleh media sosial ini memungkinkan respons yang lebih terkoordinasi dan efektif, sehingga bantuan dapat menjangkau lebih banyak orang secara tepat waktu. Kementerian Kesehatan juga menggunakan media sosial untuk menyoroti kisah-kisah sukses dan mendorong masyarakat Indonesia di luar negeri untuk tetap waspada dan mengikuti protokol kesehatan setempat, sehingga menumbuhkan rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama di antara diaspora Indonesia.

Dampak dari upaya media sosial ini cukup signifikan. Sebuah survei yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada tahun 2021 menemukan bahwa 85% masyarakat Indonesia di luar negeri yang menggunakan media sosial selama pandemi merasa bahwa informasi yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri bermanfaat dan tepat waktu. Survei tersebut juga mengindikasikan bahwa keterlibatan media sosial Kemlu yang proaktif berdampak positif pada persepsi terhadap ketanggapan

dan efektivitas pemerintah dalam melindungi warganya selama krisis (CSIS, 2021).

Penggunaan media sosial yang strategis ini tidak hanya menunjukkan kemampuan beradaptasi Kemlu dalam memanfaatkan platform digital untuk perlindungan warga negara, tetapi juga menyoroti potensi media sosial sebagai alat diplomasi. Dengan menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses, Kemlu dapat membangun kepercayaan dan menjaga hubungan yang kuat dengan masyarakat Indonesia di luar negeri, bahkan di tengah krisis global. Keberhasilan penggunaan media sosial untuk perlindungan WNI selama pandemi telah menjadi preseden bagi strategi komunikasi diplomatik di masa depan, yang menekankan pentingnya diplomasi digital dalam memenuhi kebutuhan dan keprihatinan WNI di tengah lingkungan global yang terus berubah dengan cepat.

Sebagai kesimpulan, penggunaan media sosial oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan misi diplomatiknya selama pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana platform digital dapat secara efektif mendukung politik luar negeri yang berfokus pada perlindungan warga negara. Dengan menyediakan informasi yang tepat waktu, memfasilitasi repatriasi, dan menawarkan layanan dukungan, Kemlu dapat merespons kebutuhan WNI di luar negeri secara efisien dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kemampuan pemerintah untuk melindungi warga negaranya, tetapi juga

menunjukkan peran media sosial dalam diplomasi modern, di mana komunikasi yang tepat waktu dan transparan sangat penting dalam mengelola krisis dan menjaga kepercayaan publik.

6.5 Tantangan dan Peluang Penggunaan Media dalam Politik luar negeri Indonesia

Meskipun media memiliki potensi besar untuk mendukung politik luar negeri, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Pertama, kebebasan pers yang semakin meluas di Indonesia memungkinkan munculnya berbagai narasi yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan resmi pemerintah. Media juga dapat menjadi alat bagi aktor-aktor tertentu untuk mempengaruhi politik luar negeri dengan cara-cara yang tidak selalu konstruktif. Namun, tantangan-tantangan ini juga menghadirkan peluang untuk inovasi dan kreativitas dalam cara politik luar negeri dikomunikasikan dan diimplementasikan. Dengan melibatkan berbagai macam media dan pemberi pengaruh, pemerintah dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan membentuk opini publik secara lebih efektif. Selain itu, munculnya platform media sosial menyediakan saluran langsung bagi pemerintah untuk terhubung dengan warga negara dan terlibat dalam komunikasi dua arah, mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik luar negeri. Pada akhirnya, meskipun media dapat menimbulkan hambatan, media juga

menawarkan jalan baru bagi diplomasi dan hubungan internasional untuk berkembang di era digital.

Kedua, perkembangan media sosial yang pesat juga menghadirkan tantangan dalam hal penyebaran disinformasi atau berita palsu (hoax). Informasi yang tidak akurat dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi publik, baik di dalam maupun di luar negeri, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi politik luar negeri. Sangat penting bagi pemerintah untuk waspada dalam memantau dan menangani informasi yang salah secara online untuk memastikan bahwa informasi yang akurat disebar. Selain itu, sifat media sosial yang viral dapat meningkatkan ketegangan diplomatik antar negara, karena unggahan yang menghasut atau menyesatkan dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu, para diplomat dan pakar politik luar negeri harus beradaptasi dengan lanskap digital baru ini dengan mengembangkan strategi untuk melawan disinformasi dan menavigasi kompleksitas komunikasi online untuk menjaga hubungan internasional yang positif.

Namun, di sisi lain, media memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi publik dan citra internasionalnya. Media memungkinkan Indonesia untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mempromosikan nilai-nilai dan kepentingannya di kancah internasional. Sebagai contoh, dalam sengketa wilayah dengan negara tetangga, Indonesia dapat menggunakan platform media sosial untuk

mengklarifikasi posisinya dan terlibat dalam dialog konstruktif untuk mencegah informasi yang keliru yang dapat meningkatkan ketegangan. Selain itu, melalui kemitraan dengan kantor berita internasional, Indonesia dapat menampilkan keragaman budaya dan kemajuan ekonominya untuk menarik investasi asing dan membangun hubungan diplomatik yang lebih kuat.

6.6 Kesimpulan

Bagian ini telah mengupas peran media dalam politik luar negeri Indonesia, baik dari perspektif teoretis maupun melalui contoh konkret dalam konteks internasional dan domestik. Media memainkan peran signifikan dalam memengaruhi politik luar negeri, terutama melalui pembentukan opini publik dan dukungan terhadap kebijakan diplomasi. Dari perspektif realisme, media memiliki pengaruh terbatas karena negara lebih dipandu oleh kalkulasi kekuatan dan keamanan. Sebaliknya, dalam perspektif liberal, media dianggap sebagai elemen penting dalam mendorong transparansi dan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri.

Dalam politik luar negeri Indonesia, media menjadi alat yang sangat strategis, terutama untuk membangun citra positif dan melindungi kepentingan nasional. Media sosial, misalnya, digunakan secara efektif dalam diplomasi publik untuk berinteraksi dengan masyarakat internasional,

mempromosikan peran Indonesia di forum global, dan memberikan informasi penting, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Pada masa Orde Baru, media lebih dikendalikan oleh pemerintah dan digunakan sebagai alat propaganda untuk mempertahankan stabilitas politik dan mendukung kebijakan negara.

Namun, terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan, seperti penyebaran disinformasi dan upaya pengendalian narasi oleh berbagai aktor yang dapat memengaruhi politik luar negeri secara negatif. Walaupun demikian, peluang yang dihadirkan oleh media, terutama dalam hal diplomasi digital, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengomunikasikan politik luar negerinya secara lebih transparan, dinamis, dan inklusif, baik kepada warga negara sendiri maupun kepada komunitas internasional.

Media adalah aktor penting dalam politik luar negeri yang berfungsi tidak hanya sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai alat diplomasi publik dan pembentuk persepsi. Di era digital ini, kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan media dengan baik akan menentukan efektivitas diplomasi dan keberhasilan dalam melindungi serta mempromosikan kepentingan nasional Indonesia di panggung internasional.

Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimana media dapat digunakan secara efektif oleh pemerintah Indonesia untuk mempengaruhi opini

publik internasional terkait isu-isu politik luar negeri? Berikan contoh.

2. Apakah media sosial lebih efektif dibandingkan media tradisional dalam mendukung politik luar negeri Indonesia? Mengapa?
3. Bagaimana pemerintah Indonesia dapat mengatasi tantangan disinformasi dan berita palsu dalam konteks politik luar negeri?
4. Sejauh mana media dapat mempengaruhi keputusan pemerintah Indonesia dalam merespons konflik internasional seperti yang terjadi di Laut China Selatan?
5. Apakah penggunaan media oleh pemerintah Indonesia dalam kasus perlindungan WNI di luar negeri sudah optimal? Apa yang bisa ditingkatkan?
6. Bagaimana media dapat berperan dalam mempromosikan konsep Islam moderat yang diusung oleh Indonesia di panggung internasional?
7. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menggunakan media sebagai alat diplomasi publik di era digital ini?

Glosarium

Teori Perdamaian Demokratis: Teori yang menyatakan bahwa negara-negara demokratis cenderung tidak berperang satu sama lain karena adanya pengaruh opini publik dan kebutuhan untuk persetujuan legislatif.

Efek CNN: Fenomena di mana liputan media, terutama televisi, dapat mempengaruhi politik luar negeri dengan menyoroti isu-isu tertentu, sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan.

Hipotesis Pengindeksan: Teori yang menyatakan bahwa media berita cenderung mencerminkan debat yang terjadi di antara elit politik, bukan mengarahkan debat itu sendiri.

Teori Aversion Kasualitas: Teori yang menyatakan bahwa media dan opini publik dapat membatasi politik luar negeri dengan menyoroti korban jiwa dalam konflik, sehingga mengurangi dukungan publik terhadap perang.

Pembingkaihan dan Pengarahan: Proses di mana media membentuk dan mengarahkan persepsi publik tentang isu-isu tertentu, sering kali sesuai dengan agenda elit politik.

Fungsi Propaganda: Teori kritis yang berpendapat bahwa media berfungsi untuk menyebarkan narasi yang mendukung kepentingan politik dan ekonomi elit.

Pendekatan Pluralis: Pandangan bahwa media dan opini publik dapat mempengaruhi politik luar negeri dan sebaliknya, meskipun dampaknya cenderung taktis daripada strategis.

Realism Struktural: Pandangan dalam hubungan internasional yang menyatakan bahwa struktur anarki sistem internasional memaksa negara-negara untuk bertindak

serupa demi keamanan, tanpa memperhatikan faktor internal seperti media.

Agenda Setting: Proses di mana media mempengaruhi isu-isu yang dianggap penting oleh publik dan politisi dengan menentukan topik-topik yang mendapat perhatian.

Konstruktivisme: Pendekatan dalam hubungan internasional yang melihat identitas, norma, dan diskursus sebagai faktor yang membentuk politik luar negeri, termasuk peran media.

BAB 7**PENUTUP**

Buku ini secara umum membahas dinamika politik luar negeri Indonesia dengan mengintegrasikan landasan teoretis dan implementasinya di berbagai konteks. Buku ini menyoroti prinsip bebas aktif sebagai pilar utama politik luar negeri Indonesia, yang memandu negara dalam menavigasi tantangan global dan menjaga kedaulatan nasional tanpa memihak kekuatan besar. Pendekatan ini memberikan wawasan tentang peran Indonesia sebagai mediator dalam berbagai isu internasional, seperti konflik Laut China Selatan, krisis Rohingya, dan perubahan iklim, serta menekankan pentingnya fleksibilitas dan netralitas dalam diplomasi.

Dalam buku ini, dijelaskan bagaimana politik luar negeri Indonesia berkembang dari era awal kemerdekaan hingga kontemporer, melalui berbagai periode pemerintahan. Setiap era menunjukkan adaptasi prinsip bebas aktif terhadap tantangan domestik dan global yang terus berubah. Contohnya, peran Indonesia dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 mencerminkan komitmennya terhadap solidaritas negara-negara berkembang, sementara politik luar negeri era Reformasi menekankan transparansi dan rekonsiliasi internasional.

Buku ini juga mengeksplorasi dimensi meta-teoretis, seperti ontologi dan epistemologi, yang menjadi dasar analisis politik luar negeri. Dimensi ini membantu pembaca memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan diplomatik, termasuk hubungan antara aktor individu dan struktur global. Pendekatan teoretis seperti realisme, konstruktivisme, dan teori pengambilan keputusan dijelaskan secara rinci, memberikan kerangka kerja yang kaya untuk menganalisis politik luar negeri Indonesia.

Selain aspek teoretis, buku ini menggambarkan peran Indonesia dalam isu-isu kontemporer, seperti perannya dalam diplomasi lingkungan hidup dan perubahan iklim. Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon tetapi juga mempromosikan keadilan global dalam forum-forum seperti COP. Hal ini mencerminkan bagaimana politik bebas aktif memungkinkan Indonesia berkontribusi pada isu global tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Secara khusus, buku ini diharapkan memberikan wawasan menyeluruh yang tidak hanya berguna bagi mahasiswa Hubungan Internasional yang sedang mempelajari dinamika politik luar negeri Indonesia, tetapi juga tidak tertutup bagi para praktisi dan akademisi yang tertarik memahami dinamika politik luar negeri Indonesia. Melalui berbagai bab yang telah disusun, pembaca diharapkan dapat memahami bagaimana Indonesia menjalankan politik luar negerinya di

tengah dinamika geopolitik dunia yang kompleks. Selain itu, pembaca diharapkan dapat mengeksplorasi lebih jauh bagaimana politik luar negeri Indonesia mampu mempertahankan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kontribusi internasional. Lebih dari itu, kami berharap buku ini mampu menginspirasi diskusi dan penelitian lebih lanjut mengenai topik-topik yang relevan dengan politik luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghaie Joobani, H., & Mousavipour, M. (2015). Russia, Turkey, and Iran: Moving Towards Strategic Synergy in the Middle East? *Strategic Analysis*, 39(2), 141–155. <https://doi.org/10.1080/09700161.2014.1000658>
- Agusman, D. D., & Fatihah, C. (2020). Celebrating the 25th Anniversary of UNCLOS Legal Perspective: The Natuna Case. *Indonesian Journal of International Law*, 17(4). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.4.799>
- Alford, M. (2015). How Useful Is a Propaganda Model for Screen Entertainment? In *Noam Chomsky* (pp. 141–164). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-137-32021-6_8
- Allison, G. T., & Zelikow, P. (1999). *Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis* (2nd ed.). Longman.
- An Luong, D. N., & Vu, H. T. (2022). The US Media on the Vietnam War and Beyond. In *Journalism and Foreign Policy* (pp. 148–163). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003162964-10>
- Anderson, P. (2002). Assessment and Development of Executive Function (EF) During Childhood. *Child Neuropsychology*, 8(2), 71–82. <https://doi.org/10.1076/chin.8.2.71.8724>
- Antoinette BURTON. (2018). AFRICA in the INDIAN Imagination. *Africa Review of Books*, 14(2). <https://doi.org/10.57054/arb.v14i2.4777>
- Antonia Immaculata Putri Seran, Bernadus Febriyanto, Yohanes Arman, & Pregrinus Rangga. (2023). Kedudukan Indonesia Dalam Menyikapi Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 229–247. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i5.1966>

- Antúnez, J. C. (2016). Islam in Russia: Challenge or Opportunity. *Estudios Globales*, <https://Global-Strategy.Org/Islam-in-Russia-Challenge-or-Opportunity>, 6(11), 2016.
- Anwar, D. F. (1994). Indonesia's Foreign Policy After the Cold War. *Southeast Asian Affairs 1994*, 1994(1), SEAA94i. <https://doi.org/10.1355/SEAA94I>
- Anwar, D. F. (2014). Indonesia's peacekeeping operations: History, practice, and future trend. In *Asia-Pacific nations in international peace support and stability operations* (pp. 189–210). Springer.
- Aos Yuli Firdaus, & Harun Umar. (2022). Indonesia-Finland Renewable Energy Development Cooperation. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal*, 4(2), 292–301. <https://doi.org/10.33258/biohs.v4i2.668>
- Aprianto Trianggoro Putro, Endro Legowo, Panji Suwarno, Pujo Widodo, & Achmed Sukendro. (2023). Indonesian Leadership Policies and Strategies In Facing The South China Sea Conflict. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(3). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i3.802>
- Asakir, I., & Almubaroq, H. Z. (2024). The Indonesian Defense Management Concept In Resolving The Israel-Palestine Conflict. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 3(6).
- Atmojo, M. E., Zaenuri, M., Al-Hamdi, R., Rahmawati, D. E., Iqbal, M., Fridayani, H. D., Habibullah, A., Mahendra, G. K., Pratiwi, V. P., & Kariem, M. Q. (n.d.). *Covid-19*.
- Azzqy, A. A. R., & Awal, S. (2023a). MENJAWAB PEMBENTUKAN AUKUS DI KAWASAN ASIA PASIFIK MENGGUNAKAN PRINSIP BEBAS AKTIF INDONESIA. *Jurnal Dinamika*

- Global*, 8(2), 251-266.
<https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1890>
- Azzqy, A. A. R., & Awal, S. (2023b). MENJAWAB PEMBENTUKAN AUKUS DI KAWASAN ASIA PASIFIK MENGGUNAKAN PRINSIP BEBAS AKTIF INDONESIA. *Jurnal Dinamika Global*, 8(2), 251-266.
<https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1890>
- Barnett, M. (2005). Social constructivism. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, 5, 148-165.
- Benarrivo, R. (2016). Diplomasi Indonesia dalam Membangun Interfaith Harmony melalui ASEM Interfaith Dialogue (2004-2009). *Jurnal Dinamika Global*, 1(01), 117-132.
<https://doi.org/10.36859/jdg.v1i01.17>
- BERGGREN, D. J., & RAE, N. C. (2006). Jimmy Carter and George W. Bush: Faith, Foreign Policy, and an Evangelical Presidential Style. *Presidential Studies Quarterly*, 36(4), 606-632.
<https://doi.org/10.1111/j.1741-5705.2006.02570.x>
- Bounthavong, B., Surjaatmadja, S., & Anwar, S. (2023). Indonesia's Humanitarian Diplomacy in Providing Aid for Cyclone Mocha Disaster in Myanmar and its Impact on Security and Stability in Asean. *International Journal of Integrative Research*, 1(11), 637-652.
<https://doi.org/10.59890/ijir.v1i11.858>
- Bowring, B. (2022). Britain and the Iraq War. In *International Law*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/obo/9780199796953-0238>
- Bramayudha, A., & Irawan, A. (2023). Hajj and Umrah during Pandemic Covid-19: The Case of Indonesia. *International Journal of Islamicate Social Studies*, 1(1), 13-21.
<https://doi.org/10.62039/ijiss.v1i1.12>

- Carlsnaes, W. (2013). Foreign Policy. In *Handbook of International Relations* (pp. 298–325). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446247587.n12>
- Carlsnaes, W., Risse, T., & Simmons, B. (2013). *Handbook of International Relations*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446247587>
- Chan, S. (2017). *Progress in the Democratic Peace Research Agenda* (Vol. 1). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.280>
- Cheng, M. (2024). The Role of Religion in the International Clash of Civilisations: Beliefs and Frictions. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 47(1), 26–32. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/47/20240871>
- Delanova, M. (2021). Health Diplomacy as an Instrument of Indonesian Foreign Policy. *Journal Of Global Strategic Studies*, 1(2), 78–91. <https://doi.org/10.36859/jgss.v1i2.849>
- Dimas Subekti, & Suranto. (2021). Using Social Media as Tools of Health Protocol Campaign in the Era of the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *International Journal of Media and Communication Research*, 2(2), 12–23. <https://doi.org/10.25299/ijmcr.v2i2.6230>
- Doyle, M. W. (1997). *Ways of war and peace* (Vol. 219). New York: WW Norton.
- Drozdova, K. (2021). Strategic Faith in Russia: Cultural DNA and Managed Pluralism. *The Review of Faith & International Affairs*, 19(2), 88–101. <https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1917116>
- Elyta, E., Al Qadrie, S. R. F., & Olifiani, L. P. (2023). State Responsibility Model Through Foreign Policy in Handling the Impact of Covid-19 in the Globalization Era. *Politik*

- Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(1), 123–138. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i1.37730>
- Eriksen, M. B. (2017). *Russia's Engagement in Syria: What are Russia motives?*
- Finnemore, M. (2015). Constructing norms of humanitarian intervention. In *Conflict After the Cold War* (pp. 272–289). Routledge.
- Fox, J., & Sandler, S. (2004). *Bringing Religion into International Relations*. Palgrave Macmillan US. <https://doi.org/10.1057/9781403981127>
- Frei, C. (2018). Politics among nations: A book for America. *Hans J. Morgenthau and the American Experience*, 55–74.
- Giagnoni, S. (2019). Fear and Hate in Alabama and Beyond: Narratives of Immigration in the Trump Campaign. *Journal of Hate Studies*, 14(1), 7–31. <https://doi.org/10.33972/jhs.122>
- Gorski, P. S., & Türkmen-Derivoğlu, G. (2012). Religion, nationalism, and international security: Creation myths and social mechanisms. In *The Routledge handbook of religion and security* (pp. 136–147). Routledge.
- Hardiansyah, M. Z., Sopian, W., & Firdaus, R. (2022). THE ROLE OF THE FREE-ACTIVE PRINCIPLE AS THE FOUNDATION OF INDONESIA FOREIGN POLICY IN THE STRATEGY OF CULTURAL DIPLOMACY. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 13(4). <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol13.iss4.art6>
- Haynes, J. (2008). Religion and foreign policy. In *Routledge handbook of religion and politics* (pp. 305–319). Routledge.
- Haynes, J. (2020). *Religion, Conflict and Post-Secular Politics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780367853655>

- Herman, E. S. (1988). a Noam CHOMSKY. *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*.
- Hermann, M. G. (1980). Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*, 24(1), 7. <https://doi.org/10.2307/2600126>
- Hernández, J. C. (2020, May 29). Trump Slammed the W.H.O. Over Coronavirus. He's Not Alone. *The New York Times*.
- Hill, C. (2016). *Foreign policy in the twenty-first century* (Second edition). Palgrave Macmillan. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1525313>
- Hirsh, M. (2021, September 7). How the U.S. Got 9/11 Wrong. *Foreign Policy*.
- Ho, J. (2019). An earthquake or a category 4 financial storm ? A corpus study of disaster metaphors in the media framing of the 2008 financial crisis. *Text & Talk*, 39(2), 191-212. <https://doi.org/10.1515/text-2019-2024>
- Hockenos, P. (2015, October 22). Nothing Can Take Down Angela Merkel — Except 800,000 Refugees. *Foreign Policy*.
- Hoesterey, J. B. (2023a). Indonesian Islam as Model for the World? In *The Geopolitics of Religious Soft Power* (pp. 169-189). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197605806.003.0010>
- Hoesterey, J. B. (2023b). Indonesian Islam as Model for the World? In *The Geopolitics of Religious Soft Power* (pp. 169-189). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197605806.003.0010>
- Hudson, V. M. (2005). Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations. *Foreign*

- Policy Analysis*, 1(1), 1–30.
<https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2005.00001.x>
- Hudson, V. M. (2007). *Foreign policy analysis: classic and contemporary theory*. Rowland & Littlefield.
- Hudson, V. M. (2013). The Individual Decision Maker: The Political Psychology of World Leaders. In *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory* (2nd ed., pp. 37–64). Rowman & Littlefield.
- Hudson, V. M. (2016). 1. The history and evolution of foreign policy analysis. In *Foreign Policy*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/hepl/9780198708902.003.0001>
- Janis, I. L. (1982). *Groupthink: psychological studies of policy decisions and fiascoes* (2nd ed.). Houghton Mifflin.
- Jenkins, D. (1986). Indonesia: Government attitudes towards the domestic and foreign media. *Australian Outlook*, 40(3), 153–161. <https://doi.org/10.1080/10357718608444919>
- Kelemen, R. D., & Vogel, D. (2010). Trading Places: The Role of the United States and the European Union in International Environmental Politics. *Comparative Political Studies*, 43(4), 427–456.
<https://doi.org/10.1177/0010414009355265>
- Kim, K. (2023). Key Features of Indonesia's State Capitalism Under Jokowi. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 10(2).
<https://doi.org/10.21512/jas.v10i2.9075>
- Kirby, D. (2017). The Cold War and American Religion. In *Oxford Research Encyclopedia of Religion*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.398>
- Komarudin, U., & Ayuningtyas, D. (2024). INDONESIA'S RESPONSES TOWARDS ROHINGYA REFUGEES: POLITICAL

- PERSPECTIVE. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 9(2), 112.
<https://doi.org/10.24198/jwp.v9i2.54009>
- Kuntjoro-Jakti, R. B. P., & Yadav, A. S. (2022). Navigating Religious Harmony: A Case Study of the ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC). *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies*, 5(1), 88–99.
- Kusno, M. (2014). Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 12–25.
- Layada, R. (2020). EXAMINING THE FAITH-BASED US FOREIGN POLICY OF G.W. BUSH IN EXECUTING MIDDLE EASTERN AFFAIRS. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 6(2), 552–567.
<https://doi.org/10.20319/pijss.2020.62.552567>
- Luerdi, L. (2022). *POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI AWAL PANDEMI NOVEL CORONAVIRUS DISEASE: JANUARI – AGUSTUS 2020*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/py9du>
- Luerdi, L., & Setiawan, A. (2022). Upholding Multilateralism: Indonesia's Foreign Policy in Responding to Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 18(1), 29–54. <https://doi.org/10.26593/jihi.v18i1.5255.29-54>
- Madu, L. (2021). Twitter Diplomacy @Kemlu_RI: A Case Study of Bali Democracy Forum 2019. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(1), 31–43.
<https://doi.org/10.18196/jhi.v10i1.11566>
- Martill, B., & Mesarovich, A. (2024). Foreign Policy as Compensation: Why Brexit Became a Foreign and Security Policy Issue. *International Studies Quarterly*, 68(2).
<https://doi.org/10.1093/isq/sqae014>
- Ma'ruf, F., Tri Legionosuko, & Helda Risman. (2020). The Rationality of Indonesia Free-Active Politics Facing Chinese Aggressiveness in the Claims of the North Natuna Sea.

Technium Social Sciences Journal, 8, 583–597.
<https://doi.org/10.47577/tssj.v8i1.496>

Marzuki, K., & Tiola. (2021). Indonesian Humanitarianism: Foundations, Characteristics and Contributions. *Asian Journal of Comparative Politics*, 6(4), 330–344.
<https://doi.org/10.1177/205789112111058144>

Maulida, R. A. (2021). Public Communication Strategies of the Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia on Instagram Account@ kemlu. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(6), 98–107.

Mintz, A., & DeRouen Jr, K. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511757761>

Modongal, S. (2023). The resurgence of religion in international relations: How theories can accommodate it? *Cogent Social Sciences*, 9(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2241265>

Morin, J.-F., & Paquin, J. (2018). *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. Palgrave Macmillan.

Mudore, S. B. (2019). PERAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA. *Jurnal CMES*, 12(2), 170.
<https://doi.org/10.20961/cmcs.12.2.37891>

Natalegawa, M. M. (2018). Indonesian Foreign Policy: Waging Peace, Stability, and Prosperity. In U. Fionna, D. Simandjuntak, & S. D. Negara (Eds.), *ASPIRATIONS WITH LIMITATIONS: Indonesia's Foreign Affairs under Susilo Bambang Yudhoyono*. ISEAS – Yusof Ishak Institute.

Notowidigdo, M. (1958). An Indonesian Policy Aimed at Maintaining Freedom and Promoting World Peace. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social*

- Science*, 318(1), 43–48.
<https://doi.org/10.1177/000271625831800107>
- Nugraha, O. N. R. A. C. (2021). Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 25–42.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.414>
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. Public affairs.
- Office of the Historian. (n.d.-a). *Camp David Accords and the Arab-Israeli Peace Process*. United States Department of State.
- Office of the Historian. (n.d.-b). *The Cuban Missile Crisis, October 1962*. United States Department of State.
- Oso, L. (2013). Media and democracy in Nigeria: A critique of liberal perspective. *New Media and Mass Communication*, 10(1), 13–22.
- Pahlavi, P. (2007). Evaluating Public Diplomacy Programmes. *The Hague Journal of Diplomacy*, 2(3), 255–281.
<https://doi.org/10.1163/187119007X240523>
- Parr, H. (2014). National Interest and the Falklands War. In *British Foreign Policy and the National Interest* (pp. 66–82). Palgrave Macmillan UK.
https://doi.org/10.1057/9781137392350_4
- Pathak, S., & Parris, C. (2021). India's diplomatic discourse and *development dilemma* in the international climate change regime. *India Review*, 20(1), 1–28.
<https://doi.org/10.1080/14736489.2021.1875699>
- Pedrason, R., Haryanto, A., Yusuf, M., & Setyoko, P. I. (2024). Navigating Around Conflict: The Indonesia Way to Initiating Peace Talk in the South China Sea Dispute. *Revista*

- de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), e05273.
<https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-012>
- Petro, N. N. (2018). The Russian Orthodox Church. In *Routledge Handbook of Russian Foreign Policy* (pp. 217–232). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315536934-15>
- Phillips, A. (2016). Beyond Bandung: the 1955 Asian-African Conference and its legacies for international order. *Australian Journal of International Affairs*, 70(4), 329–341. <https://doi.org/10.1080/10357718.2016.1153600>
- Putnam, R. D. (2019). Two-level games: The impact of domestic politics on transatlantic bargaining. In *America and Europe in an Era of Change* (pp. 69–83). Routledge.
- Putri, S. S. U., & Khan, I. U. (2023). Machine Learning Identification on Twitter Towards Combating Covid-19 (SARS-CoV-2): Pandemic Attacks and Urban Resilience in Indonesia. *Government & Resilience*, 1(1), 52–65. <https://doi.org/10.62503/gr.v1i1.5>
- Queen, R., & Gibson, B. (2017). *Kenneth Waltz's Theory of International Politics*. London: Routledge.
- Rahmadhanitya, M. A. D., & Jatmika, S. (2021). The Impact of Covid-19 on Indonesian Muslim Pilgrimage. *Millah*, 21(1), 1–22. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art1>
- Rahman, M. (2013a). Indonesia Climate Diplomacy: An Eclectic Approach in Understanding the Logic of Action of Indonesia Foreign Policy on Climate Change Mitigation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3053466>
- Rahman, M. (2013b). Indonesia Climate Diplomacy: An Eclectic Approach in Understanding the Logic of Action of Indonesia Foreign Policy on Climate Change Mitigation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3053466>

- Rahmat Kartiwa, & Zakiah Jalianty. (2023). Analysis of the Role of Indonesia's Active Free Diplomacy in Resolving the Rohingya Conflict. *Social Impact Journal*, 2(2), 62–68. <https://doi.org/10.61391/sij.v2i2.62>
- Renedo-Farpón, C., João Canavilhas, J. x, & Díez-Garrido, M. (2022). Transparency mechanisms in the media: analysis of Spain and Portugal. *El Profesional de La Información*. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.ene.05>
- Renta, P. P., Endah Trisnani, Hadidah Sallimi, & Surwandono, S. (2023). Efektivitas Diplomasi Haji oleh Kementerian Agama Indonesia pada Tahun 2020-2023. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 13(1), 1–25. <https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.1.1-25>
- Ridha, M. A., Ibdalsyah, & Ayuniyyah, Q. (2022). Analisis Nilai Kontribusi Bantuan Kemanusiaan Palestina Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2018-2021. *AL-MUZARAAH*, 10(2), 169–184. <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.169-184>
- Rosyidin, M. (2020). Reconciling State's Sovereignty with Global Norms: Indonesia's Quiet Diplomacy in Myanmar and the Feasibility of the Implementation of Responsibility to Protect (R2P) in Southeast Asia. *Global Responsibility to Protect*, 12(1), 11–36. <https://doi.org/10.1163/1875984X-01201003>
- Rukmana, L., & Kurniawanti, M. R. (2024). Indonesia's Role in the Israeli Occupation of Palestinian Territories: New Order Era to The Reformation. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 12(2), 723. <https://doi.org/10.24127/hj.v12i2.10227>
- Saiya, N. (2012). Onward Christian Soldiers: American Dispensationalists, George W. Bush and the Middle East. *Holy Land Studies*, 11(2), 175–204. <https://doi.org/10.3366/hls.2012.0044>

- Samuel, H. (1993). The clash of civilizations. *Foreign Affairs*, 72(3), 22–49.
- Sandal, N. A., & James, P. (2011). Religion and International Relations theory. *European Journal of International Relations*, 17(1), 3–25. <https://doi.org/10.1177/13540661110364304>
- Santos, M. H. de C., & Teixeira, U. T. (2013). The essential role of democracy in the Bush Doctrine: the invasions of Iraq and Afghanistan. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 56(2), 131–156. <https://doi.org/10.1590/S0034-73292013000200008>
- Saputra, P. P. R. (2023). The Role of Indonesian Politics Diplomacy Towards Saudi Arabia In Enhancement of Hajj Pilgrimage Quota After Covid-19 Pandemic. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 9(2), 236–240. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i2.339>
- Saragih, H. M. (2019). Kebijakan luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka Pada Masa Pemerintahan Jokowi. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(2), 133. <https://doi.org/10.29240/jf.v3i2.601>
- Savigny, H., & Marsden, L. (2013). *Media, Religion and Conflict*. Ashgate Publishing, Ltd.
- Schmitz, D. F., & Walker, V. (2004). Jimmy Carter and the Foreign Policy of Human Rights: The Development of a Post-Cold War Foreign Policy. *Diplomatic History*, 28(1), 113–143. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7709.2004.00400.x>
- Setiawati, S. M. (2024). The role of Indonesian government in middle east conflict resolution: consistent diplomacy or strategic shifts? *Frontiers in Political Science*, 6, 1304108.
- Setyowati, A. (2023). Perkembangan Karakter Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Jurnal*

Multidisiplin Dehasen (MUDE), 2(4).
<https://doi.org/10.37676/mude.v2i4.4812>

Sidiq, F., Saputra, J., & Tadj, L. (2024). Indonesia's Role in Supporting Palestinian Independence and Responding to the Israeli-Palestinian Conflict: Analysis of Foreign Policy and Current Issues. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 1(4), 72–77.

Sitamala, A. (2020). INDONESIA AS NON-PERMANENT MEMBER OF UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, GUARDING THE PEACE AND STABILITY IN ASEAN. *Lampung Journal of International Law*, 2(2), 121–128.
<https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2037>

Smith, C. Q., & Williams, S. G. (2021). Why Indonesia Adopted 'Quiet Diplomacy' over R2P in the Rohingya Crisis: The Roles of Islamic Humanitarianism, Civil–Military Relations, and asean. *Global Responsibility to Protect*, 13(2–3), 158–185.

Smith, G. S. (2011). JIMMY CARTER: A PROGRESSIVE EVANGELICAL FOREIGN POLICY. *The Review of Faith & International Affairs*, 9(4), 61–70.
<https://doi.org/10.1080/15570274.2011.630205>

Smith, S., Hadfield, A., & Dunne, T. (2016). Introduction. In *Foreign Policy*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/hepl/9780198708902.003.0030>

Songbatumis, A. (2021). The Role of Islam in Indonesian Foreign Policy: A Case of Susilo Bambang Yudhoyono Introduction. *Polish Political Science Yearbook*, 50, 1–23.
<https://doi.org/10.15804/ppsy202119>

Sumiati, W. (2020). THE NON-COOPERATIVE JOURNALISTS' STRUGGLE AGAINST SELF-CENSORSHIP DURING THE NEW ORDER INDONESIA (1967-1998). *Metahumaniora*, 10(1), 52. <https://doi.org/10.24198/mh.v10i1.26409>

- Suriyanto, S. (2020). The Function of the Press Council in Supporting Legal Protection for Journalists to Actualise the Press Freedom. *Journal of Politics and Law*, 13(1), 104. <https://doi.org/10.5539/jpl.v13n1p104>
- Suryadinata, L. (1998a). Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Adidaya: Faktor Ekonomi dan Nonekonomi. In *Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Soeharto* (pp. 198–126). LP3ES.
- Suryadinata, L. (1998b). *Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Soeharto*. LP3ES.
- Suryadinata, L. (2022). *Indonesia's Foreign Policy under Suharto: Aspiring to International Leadership* (2nd ed.). ISEAS.
- Taufik Budi Cahyana, Achmad Wardana, Hudoro Tahdi, & Y.H. Yogaswara. (2023). Review Transfer of Technology and Local Content & Offsets to Indonesia on the Procurement of Rafale Fighter Jets. *Jurnal Inotera*, 8(1), 65–72. <https://doi.org/10.31572/inotera.Vol8.Iss1.2023.ID196>
- Tereshchuk, V. (2017). The ways of using mass media to influence the foreign policy agenda in a democratic and non-democratic state. *Історико-Політичні Проблеми Сучасного Світу*, 33–34, 379–385. <https://doi.org/10.31861/mhpi2016.33-34.379-385>
- Thomas, S. (2000). Religion and International Conflict. In *Religion and International Relations* (pp. 1–23). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781403916594_1
- Umar, A. R. M. (2016). A Genealogy of Moderate Islam: Governmentality and Discourses of Islam in Indonesia's Foreign Policy. *Studia Islamika*, 23(3), 399–433. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i3.3157>

- Umar, A. R. M. (2019). Why Is It Really Hard To Move On? Explaining Indonesia's Limited Foreign Policy Reform After Soeharto. In M. Lane (Ed.), *Continuity and Change after Indonesia's Reforms: Contributions to an Ongoing Assessment* (pp. 195–212). ISEAS – Yusof Ishak Institute.
- Vatikiotis, M. R. J. (1992). Indonesia's Foreign Policy in the 1990s. *Contemporary Southeast Asia*, 14(4), CS14-4d. <https://doi.org/10.1355/CS14-4D>
- Wahyudi, H., & Niko, N. (n.d.). *Menggagas Diplomasi Demokrasi Muslim: Upaya Indonesia dalam Menghadapi Pelanggaran HAM di Myanmar*.
- Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. In *Addison-Wesley series in political science*. Addison-Wesley Pub. Co.
- Wardhani, B., & Dharmaputra, R. (2024). Indonesia's ambivalence in the Russia-Ukraine war: Balancing equal sovereignty norms with a familial approach. *Contemporary Security Policy*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/13523260.2024.2397926>
- WARDHANI, B., & DUGIS, V. (2023). Indonesian Foreign Policy under the Jokowi Administration: Variations on Traditional Ideas. *Issues & Studies*, 59(03). <https://doi.org/10.1142/S1013251123500054>
- Weatherbee, D. E. (2008). *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*. Rowman & Littlefield.
- Weatherbee, D. E. (2016). *Understanding Jokowi's Foreign Policy*. ISEAS – Yusof Ishak Institute.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391–425.
- White, B. (2001). European Foreign Policy and Foreign Policy Analysis. In *Understanding European Foreign Policy* (pp.

- 170–178). Macmillan Education UK.
https://doi.org/10.1007/978-0-333-98561-8_9
- Wicaksana, I. G. W. (2015). Indonesia's Policy on Climate Change Mitigation: Constraints and Solutions. *Advanced Science Letters*, 21(2), 216–218.
<https://doi.org/10.1166/asl.2015.5858>
- Wicaksono, R. M. T. A. D., Hirawan, F. B., & Ragamustari, S. K. (2022). An Analysis of Indonesia's Free and Active COVID-19 Vaccine Diplomacy. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), 32–45. <https://doi.org/10.18196/jhi.v11i1.13087>
- Widhiyoga, G., & Harini, S. (2019). Identitas Politik Luar Negeri Indonesia di Masa Reformasi (1999-2014). *Research Fair Unisri*, 3(1).
- Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. *Kybernology : Journal of Government Studies*, 2(2), 70–95.
<https://doi.org/10.26618/kjgs.v2i2.9487>
- Wivel, A. (2024). Foreign Policy Analysis and Realism. In *The Oxford Handbook of Foreign Policy Analysis* (pp. 97–114). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198843061.013.6>
- Wuryandari, G. (2017a). Indonesian Diplomacy in the Digital World. *SUVANNABHUMI*, 9(2), 145–164.
- Wuryandari, G. (2017b). Understanding Indonesia's Foreign Policy on Energy Security Issues. In *Foreign Policy and Energy Security Issues in Indonesia* (pp. 111–128). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4421-2_5
- Xie, Z. (2010). Religion and American Foreign Policy. *Pacific Journal*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:148317571>

- Xue, S., & He, K. (2022). Indonesia's Foreign Policy since the Reformasi. In *The Routledge Handbook of Diplomacy and Statecraft* (pp. 221–232). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003016625-22>
- Yaakop, R., & Idris, A. (2017). Belief System of Wahabi Doctrine in the Kingdom of Saudi Arabia. *INSANCITA*, 2(2).
- Zevelev, I. (2016). *Russian national identity and foreign policy*.

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA ANTARA TEORI DAN PRAKTIK

Buku ini, merupakan panduan pembelajaran pada mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia, yang menghubungkan teori-teori politik luar negeri dengan implementasinya dalam konteks kebijakan Indonesia. Buku ini dirancang sebagai bahan ajar utama untuk mahasiswa Hubungan Internasional yang ingin memahami prinsip bebas aktif sebagai landasan utama politik luar negeri Indonesia. Pembaca diajak untuk menjelajahi evolusi politik luar negeri Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga era globalisasi, dengan penekanan pada penerapan teori dalam kasus-kasus seperti sengketa Laut China Selatan, krisis Rohingya, dan isu perubahan iklim. Selain itu, buku ini tidak hanya mengupas prinsip dasar politik luar negeri Indonesia, tetapi juga menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam berbagai konteks global. Dengan pendekatan teoritis dan praktis, buku ini menggambarkan bagaimana politik luar negeri dapat mendukung kedaulatan nasional sekaligus berkontribusi pada perdamaian dunia.



Anita Afriani Sinulingga, adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Lahir di Medan pada 13 April 1982. Saat ini aktif mengajar, meneliti dan menulis di berbagai artikel jurnal atau buku. Anita memiliki ketertarikan pada bidang analisis politik luar negeri, khususnya dalam perspektif studi kebijakan. Untuk menghubungi bisa melalui email anitaafriani@soc.unand.ac.id



Maryam Jamilah, adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Lahir di Bukittinggi tanggal 07 Maret 1992. Telah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Andalas dan melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia, dengan spesialisasi dalam Kajian Timur Tengah dan Islam. Saat ini, beliau juga aktif melakukan penelitian dan pengajaran dengan fokus utama pada Kebijakan Luar Negeri dan Gender.